

PROCEEDINGS EHPA

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN INSTITUSIONAL

Bandung, 14-18 September 2006

IA



ektorat
ayaan



**PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ARKEOLOGI NASIONAL
BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
JAKARTA 2007**

Copyright
Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional
2007

ISBN: 978-979-8041-44-0

Alamat (*Address*)

Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional
Jalan Raya Condet Pejaten No. 4, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12510 - Indonesia
Telp. +62 21 7988171 / 7988131
Fax. +62 21 7988187
Homepage: www.indoarchaeology.com
E-mail: arkenas3@arkenas.com
atik_arkenas@yahoo.com

Produksi dan Distribusi (*Production and Distribution*)
Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional
(*The National Research and Development Centre of Archaeology*)

306 PUS P

PROCEEDINGS EHPA

**KEBIJAKAN
DAN STRATEGI
PENGELOLAAN INSTITUSIONAL**

Bandung, 14-18 Juni 2006



**Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional
Badan Pengembangan Sumberdaya Kebudayaan dan Pariwisata
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata**

Jakarta 2007

Penanggung Jawab (*Responsible Person*)

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional
(*Director of National Research and Development Centre of Archaeology*)

Dewan Redaksi (*Board of Editors*)

Ketua merangkap anggota (*Chairperson and member*)

Dr. Truman Simanjuntak, APU (Arkeologi Prasejarah)

Sekretaris (*Secretary and Member*)

Dra. Dwi Yani Yuniawati, M.Hum. (Arkeologi Prasejarah)

Anggota (*Members*)

Dr. Haris Sukendar, APU (Arkeologi Prasejarah)

Dra. Naniek Harkantiningsih, APU (Arkeologi Sejarah)

Dr. Endang Sri Hardiati (Arkeologi Sejarah)

Drs. Sonny Wibisono, MA, DEA. (Arkeologi Sejarah)

Penyunting Bahasa Inggris (*English Editors*)

Dr. P.E.J. Ferdinandus

Dra. Aliza Diniasti

Redaksi Pendamping (*Associate Editors*)

Dra. Fadhila A.A., M.Hum.

Dra. Titi Surti Nastiti, M.Hum.

Drs. Bambang Budi Utomo

Agustijanto Indrajaya, S.S.

Drs. Mujib

Redaksi Pelaksana (*Managing Editors*)

Dra. Sukowati Susetyo

Murnia Dewi

Tohari Achmad

Daftar Isi

- * **Prospek Penelitian Arkeologi di Wilayah Kerja Balai Penelitian Arkeologi Denpasar**
Oleh: AA Gede Oka Astawa --1
- * **Peran Dan Fungsi Balai Arkeologi Jayapura Sebagai Lembaga Penelitian**
Oleh: Bau Mene dan Klementin Fairyo -- 8
- * **Profil dan Strategi Pengembangan Balai Arkeologi Manado**
Oleh: Bonny A. Tooy -- 18
- * **Permasalahan dan Pemecahannya Balar-Balar di Luar Jawa**
Oleh: Budi Wiyana -- 31
- * **Peran Strategis Penelitian Arkeologi Bagi Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata**
Oleh: Danang Wahyu Utomo -- 35
- * **Peningkatan SDM Pusat Dan Daerah Dalam Menyikapi Pengelolaan Institusi**
Oleh: Purusa. M -- 46
- * **Aspek Pengembangan Dalam Arkeologi: “Sebuah Tinjauan Tugas Pokok Dan Fungsi Balai Arkeologi Banjarmasin”**
Oleh: H. Gunadi Kasnowihardjo, MHum. -- 57
- * **Balai Arkeologi Ambon (Profil Dan Tantangannya)**
Oleh: Drs. I Wayan Suantika -- 66

- * **Sumber Daya Arkeologi Dalam Pengembangan Di Masa Depan**
Oleh: I Gst. A. A. Mas Ratnawati -- 84
- * **Kegiatan Pengembangan Arkeologi Di Balai Arkeologi Manado**
Oleh: Joko Siswanto -- 93
- * **Profil, Strategi Pengembangan, Dan Peran Koordinasi Dalam Aktivitas Arkeologis Di Balai Arkeologi Medan**
Oleh: Lucas Partanda Koestoro -- 103
- * **Sekilas Balai Arkeologi Medan -- 121**

Prospek Penelitian Arkeologi Di Wilayah Kerja Balai Arkeologi Denpasar

A.A. Gede Oka Astawa, Balai Arkeologi Denpasar

I. Latar Belakang

Dalam waktu yang relatif singkat telah terjadi perubahan penting dalam kegiatan kearkeologian di tanah air, karena adanya pergantian dan perubahan induk organisasi yang menjadi payungnya. Perubahan ini, selain membawa perubahan nama institusi di tingkat pusat menjadi Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional, yang lebih penting lagi, ialah institusi ini memperoleh fungsi baru, yaitu pengembangan arkeologi. Perubahan institusi di pusat (Jakarta) ternyata tidak menimbulkan perubahan nama Balai Arkeologi di daerah-daerah, tetapi memberi fungsi “tambahan” yaitu pengembangan hasil penelitian arkeologi seperti yang terjadi di Pusat.

Perubahan di atas sebenarnya cukup mendasar, karena misi penelitian dan pengembangan arkeologi mempunyai sejumlah aspek yang saling bersangkutan. Selain itu, Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional dan Balai Arkeologi di daerah-daerah tidak mungkin bekerja sendiri, tetapi memerlukan mitra kerja dengan membangun jaringan kerja yang disepakati bersama. Kemitraan baik eksternal maupun internal, kiranya patut ditingkatkan. Sementara itu, masih diperlukan juga penyesuaian dalam berbagai hal dan dengan demikian, maka EHPA 2006 ini

adalah suatu upaya untuk menyiapkan diri melangkah ke depan melaksanakan penelitian dan pengembangan arkeologi Indonesia.

Menghadapi perubahan di atas, maka dalam EHPA 2006 akan penulis sampaikan “PROSPEK PENELITIAN ARKEOLOGI DI WILAYAH KERJA BALAI ARKEOLOGI DENPASAR”: secara ringkas membahas hasil-hasil, masalah yang dihadapi, dan pengembangannya ke depan.

II. Penelitian Balai Arkeologi Denpasar

Dalam dua tahun terakhir ini penelitian arkeologi di wilayah kerja Balai Arkeologi Denpasar dapat dikemukakan sebagai berikut:

Tabel 1.

No.	Situs	Wilayah Kerja			Keterangan
		Prop. Bali	Prop. NTB	Prop. NTT	
1.	Prasejarah	Gua Gede, Kec.Nusa Penida, Kab. Klungkung.	Nangasia, Kec.Hu'u, Kab.Dompu	-Lambanapu, Sumba Timur -Sikka, Kab. Mauwere, Flores	
2.	Klasik	-Wasan, Kec. Suka Wati, Kab.Gianyar. -Jero Agung, Kec.Blahbatuh, Gianyar. -Tamblingan Kec. Banjar, Kab. Buleleng.	Warukali, Kec.Dompu, Kab.Dompu.		2005

3.	Islam	-	-	-	
4.	Kolonial	-	-	-	

Tabel 2

No.	Situs	Wilayah Kerja			Keterangan
		Prop. Bali	Prop. NTB	Prop. NTT	
1.	Prasejarah	-Gua Gede, Kec. Nusa, Penida, Kab. Klungkung. -Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana. -Megalitik, Kec. Kintamani, Kab. Bangli. -Megalitik, Kec. Tejakula, Kab. Buleleng.	-	-Sikka, Kab. Maumere, Flores -Lambanapu, Sumba Timur.	2006
2.	Klasik	-Wasan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar. -Jero Agung, Kec. Blah-batu, Kab. Gianyar. -Tamblingan, Kec. Banjar, Kab. Buleleng.	-Warukali, Kec. Dompu, Kab. Dompu -Arsitektur, Kab. Sumba	-	
3.	Islam	-	-	-	-
4.	Kolonial	-	-	-	-

III. Masalah-Masalah Kearkeologian

Berdasarkan pengalaman di lapangan diakui, bahwa selama ini Balai Arkeologi Denpasar menghadapi masalah yang tidak sedikit ada yang mungkin hampir sama dengan masalah yang terjadi pada Balai Arkeologi lainnya. Pada dasarnya hampir semua masalah bersumber kepada kurang atau terbatasnya biaya penelitian dan kegiatan penunjang penelitian lainnya, apalagi dengan adanya “tambahan” peran dan fungsi baru, yaitu pengembangan hasil-hasil penelitian arkeologi untuk pembangunan bangsa. Dalam hal ini pemerintah daerah di wilayah kerja Balai Arkeologi Denpasar dan demikian juga daerah-daerah lainnya, tentu mempunyai kepentingan dalam bidang arkeologi, karena peninggalan arkeologi di daerahnya adalah aset budaya yang sangat potensial. Kepentingan daerah semacam ini, tentu harus dilayani sebagaimana layaknya.

Seperti telah diketahui bersama, Balai Arkeologi Denpasar mempunyai tiga propinsi yang menjadi wilayah kerja yaitu Propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Adapun masalah-masalah yang kami hadapi, adalah :

- a. Kurangnya biaya penelitian, mengakibatkan waktu penelitian sangat pendek (rata-rata kurang dari dua minggu), dan rencana tidak mengacu kepada bobot potensi arkeologis dan jarak tempuh ke sebuah situs arkeologi di luar Bali.
- b. Biaya penerbitan yang sangat terbatas mengakibatkan penumpukan hasil penelitian, sehingga intensitas informasi kearkeologian kepada masyarakat luas tidak berjalan seperti yang diharapkan.
- c. Tidak tersedianya biaya sosialisasi hasil-hasil penelitian kepada masyarakat sebagai mitra kerja yang amat menentukan sehingga tidak dapat mempercepat proses pembelajaran atau pencerdasan bangsa melalui pengenalan kepada keberhasilan nenek moyangnya.
- d. Tidak tersedianya dana kerjasama atau kemitraan untuk

pelayanan masyarakat, misalnya dengan media massa sehingga informasi kearkeologian sebagai warisan budaya masyarakat tidak berjalan lancar.

- e. Tidak direncanakan penyediaan dana pendidikan lanjutan bagi para peneliti ke jenjang S2 dan S3 serta biaya pelatihan bagi tenaga-tenaga teknis.
- f. Terbatasnya perangkat atau sarana penelitian, sehingga penelitian tidak dapat dilaksanakan serentak atau bersama di lokasi yang berbeda.

IV. Pengembangan Ke Depan

Pengembangan ke depan, adalah sebuah tantangan dan juga sebuah harapan bersama dalam melaksanakan misi dan fungsi ganda Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional bersama Balai Arkeologi, yaitu melaksanakan penelitian dan pembangunan bangsa, di tengah-tengah derasnya pengaruh budaya global dan modernisasi, supaya bangsa ini tidak kehilangan jatidirinya. Untuk melaksanakan misi dan fungsi yang sangat kompleks dan luas dalam kondisi institusi sekarang, maka diperlukan kajian komprehensif mengenai biaya operasional penelitian arkeologi dan keseimbangannya dengan kepariwisataan, sarana kerja dan SDM dengan memperhitungkan pula luasnya NKRI dan potensi arkeologi yang tersebar di seluruh Tanah Air. Perlu diketahui, bahwa Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional bersama Balai Arkeologi, tidak mungkin bekerja sendiri. Sementara itu, seperti telah disinggung di depan, setiap daerah memiliki peninggalan arkeologi yang dapat dijadikan unggulan atau prioritas pilihan.

Mengingat pengalaman di masa lalu dan mencermati misi dan fungsi penelitian dan pengembangan hasil-hasil penelitian arkeologi dan dengan mempelajari juga masalah-masalah yang dihadapi oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional dan Balai

Arkeologi, maka perlu suatu perubahan (reformasi) terhadap paradigma penelitian, yang semula adalah penelitian arkeologi untuk kepentingan arkeologi. Paradigma model lama ini harus diubah menjadi arkeologi terapan atau arkeologi pembangunan. Perlu dikemukakan di sini, bahwa di masa lalu arkeologi terapan sebenarnya telah dilaksanakan juga sebagai upaya pengembangan hasil-hasil penelitian arkeologi, tetapi belum terprogram secara rinci, sehingga terkesan sebagai suatu kegiatan insidental. Perubahan paradigma arkeologi Indonesia seyogyanya dilaksanakan dengan bijak dengan mengedepankan pengembangan sesuai dengan bobot kearkeologiannya. Dengan perubahan ini, maka penelitian arkeologi tidak ada matarantai yang putus ditengah perjalanan dalam pembangunan bangsa. Segala upaya perubahan ini akan berhasil baik, jika faktor-faktor pendukung seperti biaya operasional, sarana kerja seperti laboratorium penelitian dan SDM mencukupi keperluan yang ideal, karena faktor-faktor inilah yang menentukan denyut kehidupan institusi (pusat dan daerah) yang sehat.

Menurut hemat penulis, perubahan (reformasi) paradigma arkeologi Indonesia memerlukan strategi kerja yang lebih mantap dan ke depan dapat disampaikan pokok-pokok pikiran sebagai berikut.

1. Program kerja, selain memperhitungkan potensi SDM, dana dan sarana, yang perlu dijadikan dasar, ialah bobot nilai arkeologis yang ada di daerah yang mungkin dapat dijadikan penelitian unggulan. Dalam hal ini, kepentingan daerah perlu diakomodasikan dengan baik. Peningkatan jenjang pendidikan peneliti dan tenaga teknis, agar disediakan biaya secara teratur dan berlanjut.
2. Penelitian tematik, memberi peluang bagi Balai Arkeologi untuk mengajukan tema sesuai dengan potensi arkeologi di wilayah kerjanya dan disesuaikan dengan kepentingan Pemerintah Daerah.
3. Kemitraan penelitian perlu mendapat dukungan biaya secukupnya, karena Balai Arkeologi di daerah tidak mungkin

bekerja sendiri. Selain itu perlu diprogramkan penelitian bersama antar Balai Arkeologi (misalnya Balai Arkeologi Denpasar dengan Balai Arkeologi Makasar). Dalam dua tahun terakhir ini, Balai Arkeologi Denpasar telah membangun kerjasama dengan Pemkab. Buleleng dan Klungkung.

4. Pemasarakatan arkeologi, adalah upaya pengembangan arkeologi Indonesia menjadi arkeologi pembangunan. Dalam hal ini perlu dirancang suatu pelayanan publik dengan bekerjasama dengan media massa yang merupakan kekuatan yang dapat membantu pelaksanaan penelitian dan pengembangan hasil-hasil penelitian. Dalam pelayanan publik ini diperlukan gaya atau kemasan yang mudah dimengerti oleh masyarakat umum, diantaranya terbitan populer bergaya jurnalistik yang dapat mengisi kekosongan bacaan. Sementara itu, penerbitan hasil-hasil penelitian perlu mendapat dukungan dana yang cukup, karena sampai sekarang tidak sedikit laporan penelitian yang layak terbit, masih menumpuk. Penerbitan berkala dan tidak berkala juga perlu mendapat perhatian serius sebagai bagian dari pengembangan, yang sekaligus merupakan pertanggung jawaban kegiatan institusi.

Peran Dan Fungsi Balai Arkeologi Jayapura Sebagai Lembaga Penelitian

Bau Mene dan Klementin Fairyo
(Balar Jayapura)

Abstrak

Balar Arkeologi sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional memiliki landasan yang sangat kuat untuk pengembangan arkeologi kedaerahan. Didalam pelaksanaan penelitian senantiasa dikembangkan agar dapat mencapai hasil optimal melalui peningkatan kegiatan penelitian, peningkatan kualitas peneliti dan teknisi serta peningkatan sarana dan prasarana pendukungnya.

Dalam melaksanakan penelitian, Balai Arkeologi harus berkoordinasi dengan Instansi terkait di pusat dalam hal ini Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional dituntut mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yakni dapat memotivasi membina dan mengarahkan unit-unit pelaksana teknisnya, yaitu Balai Penelitian Arkeologi yang berkedudukan di daerah. Dengan demikian kedua Institusi ini harus memiliki keterpaduan program, sehingga tercipta komunikasi dua arah dan dapat memecahkan setiap permasalahan secara bersama.

Dalam pelaksanaan program penelitian arkeologi, Balai Arkeologi Jayapura belum memenuhi standar minimal, hal ini dikarenakan masih banyak sumberdaya arkeologi yang belum diteliti

secara maksimal karena kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki lembaga ini. Untuk itu diperlukan penambahan dan pengembangan sumber daya manusia.

I. Pendahuluan

Balai Arkeologi sebagai unit pelaksanaan teknis (UPT) dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional memiliki nilai strategis bagi pengembangan arkeologi Indonesia. Sebagai perpanjangan tangan dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional yang berada di daerah. UPT ini memiliki landasan yang kuat untuk pengembangan Arkeologi kedaerahan.

Balai Arkeologi (Balai) Jayapura adalah Unit Pelaksanaan Teknis di lingkungan Departemen Kebudayaan dan Pariwisata kesepuluh dan yang termuda di bentuk berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 015 / 0 / 1995 dan mempunyai wilayah operasional penelitian Arkeologi di seluruh Provinsi Papua dan Irian Jaya Barat. Di bandingkan dengan Balai Arkeologi lainnya, unit kerja ini belum berkiprah banyak karena Balai Arkeologi Jayapura mulai operasional pada bulan Agustus 1995.

Balai Arkeologi Jayapura sebagai lembaga penelitian di tuntut mampu untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam merencanakan, melaksanakan, membina dan mengembangkan, penelitian serta memasyarakatkan hasil penelitian dan merekomendasikan hasil penelitian untuk pelestarian dan pemanfaatannya bagi kepentingan masyarakat secara luas. Dalam pelaksanaan penelitian sebagai program kerjanya harus senantiasa di kembangkan agar dapat mencapai hasil optimal melalui peningkatan kegiatan penelitian, peningkatan kualitas peneliti dan teknisi serta peningkatan sarana dan prasarana pendukungnya.

Hal ini dapat terlaksana apabila peran dan fungsi Balai Arkeologi di tunjang dengan peningkatan sumberdaya manusia.

II. Riwayat Penelitian Arkeologi Di Papua

Penelitian Arkeologi di Irian Jaya (Papua) telah di mulai sejak tahun 1937 oleh **Roder** di sekitar **teluk Berau**, yang menemukan sejumlah lukisan cap tangan dan kaki pada gua-gua dan tebing karang sepanjang pantai antara **Desa Kokas dan Karas**, serta pulau-pulau di sekitarnya seperti **pulau Ogar dan Arguni**.

Selain itu juga melakukan ekskavasi di **gua Dudumunir** dan menemukan **Alat Serpilh Bilah**. Penelitian lain adalah **Galis** yang menyinggung tentang alat perunggu dan lukisan di sekitar **Danau Sentani**. Pada tahun 1960, **R.P. Soejono** juga menulis tentang peninggalan prasejarah di Irian Jaya (Koentrajaningrat, 1963). Pada tahun 1975, **Solheim II** yang bekerjasama dengan Pusat Penelitian Arkeologi melakukan penelitian di wilayah Irian Jaya, Namun belum menyentuh lokasi yang ada di sekitar **Danau Sentani**.

Situs yang di teliti adalah **Gua Aromban (Biak)** dengan temuan berupa fragmen gerabah hias yang di duga berumur sekitar 3000 tahun, **Pulau Mansinam (Manokwari)** dengan beberapa fragmen gerabah, serta lukisan gua di pulau **Waigeo (Tim Irian Jaya, 1975)**. Kemudian pada tahun 1979 Tim Penelitian Arkeologi Nasional melakukan penelitian kembali di Irian Jaya dan wilayah jangkauan di sekitar danau Sentani.

Penelitian di wilayah kecamatan **Dafonsoro** berhasil mendata sejumlah kapak lonjong dan manik-manik. Penelitian di **Doyo Lama** ditujukan untuk menguji situs yang mengandung data lukisan pada batu. **Situs** ini terletak di atas bukit dengan sejumlah batu yang **berserakan** dan berlukis hewan seperti kura-kura, ikan, matahari dan manusia serta kadal. Tidak jauh dari lukisan tersebut terdapat sejumlah **menhir kecil** dalam satu konteks serta jajaran batu.

III. Lokasi Penelitian Dan Jenis-Jenis Temuan

1. KOTA SORONG

- ❖ Penelitian Arkeologi Islam Kecamatan Samate, jenis temuan: Makam Islam.
- ❖ Penelitian Arkeologi Islam Kecamatan Sailolof, jenis temuan: Makam dan Masjid.
- ❖ Penelitian Prasejarah Kecamatan Makbon, jenis temuan: Fragmen Tembikar, Batu Penumbuk, Tulang, Moluska, Batuan Serpih.

2. KABUPATEN RAJA AMPAT

- ❖ Penelitian Arkeologi Islam Kecamatan Waigeo Selatan, Jenis temuan: Makam Islam, Masjid, Buku Agama, Keramik Cina dan Eropa.

3. KABUPATEN FAKFAK

- ❖ Penelitian Prasejarah Kecamatan Kokas, jenis temuan: Tengkorak Buaya, Moluska, Tengkorak Manusia, Batu Asa, Gerabah Polos, Gerabah Hias, Keramik, Kerangka Manusia, Menhir, Dolmen.
- ❖ Penelitian Arkeologi Islam Kecamatan Kokas, jenis temuan: Masjid, Kayu Bekas Masjid dan Perahu.

4. KABUPATEN KAIMANA

- ❖ Penelitian Arkeologi Islam Kecamatan Kaimana, jenis temuan: Masjid.

5. KABUPATEN BIAK NUMFOR

- ❖ Penelitian Prasejarah Kecamatan Biak Timur, jenis temuan: Lukisan Gores, Moluska, Fragmen Tulang, Lukisan Pada Dinding Bentuk Manusia.

- ❖ Penelitian Prasejarah Kecamatan Biak Barat, jenis temuan: Tulang-tulang Manusia, Fragmen Keramik.
- ❖ Penelitian Prasejarah Kecamatan Yendidori.

6. KOTA MANOKWARI

- ❖ Penelitian Prasejarah Desa Pasir Putih, jenis temuan : Moluska, Tulang Manusia, Tembikar.

7. KABUPATEN TELUK BINTUNI

- ❖ Penelitian Arkeologi Islam Kecamatan Babo, jenis temuan: Masjid, Makam, Sumur Perigi, Naskah Kuno.

8. KABUPATEN YAPEN

- ❖ Penelitian Prasejarah Kecamatan Yapen Timur, jenis temuan: Moluska, Gerabah, Fosil Kerang, Fosil Binatang.

9. KABUPATEN WAROPEN

- ❖ Penelitian Prasejarah Kecamatan Waren, jenis temuan: Moluska, Artefak Tulang Binatang.

10. KABUPATEN JAYAPURA

- ❖ Penelitian Prasejarah Kecamatan Sentani Timur, jenis temuan: Tembikar, Gerabah, Menhir dan Lukisan Batu.

11. KOTA JAYAPURA

- ❖ penelitian Prasejarah Kecamatan Muara Tami, jenis temuan: Gerabah, Sisa Flora, Tengkorak Manusia, Moluska.
- ❖ Penelitian Prasejarah Kecamatan Jayapura, jenis temuan: Tengkorak Manusia dan Moluska.

12. KABUPATEN JAYAWIJAYA

- ❖ Penelitian Prasejarah Kecamatan Kurulu, jenis temuan: Lukisan Gua, Lancipan, Mumi, Batu Cap Kaki Tiga, Kerangka Manusia.
- ❖ Penelitian Prasejarah Kecamatan Kelila, jenis temuan: Kerangka Manusia.
- ❖ Penelitian Prasejarah Kecamatan Bolakme, jenis temuan: Kerangka Manusia, Fosil Kerang.

13. KABUPATEN MERAUKE

- ❖ Penelitian Prasejarah Suku Marind Anim, jenis temuan : Jaring Bulat, Busur, Anak Panah, Alat Tangkap Rusa, Batu Kelapa, Telur Buaya.

14. KABUPATEN NABIRE

- ❖ Penelitian Prasejarah Kecamatan Napan, jenis temuan: Kerangka Manusia, Fragmen Tembikar, Cangkang Moluska.

IV. Peran Dan Fungsi Balai Arkeologi Jayapura

Tugas yang di emban Balai Jayapura adalah melaksanakan penelitian arkeologi di wilayah kerjanya dan melakukan urusan yang berkaitan dengan ketatausahaan dan kerumahtangaan.

Balai Arkeologi sebagai Unit Pelaksana Teknik (UPT) dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional mempunyai tugas pokok yaitu:

- ❖ Merencanakan dan melaksanakan penelitian dan pengembangan arkeologi di wilayah kerjanya.
- ❖ Menyebarkanluaskan hasil penelitian arkeologi

Sedangkan Fungsi Balai Arkeologi yaitu:

- ❖ Melaksanakan rencana dan program kerja tahunan Balai Penelitian Arkeologi

- ❖ Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan data yang bernilai budaya dan ilmiah yang berhubungan dengan penelitian arkeologi
- ❖ Melakukan urusan perpustakaan, dokumentasi dan pengkajian ilmiah yang berhubungan dengan penelitian Arkeologi
- ❖ Memperkenalkan dan menyebarkan hasil penelitian Arkeologi
- ❖ Melakukan bimbingan edukatif cultural kepada masyarakat tentang benda yang bernilai budaya dan ilmiah yang berhubungan dengan arkeologi
- ❖ Melakukan urusan tata usaha dan urusan sarana dari Balai Penelitian Arkeologi

Sedangkan Tugas dan Fungsi Balai Arkeologi Jayapura secara khusus adalah mengadakan penelitian arkeologi di wilayah Papua dan Irian Jaya Barat. Namun melihat luas wilayah dan letak geografis Provinsi Papua dan Irian Jaya Barat yang terletak di ujung timur negara kita maka dapat dikatakan bahwa penelitian arkeologi di wilayah ini belum dilakukan secara intensif dikarenakan faktor alam yang masih sulit ditembus atau dijangkau serta sarana transportasi dan adat istiadat yang kadang tidak mendukung. Penelitian di wilayah ini membutuhkan biaya cukup tinggi yang merupakan satu kendala yang perlu dipikirkan dan diperhatikan.

Lingkup penelitian di wilayah Papua dan Irian Jaya Barat tidak saja mencakup kajian Prasejarah, Islam, Kolonial, tetapi juga meliputi kajian-kajian yang masuk dalam konteks etno arkeologi karena Provinsi Papua dan Irian Jaya Barat mempunyai tradisi, khususnya tradisi prasejarah yang masih berlanjut sampai saat ini.

Dalam melaksanakan penelitian di wilayah Papua dan IJB harus ditunjang dengan tenaga Arkeolog dan Antropolog yang diharapkan dapat memadukan hasil penelitian etnografi dan hasil penelitian arkeologi sehingga dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap tinggalan arkeologi yang ada di

sekitarnya dan menginformasikannya kepada masyarakat tentang pentingnya tinggalan tersebut untuk dijaga dan dilestarikan.

Dalam pelaksanaan program penelitian Balai Arkeologi harus berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dalam hal ini pusat penelitian dan pengembangan Arkeologi nasional sebagai lembaga pusat. Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional dituntut untuk mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yakni dapat memotivasi, membina dan mengarahkan unit-unit pelaksana teknisnya yaitu Balai Penelitian Arkeologi yang berkedudukan di daerah. Dalam pelaksanaan program penelitian kedua institusi harus memiliki keterpaduan program sehingga tercipta komunikasi dua arah yang mana dalam menghadapi setiap permasalahan dapat dipecahkan bersama-sama.

Salah satu program terpadu yang diadakan oleh pusat dan Balar adalah penelitian yang intensif pada salah satu situs yang dianggap penting yang berada di setiap wilayah kerja Balar. Situs tersebut di tangani secara intensif dan bersama-sama yang mencakup penelitian, pengembangan, perlindungan dan pelestarian serta pemanfaatannya. Dengan demikian akan tercipta satu laporan yang lengkap tentang data kearkeologian yang ada pada situs tersebut.

Program semacam ini adalah salah satu program dalam upaya pengembangan arkeologi kewilayahan dimana setiap situs / wilayah memperoleh kesempatan untuk diteliti sesuai dengan corak dan potensi yang dimiliki. Jika kita melihat kenyataan dimana potensi kearkeologian di Papua dan IJB sangat banyak namun baru sebagian kecil saja yang digali maka program kerja sama yang terpadu antara Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional dengan Balai Arkeologi sangat diperlukan.

Keberadaan Balai Arkeologi Jayapura diharapkan dapat menjawab kekosongan data arkeologi khususnya dan data sejarah umumnya terutama data masa lampau yang berkaitan dengan perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Sebagai suatu lembaga /

institusi yang mempunyai wilayah kerja yang luas dan sarat akan tinggalan budaya masa lampau tidak mengherankan jika lembaga ini mempunyai tugas dan tanggungjawab yang berat. Luasnya wilayah dengan potensi arkeologi yang dimiliki tidak ditunjang oleh sumber daya manusia yang mendukung dalam pelaksanaan program penelitian, sehingga perlu adanya peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia sehingga kegiatan penelitian arkeologi dapat ditingkatkan dan dilakukan seoptimal mungkin agar dapat menjangkau wilayah yang belum tersentuh dengan penelitian arkeologi sebelumnya. Dengan adanya sumberdaya manusia yang memadai di harapkan institusi ini dapat lebih meningkatkan penelitian serta hasil-hasilnya. Selama ini dalam pelaksanaan penelitian Balai Arkeologi Jayapura masih mendatangkan tenaga peneliti dari luar. Dalam hal ini peneliti dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional untuk membantu dalam pelaksanaan penelitian.

Hasil-hasil penelitian Balai Arkeologi Jayapura di harapkan mampu melengkapi kekosongan informasi arkeologi di wilayah Papua dan IJB yang karena keterbatasan tidak mampu dijangkau oleh program Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional. Selebihnya penelitian yang dilakukan oleh Balai penelitian Arkeologi harus dapat secara proaktif memberikan sumbangan informasi arkeologi dan sejarah kebudayaan daerah bagi upaya Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional dalam membangun informasi kebudayaan Nasional.

Sebagai lembaga penelitian Balai Arkeologi mempunyai kedudukan dan peran yang signifikan dalam pembangunan di daerah, khususnya dalam pengelolaan sumber daya arkeologi yang ada sehingga lewat penelitian arkeologi diharapkan dapat berperan aktif dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan.***

DAFTAR PUSTAKA

- Koentjaraningrat “ Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk” Penerbit Djambatan Jakarta 1993
- N N “ Rancangan Induk Penelitian Arkeologi Nasional” Penerbit Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Jakarta
- Sutaba I Made dkk “ Manfaat Sumber Daya Arkeologi untuk memperkokoh Integrasi Bangsa” Penerbit UPADA Sastra, Denpasar 2002
- Sutaba I Made “ Pemanfaatan Sumber Daya Arkeologi” Penerbit UPADA Sastra, Denpasar 2002

Profil dan Strategi Pengembangan Balai Arkeologi Manado

Oleh: Bonny A. Tooy
Kepala Balai Arkeologi Manado

I. Pendahuluan

Balai Arkeologi Manado mulai berdiri sejak tahun 1993. Awalnya wilayah penelitian lembaga ini meliputi dua provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah. Tetapi sejak Gorontalo berkembang menjadi provinsi sendiri, maka wilayah kerja lembaga ini bertambah menjadi tiga provinsi, walaupun secara geografis luas wilayahnya tidak bertambah. Sebagai lembaga yang memiliki wilayah kerja di ujung utara kepulauan Nusantara, yang berbatasan dengan kepulauan Filipina serta berada di pinggiran Lautan Pasifik, maka Balai Arkeologi Manado menjadi tumpuan untuk dapat mengungkap proses migrasi fauna dan manusia beserta kebudayaan yang di bawanya melalui jalur utara. Lalulintas pelayaran dan persebaran agama pada masa lalu lewat jalur sutra dan jalur rempah-rempah. Dengan demikian lembaga ini memiliki tugas dengan wilayah kerja yang luas dan substansi penelitian yang cukup berat. Sementara itu sumberdaya yang dimiliki oleh lembaga ini masih kurang, sehingga perlu dikembangkan dan ditingkatkan.

Pengembangan yang perlu dilakukan meliputi pengembangan bidang organisasi dan tupoksinya, pengembangan program penelitian dan jangkauan serta metodologi penelitian, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, serta peningkatan dan penyempurnaan fasilitas kerja.

Organisasi perlu dikembangkan sebagai lembaga penelitian arkeologi yang bermanfaat untuk bidang ilmu pengetahuan, pendidikan dan pariwisata yang dapat diandalkan dan diterima oleh pemerintah daerah maupun pusat serta masyarakat. Oleh sebab itu perlu pengembangan dan perubahan dari segi nomen klatur, eselonisasi dan mekanisme kerja. Sebagai lembaga yang berkaitan dengan arkeologi atau warisan budaya masa lalu yang *single fighter* di wilayah kerjanya, maka sepatutnya dilakukan pengembangan lembaga yang lebih komprehensif mencakup unit lain. Program dan jangkauan penelitian perlu diperluas dan ditingkatkan baik objek maupun target atau hasil akhirnya, oleh sebab itu perlu peningkatan dan pengembangan metode, dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu yang terkait melalui kerjasama penelitian. Mengingat cukup besarnya tugas kerja lembaga, maka peningkatan SDM perlu dilakukan dengan perekrutan tenaga baru dan peningkatan ketrampilan serta pengetahuan. Untuk mendukung pengembangan dan peningkatan tersebut, perlu pula dilengkapi dengan peningkatan dan penyempurnaan fasilitas kerja seperti perlengkapan lapangan serta pengolahan data, terutama laboratorium sebagai sarana analisis.

II. Strategi Pengembangan

A. Pengembangan Organisasi

1. Nomen Klatur

Pengembangan organisasi patut dimulai dari segi nomenklatur. Hal ini perlu dilakukan mengingat wilayah kerja Balar yang meliputi 3 provinsi, sedangkan nama kantor saat ini hanya menggambarkan salah satu provinsi yaitu Manado sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Utara. Dengan nomenklatur yang ada saat ini, seringkali menjadi bahan pertanyaan dan keberatan bagi dua provinsi yang lain yaitu Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tengah. Kedua provinsi ini menganggap adanya intervensi kegiatan

oleh kantor penelitian dari Provinsi Sulawesi Utara. Mereka tidak menyadari atau tidak memahami bahwa Balas sebenarnya merupakan UPT Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, sebaliknya mereka menganggap instansi ini milik pemerintah daerah Sulawesi Utara. Untuk masalah nomen klatur ini, diusulkan agar memakai nama singkatan dari ketiga provinsi yaitu Suluttenggo (Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo) sehingga UPT ini bernama Balai Arkeologi Suluttenggo. Alternatif lain dapat menggunakan urutan wilayah sehingga nama kantor ini adalah: Balai Arkeologi Wilayah Suluttenggo Berkedudukan di Manado atau Balai Arkeologi Wilayah (disambung dengan angka berdasarkan urutan wilayah).

2. Eselonisasi

Mengingat wilayah dan tugas pokok serta fungsi yang diemban kantor ini, maka pengembangan eselonisasi juga perlu dilakukan. Pada masa lalu sewaktu masih ada Kanwil di daerah-daerah, kantor Balai Arkeologi dari eselonisasi masih memiliki kedudukan sama dengan instansi Departemen yang terkait di Daerah Tingkat II (Kabupaten atau Kota). Namun setelah terbentuk daerah-daerah otonom, maka Balai Arkeologi sekarang dari segi eselon berada di bawah instansi terkait tersebut. Hal ini seringkali menimbulkan preseden-preseden yang merugikan bagi kantor Balai Arkeologi. Oleh sebab itu untuk pengembangan organisasi kiranya peningkatan eselon Balai Arkeologi menjadi eselon II B kiranya layak untuk diterapkan.

3. Struktur Kelembagaan

Struktur kelembagaan perlu dikembangkan menjadi lembaga yang mencerminkan status sebagai lembaga penelitian yang dapat menciptakan profesionalisme dalam sistem kelembagaan maupun dalam sistem kerjanya. Kalau saat ini struktur kelembagaan hanya

3. Profil dan Strategi Pengembangan

menggambarkan suatu lembaga penelitian dan pengembangan dengan satu orang manager dibantu oleh kelompok peneliti dan bagian tata usaha, maka sebaiknya lembaga ini perlu dikembangkan menjadi lembaga yang dipimpin oleh seorang kepala yang dibantu oleh kelompok peneliti dan beberapa orang manager. Dengan demikian struktur kelembagaan itu akan berwujud demikian:





Unit-unit kerja yang selama ini hanya sebatas kelompok-kelompok kerja (pokja) saja dengan pimpinan dan anggota yang tidak tetap, maka dalam pengembangan ini perlu ditingkatkan menjadi bidang-bidang yang memiliki manager dan pelaksana yang tetap yang bertanggung jawab penuh atas hasil kerjanya.

4. Tupoksi

Sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang arkeologi di suatu daerah, maka pengembangan tugas pokok dan fungsi lembaga juga perlu dikembangkan. Kalau sebelumnya tugas pokok dan fungsi tersebut lebih banyak diarahkan pada segi penelitian arkeologi, maka sudah waktunya dikembangkan pula ke arah perlindungan, pemeliharaan dan pengamanan atau penyelamatan serta pemanfaatan terhadap peninggalan-peninggalan arkeologi. Dengan demikian lembaga ini dapat memberikan kontribusi yang lebih banyak dan luas kepada pemerintah baik pemerintah pusat terutama pemerintah daerah melalui pembangunan di bidang ilmu pengetahuan, pendidikan dan pariwisata berbasis arkeologi.

B. Pengembangan Penelitian

Pengembangan penelitian akan diarahkan pada strategi penelitian yang meliputi arah kebijakan, jangkauan lokasi atau daerah penelitian, jenis-jenis penelitian, metode penelitian dan kerjasama penelitian.

1. *Arah Kebijakan*

Arah kebijakan penelitian ialah untuk kepentingan akademis, ideologis dan kepentingan praktis. Kepentingan akademis artinya untuk melengkapi dan memberi informasi tentang sejarah kebudayaan, cara-cara hidup dan proses perubahan budaya manusia masa lalu dari daerah penelitian di lingkungan wilayah kerja lembaga untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Kepentingan ideologis artinya untuk mendukung upaya pemerintah di dalam meningkatkan kesadaran, kebanggaan dan jati diri bangsa bagi setiap anak bangsa agar tidak terlindas dan terombang-ambing oleh gerak globalisasi serta kemajuan sistem informasi. Adapun kepentingan praktis artinya untuk menopang program pemanfaatan sumberdaya arkeologi bagi pembangunan sektor pendidikan, ilmu pengetahuan dan pariwisata.

2. *Jangkauan Sasaran*

Jangkauan penelitian perlu dikembangkan pula untuk menjangkau seluruh daerah penelitian. Keadaan geografi wilayah penelitian umumnya bermedan berat, baik yang di daratan Pulau Sulawesi maupun yang berada di daerah kepulauan. Pembangunan di wilayah kerja penelitian masih tertinggal dari daerah lain, sehingga masih banyak situs maupun lokasi penelitian yang terpencil atau sulit untuk dijangkau. Dibutuhkan sarana transportasi khusus untuk dapat menjangkau daerah-daerah terpencil tersebut, karena setiap daerah memiliki kesempatan yang sama untuk diteliti dan dikembangkan.

3. Pengembangan Jenis Penelitian

Pengembangan jenis penelitian perlu diperhatikan guna melengkapi data yang diperlukan di dalam upaya merekonstruksi sejarah kebudayaan, cara-cara hidup dan proses budaya manusia masa lalu. Untuk kepentingan tersebut, keikutsertaan ahli diluar disiplin arkeologi perlu dilaksanakan. Ahli-ahli dari disiplin ilmu penunjang perlu selalu dilibatkan di dalam penelitian. Jenis-jenis penelitian juga perlu didiversifikasi pada jenis-jenis penelitian yang menunjang kearkeologian. Jenis penelitian laboratories yang berupa analisis artefak perlu dikembangkan dari analisis tipologis, menjadi analisis bahan dan analisis kronologis.

4. Pengembangan Metode Penelitian

Metode penelitian arkeologi perlu diperhatikan dengan dikembangkan ke arah metode yang konvensional. Selama ini metode penelitian yang dipakai masih bersifat tradisional. Pemetaan dengan menggunakan metode pemetaan geografi dan peralatan komunikasi satelit (GIS) sudah akan diterapkan di dalam setiap penelitian baik yang bersifat survai lapangan maupun yang menerapkan kegiatan ekskavasi (penggalian). Penetapan pertanggalan secara mutlak (*absolute dating*) akan dikembangkan dan dilaksanakan pada setiap kegiatan ekskavasi di setiap situs penelitian dengan mengirimkan sample arang, tulang maupun kerang ke laboratorium C14. Penggunaan peta topografi di dalam penelitian di setiap situs akan diterapkan untuk semua daerah sampai ke daerah-daerah yang terpencil untuk dapat menentukan letak lokasi yang tepat dari setiap situs tersebut. Metode penelitian dari disiplin ilmu lain yang berkaitan diupayakan untuk dapat diterapkan dan dilaksanakan di dalam setiap penelitian, dengan mengikutsertakan ahli dari masing-masing disiplin ilmu yang bersangkutan. Penelitian-penelitian dilakukan secara holistic,

tematis dan kewilayahan, melalui pendekatan kultural-geografis dengan memperhatikan manusia, kebudayaan dan lingkungannya.

5. Pengembangan Kerjasama Penelitian

Kerjasama penelitian perlu dikembangkan dengan pihak-pihak perorangan maupun instansional baik swasta maupun pemerintah, terutama pemerintah daerah dari luar ataupun dari dalam negeri. Pengembangan kerjasama ini dimaksudkan untuk dapat menunjang pengembangan program-program penelitian dan pengembangan metodologi serta untuk dapat menjangkau daerah-daerah terpencil. Selain itu kerjasama ini juga dimaksudkan untuk membantu daerah-daerah di wilayah kerja di dalam rangka pembangunan daerahnya, melalui kontribusi hasil-hasil penelitian dan pengembangan.

C. Pengembangan Sumberdaya Manusia

Untuk mendukung pengembangan organisasi dan penelitian, sumberdaya manusia juga perlu dikembangkan baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.

1. Pengembangan Kuantitas SDM

Kuantitas SDM lembaga saat ini masih sangat kurang. Tenaga peneliti baru 4 orang dan teknisi 2 orang, selebihnya adalah pimpinan dan tenaga administratif sebanyak 11 orang. Oleh sebab itu perlu dikembangkan mencapai jumlah minimal yang ideal, yaitu peneliti menjadi 10 orang, teknisi 4 orang dan pimpinan serta tenaga administratif sebanyak 20 orang.

2. Pengembangan Kualitas SDM

Demikian pula kualitas SDM lembaga ini perlu ditingkatkan. Tenaga peneliti yang memiliki jenjang pendidikan S2 perlu ditingkatkan jumlahnya, disamping perlunya peningkatan ketrampilan di berbagai jenis penelitian, seperti penelitian bawah air, penelitian etno-arkeologi, survai atau pemetaan GIS dan lain

sebagainya. Pelaksanaan penataran maupun keikut-sertaan di dalam penataran akan diprogramkan dan ditingkatkan.

D. Pengembangan Fasilitas Kerja

Untuk mendukung program pengembangan ini, maka fasilitas kerja perlu ditingkatkan dan disempurnakan, seperti penambahan ruang-ruang kerja, penyediaan ruang untuk bengkel kerja dan ruang laboratorium.

1. Penambahan Ruangan

Ruang kerja yang tersedia saat ini masih terbatas, sehingga perlu dikembangkan agar tersedia ruang kerja yang layak bagi seluruh tenaga kerja yang ada terutama tenaga peneliti. Ruang perpustakaan perlu disiapkan dengan baik agar memenuhi standar minimal sebagai ruang perpustakaan. Untuk mendukung kegiatan analisis temuan hasil penelitian, maka ruang bengkel kerja yang layak perlu diadakan. Demikian pula ruang dan perlengkapan laboratorium perlu dikembangkan guna menangani data lapangan secara mandiri.

2. Penyempurnaan Perlengkapan

Perlengkapan kerja baik perlengkapan lapangan maupun perlengkapan analisis, perlu disempurnakan dan dicukupi. Perlengkapan lapangan antarlain berupa Laptop, GPS, Kompas Suunto, altimeter, alat-alat ukur dan lain-lain perlu dilengkapi atau ditambah jumlahnya. Alat transportasi yang dapat menjangkau daerah-daerah terpencil dan bermedan berat, menjadi kebutuhan yang perlu dikembangkan.

III. Penutup

Dengan uraian tersebut dapat digambarkan bagaimana profil Kantor Balai Arkeologi Manado saat ini serta rencana

3. *Profil dan Strategi Pengembangan*

pengembangannya ke depan. Kantor yang berusia relatif muda (sekitar 13 tahun) saat ini sedang mencari jatidirinya dan pertumbuhannya ke arah kantor penelitian dalam bidang arkeologi yang berdayaguna dan berhasilguna bagi pembangunan daerah maupun pembangunan bangsa pada umumnya. Sumberdaya manusia dan fasilitas kerja yang pas-pasan diupayakan untuk dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin, sehingga apabila ada kesempatan pengembangan di masa mendatang, maka akan dicapai hasil yang lebih maksimal. Untuk itu perlu dukungan dari berbagai pihak agar segala upaya dan usaha yang dilakukan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

Untuk menghadapi masa depan yang lebih cerah, maka pengembangan diberbagai bidang perlu dilakukan. Pengembangan direncanakan meliputi empat aspek yaitu: aspek organisasi, aspek penelitian, aspek sumber daya manusia dan aspek fasilitas kerja. Masalah nama, eselon, dan tupoksi organisasi perlu ditingkatkan menyesuaikan dengan era otonomi. Selain itu kebijakan, jangkauan, metode dan kerjasama penelitian perlu pula dikembangkan. Penelitian diarahkan pada sasaran untuk kepentingan akademis, ideologis-strategis dan kepentingan praktis. Kepentingan akademis artinya untuk melengkapi dan memberi informasi tentang sejarah kebudayaan, cara-cara hidup dan proses budaya manusia masa lalu dari daerah penelitian di lingkungan wilayah kerja lembaga untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Kepentingan ideologis-strategis artinya untuk mendukung upaya pemerintah di dalam meningkatkan kesadaran, kebanggaan dan jatidiri bangsa bagi setiap anak bangsa agar tidak terlindas dan terombang-ambing oleh gerak globalisasi serta kemajuan system informasi. Adapun kepentingan praktis artinya untuk menopang program pemanfaatan sumberdaya arkeologi bagi pembangunan sektor pendidikan, ilmu pengetahuan dan pariwisata. Sekarang sudah saatnya arkeologi dikembangkan bukan hanya untuk ilmu pengetahuan saja,

melainkan juga untuk kepentingan pembangunan dan masyarakat luas pada umumnya. Oleh sebab itu kerjasama dengan berbagai kalangan, baik kalangan pemerintah daerah, kalangan akademis maupun kalangan swasta dan masyarakat luas pada umumnya perlu dikembangkan. Pengembangan pada bidang-bidang tersebut diatas perlu dibarengi dengan pengembangan sumberdaya manusia baik kualitas maupun kuantitasnya, disamping pengembangan fasilitas kerja untuk mendukung semangat serta etos kerja dari sumberdaya manusia tersebut. Mudah-mudahan strategi ini dapat diterima oleh semua pihak untuk mendukung pengembangan organisasi arkeologi terutama ditingkat daerah sebagai ujung tombak, agar dapat berdayaguna dan berhasilguna bagi pemerintah dan masyarakat secara langsung.***

Daftar Pustaka

- Asisten Deputi Urusan Arkeologi Nasional. 2004 **Rancangan Induk Penelitian Arkeologi Nasional**. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional 1999. **Metode Penelitian Arkeologi**. Departemen Pendidikan Nasional
- Santoso Soegondho 1999. *Sumber Daya Arkeologi: Manfaat, Peranan, dan Potensinya di Sulawesi Utara*. **Jejak-jejak Arkeologi No. 1 Tahun 1999**. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Arkeologi Manado
- Santoso Soegondho, 2001. *Pospek dan Strategi Balai Arkeologi Manado Menghadapi Tantangan Issue-Issue Global*. Paper pada EHPA, tahun 2001 di Yogyakarta.
- Santoso Soegondho, 2002. *A Small Prospect And Challenges Of North And Central Sulawesi Archaeology*. Paper pada **Kongres IPPA**, tahun 2002 di Taiwan.
- Santoso Soegondho, 2003. *Prospek Arkeologi Dan Pariwisata Daerah Sulawesi Utara di Era Globalisasi*. **Jejak-Jejak Arkeologi, No, 3 Tahun 2003**. Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata. Balai Arkeologi Manado.
- Tooy, Bonny A. 2004. *Sumberdaya Arkeologi Suluttenggo Potensi atau Impotensi Bagi Otonomi Daerah*. **Jejak-jejak Arkeologi No 4 Tahun 2004**. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Balai Arkeologi Manado

Tooy, Bonny A. 2005 Apresiasi Masyarakat Suluttenggo terhadap Pelestarian Warisan Budaya Bangsa. **Jejak-jejak Arkeologi No 5 Tahun 2005.** Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. Balai Arkeologi Manado.

Permasalahan dan Pemecahannya Balar-Balar di Luar Jawa

Budi Wiyana
(Balai Arkeologi Palembang)

A. Pendahuluan

Berbicara tentang pengelolaan SDM di lembaga penelitian (termasuk Balar) tidak bisa dilepaskan dari tiga komponen, yaitu peneliti, teknisi, dan tenaga administrasi. Ketiga komponen tersebut mempunyai tugas dan fungsinya masing-masing. Tidak ada salah satu komponen yang mengklaim sebagai yang paling berperan dan komponen lainnya kurang berperan. Ketiganya harus saling mendukung satu dengan lainnya, demikian juga dalam hal pembinaannya.

B. Kondisi Balar

Kondisi masing-masing Balar tidak sama, baik dari segi jumlah karyawan, kualifikasi pendidikan, pengalaman, etos kerja, dll. Terdapat perbedaan yang signifikan antar Balar-balar di Jawa-Bali dengan di luar Jawa-Bali. Dengan masa pendirian yang lebih lama dan pengalaman yang lebih banyak Balar-balar di Jawa-Bali relatif lebih mapan dibanding dengan Balar-balar di luar Jawa-Bali.

Sebagai gambaran kondisi Balar di luar Jawa-Bali diambil contoh Balar Palembang. Jumlah PNS Balar Palembang sebanyak 14 orang, terdiri dari: 8 tenaga peneliti (ber SK maupun belum), 1

tenaga teknis, dan 5 tenaga administrasi. Jumlah CPNS 2 orang, dua-duanya tenaga administrasi. Untuk mendukung kegiatan kantor, Balar Palembang juga memerlukan tenaga honorer sebanyak 4 orang dan tenaga bantu 2 orang. Jumlah seluruh karyawan Balar Palembang sebanyak 22 orang.

Untuk kondisi luar Jawa-Bali, jumlah karyawan Balar Palembang termasuk cukup. Akan tetapi jika dibanding dengan luas wilayah kerja dan beban kerja, jumlah tersebut belum memadai. Sedangkan kondisi SDM Balar-balar di Jawa-Bali lebih memadai dengan rasio yang cukup proposional.

C. Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi Balar-balar di luar Jawa-Bali adalah masih sedikitnya tenaga (terutama peneliti), belum meratanya penyebaran tenaga, terbatasnya kesempatan menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi, kurangnya pengetahuan dan ketrampilan untuk mendukung kerja, ketidakjelasan promosi dan mutasi, dll.

D. Pemecahan

Untuk memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut perlu dicarikan solusi yang komprehensif, bukan solusi yang parsial.

Pemecahan masalah jumlah tenaga (terutama peneliti) yang timpang antara Jawa-Bali dengan luar Jawa-Bali dapat ditempuh dengan penambahan tenaga melalui jalur penerimaan PNS baru. Disamping penambahan tenaga, perlu dilakukan upaya memindahkan tenaga dari Balar-balar di Jawa-Bali ke luar Jawa-Bali, baik secara sukarela maupun "pemaksaan". Hal ini sekaligus mengatasi permasalahan tidak meratanya penyebaran tenaga antar Balar. Ini merupakan upaya yang sangat sulit tetapi perlu dicoba. Peran aktif Puslitbang Arkenas sebagai pembina di tingkat pusat sangat diperlukan.

Bagi seorang peneliti, menempuh jenjang pendidikan lebih tinggi adalah kesempatan sekaligus harapan yang ditunggu-tunggu. Untuk itu perlu diupayakan agar para peneliti dapat menempuh pendidikan jenjang S2 bahkan S3 di dalam maupun luar negeri. Rupanya masih terdapat perbedaan yang nyata antara tenaga peneliti di Jawa-Bali dengan luar Jawa-Bali dalam hal jenjang pendidikan yang dimilikinya. Peneliti di Jawa-Bali lebih memiliki kemudahan melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi karena kantor Balar berada di kota dimana terdapat perguruan tinggi yang mempunyai program studi strata S2 dan S3 yang erat kaitannya dengan arkeologi (ilmu budaya). Sedangkan Balar-balar di luar Jawa-Bali sangat terbatas. Disamping itu, tawaran beasiswa S2 dan S3 lebih mudah diakses di Jawa-Bali.

Untuk mengatasi masalah tersebut, para peneliti di luar Jawa-Bali harus lebih banyak berjuang untuk mendapatkan kesempatan menempuh jenjang pendidikan S2 dan S3. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah Puslitbang Arkenas memfasilitasi pemberian beasiswa hasil kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga penelitian lain baik di dalam maupun luar negeri. Cara ini pernah dilakukan Puslitbang beberapa tahun yang lalu dan terbukti efektif serta berhasil mencetak peneliti yang handal. Seharusnya upaya ini perlu dirintis kembali oleh Puslitbang sehingga memungkinkan para peneliti di Balar-balar (terutama di luar Jawa-Bali) dapat menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Sedangkan peneliti di Jawa-Bali rata-rata lebih berpengalaman dan memiliki ketrampilan lebih dibanding dengan peneliti di luar Jawa-Bali karena faktor “jam terbang” yang lebih banyak dan kesempatan lebih terbuka. Untuk mengejar ketertinggalan, peneliti di luar Jawa-Bali perlu lebih diberi kesempatan untuk mengikuti dan menambah pengetahuan dan ketrampilan yang ada kaitannya dengan arkeologi.

Adapun penghargaan terhadap prestasi sangat penting untuk memacu semangat agar berprestasi lebih tinggi. Prinsip *reward and punishment* perlu diterapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Promosi dan mutasi bisa merupakan *reward*, tetapi mutasi bisa juga merupakan *punishment*. Setelah berdiri puluhan tahun, lembaga penelitian (seperti Puslitbang Arkenas) dituntut menerapkan prinsip *reward and punishment* dengan melakukan promosi dan mutasi secara lebih transparan.

Promosi dan mutasi adalah buah dari prestasi seseorang. Dengan prestasinya seseorang dapat dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan dengan prestasi pula seseorang dapat dimutasikan ke tempat yang lebih menantang untuk berprestasi. Demikian pula sebaliknya.

Ada kesan peneliti yang berkarya di Balar-balar luar Jawa-Bali selamanya akan tinggal di sana. Kesan ini harus dihapus dengan cara memberikan promosi dan mutasi kepada para peneliti di luar Jawa-Bali ke Jawa-Bali karena faktor prestasi, bukan karena faktor lain.

E. Penutup

Permasalahan-permasalahan yang timbul di masing-masing Balar harus diinventarisir untuk dicarikan solusi terbaik secara komprehensif. ***

Peran Strategis Penelitian Arkeologi Bagi Pengembangan Kebudayaan Dan Pariwisata

Danang Wahyu Utomo
(Balai Arkeologi Makassar)

A. Latar Belakang

Bumi Nusantara yang sarat dengan warisan budaya merupakan kekayaan yang bernilai tinggi bagi bangsa Indonesia. Peninggalan-peninggalan yang dikandungnya, yang merupakan sisa kehidupan jutaan tahun lalu hingga tradisi masa sekarang, telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari kawasan terpenting di dunia untuk pemahaman sejarah kemanusiaan dan peradaban. Bumi kita yang telah menyimpan sejarah kehidupan yang sangat tua, telah menjadikannya sebagai lahan yang memberi kontribusi besar bagi sejarah dunia.

Kekayaan dan kekunaan yang ada di Bumi Nusantara ini juga banyak ditemukan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara sebagai wilayah kerja dari Balai Arkeologi Makassar. Kedua wilayah tersebut banyak meninggalkan jejak-jejak kehidupan jaman prasejarah hingga berlanjut ke tradisi masa sekarang. Semuanya itu mencerminkan sejarah budaya manusia yang saling berinteraksi secara dinamis dan beradaptasi dengan lingkungannya sehingga memperkaya khasanah budaya bangsa.

Kondisi tersebut membuat Balai Arkeologi Makassar mempunyai kedudukan strategis sebagai lembaga yang mengemban tugas meneliti kehidupan masa lampau, tidak hanya untuk kepentingan lokal-re-

gional-nasional, tetapi juga kepentingan global. Sebagai lembaga riset di daerah yang merupakan bagian dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional, Balai Arkeologi Makassar harus mampu mengembangkan Kearkeologian Indonesia untuk kemajuan ilmu pengetahuan, di sisi lain harus pula mampu menjadi agen pencerdasan bangsa dan pengembangan kebudayaan nasional. Penelitian yang dilakukan harus dapat mengaktualisasikan kearifan-kearifan masa lampau untuk pengembangan budaya nasional dan kehidupan berbangsa.

Sebagai Unit Pelaksana Teknis, Balai Arkeologi Makassar dibentuk untuk melaksanakan penelitian dan mengembangkan arkeologi lokal-kewilayahan. Sampai saat ini, telah melaksanakan penelitian dan berbagai kegiatan terkait, merupakan program sendiri maupun bekerjasama sama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional, Pemerintah Daerah dan peneliti asing, yang bertujuan untuk memajukan arkeologi Indonesia. Penelitian sebagai kegiatan hulu telah menghasilkan berbagai data kekunaan dari periode kehidupan tertua (prasejarah) hingga periode termuda (kolonial), yang berupa situs, artefak dari berbagai jenis dan bahan, sisa fauna, sisa manusia, dan sisa ekofak lainnya yang dapat diakses seluruh masyarakat seperti ilmuwan, pelajar, atau pemerhati budaya.

Untuk kegiatan hilir, Balai Arkeologi Makassar telah menghasilkan berbagai karya ilmiah berupa jurnal dan buku-buku ilmiah sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Selain itu, berbagai kegiatan yang bertujuan memasyarakatkan hasil-hasil penelitian, seperti pameran, pertemuan ilmiah yang dilaksanakan secara berkesinambungan dengan melibatkan instansi terkait dan Pemerintah Daerah yang dimaksudkan untuk melibatkan peran serta masyarakat secara langsung.

B. Peran Strategis Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Pembangunan Nasional

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan memiliki banyak keragaman budaya yang sampai saat ini masih dapat disaksikan keunikannya. Bukan hanya itu, jejak-jejak budaya masa lampau pun masih dapat ditemukan sampai sekarang di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Ini menunjukkan kehidupan dinamis manusia penghuni kepulauan Nusantara ini, sehingga setiap daerah memiliki keunikan sejarah dan budayanya sendiri. Hal ini banyak menarik minat pemerhati dan peneliti di bidang kebudayaan untuk melakukan riset bagi pengembangan atau mengungkapkan sejarah budaya masa lalu.

Kebudayaan kita yang sangat beragam merupakan kekayaan yang tak ternilai, sehingga jika tidak kita perhatikan cepat atau lambat akan mengalami kepunahan. Kondisi seperti ini sangat tidak diinginkan, oleh karena itu perlu cara agar dapat melestarikan kebudayaan baik berupa tinggalan-tinggalan budaya masa lalu yang masih berlanjut maupun sebagai ciri suatu kelompok masyarakat merupakan identitas penting suatu bangsa yang memiliki peradaban tinggi. Mengembangkan dan melestarikan kebudayaan berarti dapat mempertahankan jati diri sebagai bangsa yang beradab.

Kebudayaan seperti dalam uraian di atas merupakan peran yang sangat strategis dalam Pembangunan Nasional. Untuk mencapai usaha tersebut diperlukan pemahaman dari berbagai pihak terutama para penentu kebijakan untuk lebih memperhatikan pelestarian dan pengembangan kebudayaan dalam kerangka Pembangunan Nasional. Bahkan berkaitan dengan kebudayaan ini telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan utama dalam pelaksanaan pelestarian dan pengembangan kebudayaan secara nasional.

Salah satu cara untuk memanfaatkan hasil-hasil kebudayaan masa lalu dalam Pembangunan Nasional adalah dengan menjadikannya sebagai objek pariwisata yang berskala nasional maupun internasional. Namun demikian, pemanfaatan tersebut hendaknya tidak mengesampingkan prinsip-prinsip pelestarian arkeologi sehingga dapat terjaga kelestariannya. Hal ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pemasukan negara atau daerah dari sektor pariwisata karena dimasa yang akan datang pemasukan tidak dapat lagi hanya mengandalkan dari sektor migas.

Menipisnya sumberdaya alam yang tidak dapat diperbarui yang saat ini sangat diandalkan untuk dapat menghasilkan pemasukan bagi negara, memberikan alternatif lain bagi pemasukan negara yaitu dari sektor pariwisata. Sebagai negara yang banyak memiliki ragam dan tinggalan budaya, Indonesia sangat diminati para pelancong baik domestik maupun luar negeri. Hal ini masih ditunjang dengan keramahan penduduknya dan keindahan alamnya menjadikan nilai tambah dalam memperkenalkan produk-produk wisata budaya. Tidak dapat kita pungkiri, bahwasannya pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan budaya dan tinggalan budaya sangat membantu dalam Pembangunan Nasional. Demikian halnya dengan sektor pariwisata yang perlu untuk lebih dikembangkan lagi, sehingga dapat memberikan pemasukan negara selain sektor migas.

C. Keadaan dan Permasalahan Kebudayaan dan Pariwisata

Keadaan pembangunan kebudayaan kita saat ini dapat dikatakan kurang mengalami perkembangan yang signifikan, yang mungkin sebagai akibat dari adanya krisis multi dimensional. Hal ini tidak terlepas dari berbagai peristiwa belakangan ini yang menyebabkan degradasi moral bangsa yang semakin menurun. Walau

demikian, di beberapa tempat kebudayaan masih merupakan unsur dominan dalam kehidupan masyarakat pendukungnya.

Bangsa Indonesia yang dulu dikenal dunia sebagai bangsa yang ramah, saat ini tampak telah kehilangan jatidirinya. Kekerasan terjadi dimana-mana yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Justru dengan pemahaman nilai-nilai luhur budaya bangsa akan dapat menseleksi mana yang baik dan buruk bagi perkembangan kepribadian bangsa. Untuk itu, pembangunan kebudayaan dalam kerangka Pembangunan Nasional perlu dilaksanakan secara sungguh-sungguh dengan memperhatikan nilai-nilai luhur budaya bangsa.

Tidak berbeda dengan kebudayaan, kondisi pariwisata kita saat ini sedang diambang kehancuran jika tidak sesegera mungkin dibenahi. Pariwisata sebagai salah satu “mesin uang” yang kita miliki sangat mungkin untuk lebih dikembangkan lagi. Modal pengembangan pariwisata telah kita miliki, seperti objek alam dan budaya, masyarakat, serta sarana dan prasarana, sehingga untuk pengembangannya lebih mudah dilakukan. Walaupun demikian, dalam pengembangan kepariwisataan secara nasional, pada beberapa daerah masih kurang mendapatkan perhatian. Banyak objek wisata menarik tidak dapat dikembangkan dengan maksimal karena masih banyak kendala yang berkaitan dengan prioritas pembangunan.

Situasi pariwisata nasional saat ini sedang mengalami kemunduran akibat merebaknya kegiatan terorisme dan masalah keamanan di berbagai tempat di Indonesia yang menyebabkan turunnya angka kunjungan wisata. Padahal jika dalam kondisi yang aman dan kondusif pariwisata di Indonesia sangat potensial menghasilkan devisa yang cukup besar bagi negara. Dengan kata lain bahwa pengembangan pariwisata nasional sangat terkait dengan masalah keamanan serta pengembangan dan pelestarian objek wisata itu sendiri.

D. Permasalahan Pokok Kebudayaan dan Pariwisata Dalam Perspektif Penelitian Arkeologi

Wilayah kerja Balai Arkeologi Makassar yang cukup luas, yaitu meliputi dua propinsi, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, sangat kaya akan tinggalan budaya masa lalu. Sebagian besar berupa situs arkeologi dengan aksesibilitas yang sangat sulit dicapai oleh masyarakat umum, dan dalam prosentase yang kecil berupa bangunan-bangunan kuna yang umumnya berada pada satu wilayah permukiman. Situs arkeologi, khususnya situs masa prasejarah sebegini besar berada di tempat-tempat yang jauh dan sulit dijangkau, yang untuk mencapainya diperlukan beberapa hari perjalanan. Kondisi yang demikian ini sangatlah menyulitkan dari segi pengawasan dan pengamanannya. Sangat disayangkan apabila terdapat situs arkeologi yang potensial untuk dikembangkan baik untuk ilmu pengetahuan maupun pariwisata budaya, karena lokasinya terpencil sehingga dibiarkan begitu saja. Dengan kondisi yang ada saat ini, tidak dapat kita pungkiri bahwasannya masih banyak situs arkeologi yang terbengkelai karena kurangnya penanganan.

Menyangkut apresiasi masyarakat terhadap tinggalan sejarah budaya di Indonesia ini dapat dikatakan masih sangat minim. Indikator tersebut terlihat dari banyaknya tinggalan arkeologi yang belum ditangani, sehingga apa yang perlu disampaikan ke masyarakat menyangkut keberadaan warisan budaya menjadi terhambat. Kondisi ini juga diperparah dengan adanya berbagai institusi pemerintah di bidang sejarah purbakala (arkeologi) yang tidak jelas masing-masing cakupan kerjanya, sehingga terkesan tumpang tindih dalam menangani warisan budaya. Sebenarnya hal ini tidak boleh terjadi jika masing-masing pihak menyadari betapa pentingnya warisan budaya bangsa. Paling tidak ada semacam sinkronisasi dan koordinasi kegiatan antar institusi dalam wilayah kerjanya masing-masing.

Disadari bahwa apa yang telah dihasilkan saat ini dari berbagai program penelitian, pelestarian, dan pemanfaatannya hanya sebagian kecil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini disebabkan adanya paradigma penelitian arkeologi yang murni mengacu pada keberadaan sebuah benda atau situs budaya sebagai objek penelitian. Sebagai ilmu yang berbasis pada ilmu budaya sangat sulit untuk membelokkan hasil penelitian agar dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat luas. Sampai saat ini hasil-hasil penelitian arkeologi hanya sebatas mengungkapkan sejarah masa lalu, sedangkan implementasi langsung untuk dapat dikatakan “bermanfaat bagi masyarakat luas” hanya sebagai wacana. Walaupun demikian kita tidak boleh menutup mata, bahwasannya hasil-hasil penelitian arkeologi juga bermanfaat bagi masyarakat meskipun secara terbatas dikalangan akademisi.

Dalam upaya pengembangan penelitian, institusi arkeologi perlu untuk merumuskan suatu konsepsi yang menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Dalam hal ini strategi penelitian yang dirancang idealnya bersifat tematis (aspek bentuk) dan mengarah pada pengembangan studi kewilayahan (aspek ruang), agar memiliki dimensi luas yang mencakup kepentingan akademis, kepentingan strategis, dan kepentingan praktis.

Penelitian tematis dan pengembangan studi kewilayahan mengacu pada upaya untuk memberikan eksplanasi tentang sejarah kebudayaan, rekonstruksi cara-cara hidup, dan proses budaya yang berlangsung dalam skala horisontal dan vertikal (kronologis). Penelitian yang berkaitan dengan studi tematis dan kewilayahan meliputi:

- a. Teknologi, yang mencakup bahan (batu, tulang, kulit kerang, gerabah, kayu, logam), kronologi (paleolitik, mesolitik, neolitik, megalitik, paleometalik, dan etnoarkeologi), dan fungsi (peralatan, senjata, perhiasan, lambang religi).

- b. Subsistensi, yang berkaitan dengan perburuan, penangkapan ikan, hortikultur, agrikultur dan perdagangan.
- c. Hunian, dalam kaitannya dengan aspek geografis (gua, tepi pantai, dan pegunungan), serta sifatnya (sementara, permanen, dan musiman).
- d. Konsepsi kepercayaan, meliputi megalitik, kubur non-megalitik, simbol dan lainnya.
- e. Pertanggalan, berupa relatif dan absolut.
- f. Lingkungan, menyangkut geografis, fauna, flora, sumberdaya alam, dan paleo-iklim.
- g. Manusia meliputi ras, bahasa, dan lain-lain.
- h. Transformasi budaya, meliputi migrasi, kontak budaya, inovasi, dan lain-lain.
- i. Seni meliputi seni lukis, seni pahat, seni gores, dan lain-lain.

Studi tematis dan kewilayahan dimulai dengan penyusunan Kerangka Dasar Penelitian (KDP) bagi setiap peneliti sebagai pedoman pelaksanaannya, selain menjadi dasar dan kendali dalam penyusunan setiap proposal penelitian yang diajukan setiap tahun. Penyusunan KDP sangat penting untuk mengarahkan setiap peneliti untuk mempunyai konsepsi yang matang tentang penelitian yang akan dilakukan dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Pelaksanaan studi tematis dan kewilayahan akan memperhatikan pengembangan wilayah melalui potensi dan corak budaya yang dimilikinya. Melalui penelitian pengembangan wilayah akan dapat memperlihatkan kekhasan sejarahnya. Pengembangan aspek tertentu dalam kaitannya dengan pengembangan atau penggalian nilai-nilai luhur, akan memunculkan situs-situs terpenting yang menjadi tolok ukur pengembangan dalam skala makro. Penggalian nilai-nilai luhur budaya daerah akan memperlihatkan puncak-puncak budaya kebanggaan dan sekaligus akan memberikan kontribusi terhadap kekayaan budaya nasional. Hasil studi tematis dan pengembangan

wilayah akan mengarahkan setiap peneliti untuk memiliki situs dasar (*nuclear zone*) dan bidang studi pengembangan jangka panjang (*peripheric zone*).

Munculnya situs-situs penting sebagai pilihan masing-masing peneliti merupakan basis (*zona nuclear*) dan tolok ukur pengembangan dalam skala makro. Situs-situs pokok tersebut diharapkan sudah teridentifikasi dan kemudian para peneliti sudah tinggal landas untuk penelitian intensif dan pengembangannya pada zona luar. Melalui penelitian sistematis dan tematis, hasil-hasil yang diperoleh diharapkan dapat memperjelas gambaran tentang:

1. Proses dan aliran migrasi nenek moyang Bangsa Indonesia dan keturunannya sampai dengan tumbuhnya puak-puak;
2. Proses persentuhan Budaya Nusantara dengan tradisi-tradisi besar (Hindu-Buddha, Islam, dan Eropa).
3. Adaptasi dan tumbuhnya budaya-budaya lokal yang diperkaya oleh masukan anasir-anasir budaya dari luar (*local genius*).
4. Proses terjadi dan berlangsungnya diversifikasi kultural.
5. Proses dan kelangsungan integrasi budaya dalam lingkup dan wawasan nasional.

Indonesia memiliki situs arkeologi yang jumlahnya sudah mencapai ribuan, disamping masih banyak lokasi-lokasi situs arkeologi yang belum ditemukan. Situs-situs arkeologi di Indonesia persebarannya merata ditemukan, hampir di seluruh wilayah dapat ditemukan jejak-jejak arkeologis. Semua situs tersebut memiliki kepentingan akademis, kepentingan strategis, kepentingan praktis, dan yang saat ini perlu diketengahkan adalah kepentingan ekonomis. Dari pokok kepentingan tersebut kita dapat menyusun stratifikasi situs berdasarkan skala prioritas kepentingan, bukan dengan skala prioritas kewilayahan.

Sebagai contoh, sebuah situs X yang dianggap potensial mendatangkan devisa negara (kepentingan ekonomis), tentunya

mendapatkan skala prioritas yang utama untuk dilakukan penelitian dan pengembangan agar dapat dijadikan objek wisata budaya. Melihat unsur kepentingan yang begitu tinggi, maka untuk menangani situs X jika memungkinkan pendanaan tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Pusat tetapi juga oleh lembaga-lembaga keuangan internasional. Sedangkan situs Y, yang dianggap hanya berpotensi untuk kepentingan akademis penanganannya cukup dilakukan oleh instansi arkeologi yang ada di daerah. Dengan demikian skala prioritas penelitian situs-situs arkeologi dapat disusun dengan baik, oleh instansi arkeologi di pusat maupun di daerah.

Berbicara mengenai penelitian tentunya harus ada pihak-pihak yang berwenang untuk memberikan izin penelitian. Penelitian arkeologi merupakan kegiatan yang tidak ada bedanya dengan penelitian-penelitian lainnya. Karena objek penelitiannya yang khusus (benda arkeologi) dan dapat dikatakan rentan secara kualitas serta terbatas secara kuantitas, maka kewenangan penelitian di bidang arkeologi secara nasional semestinya berada pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional dan instansi vertikalnya di daerah yaitu Balai Arkeologi. Dengan demikian pihak-pihak yang akan melakukan penelitian arkeologi baik dari dalam negeri maupun luar negeri sudah seharusnya mendapatkan rekomendasi dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional dan disetujui oleh LIPI. Kewenangan ini tidak terbatas pada penelitian tetapi juga pemanfaatan tinggalan arkeologi sebagai benda cagar budaya. Hal ini untuk menghindari terjadinya vandalisme terhadap situs-situs arkeologi, apalagi terhadap situs arkeologi yang sangat potensial dikembangkan sebagai objek pariwisata.

E. Masukan dan Saran

Melihat pentingnya berbagai tinggalan budaya serta mulai banyaknya benda cagar budaya yang terancam kerusakan, sebagai

akibat dari pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan, sudah seharusnya instansi arkeologi khususnya Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional berserta Balai Arkeologi semakin meningkatkan perhatian dalam bentuk penelitian arkeologi. Dengan melakukan penelitian arkeologi, akan semakin banyak situs maupun objek purbakala yang dapat didokumentasikan sebelum tergores oleh pembangunan. Selain itu, dengan melakukan penelitian arkeologi akan diperoleh data-data baru yang dapat dipakai untuk memperkaya khasanah dan wawasan tentang sejarah dan kepurbakalaan di Indonesia. Dengan demikian kita dapat mengkaji berbagai benda cagar budaya termasuk manfaatnya bagi pengembangan kebudayaan dan pariwisata secara nasional.

Kita tidak dapat memungkiri, bahwa sebenarnya benda cagar budaya juga memiliki potensi penting bagi Pembangunan Nasional. Oleh karenanya, diharapkan dengan penelitian arkeologi yang semakin intens dan berkesinambungan memunculkan keinginan bahwa tinggalan budaya yang memiliki potensi pemanfaatan wisata agar dikembangkan sebagai objek wisata purbakala. Dengan meningkatnya pemanfaatan dan pengembangan objek wisata purbakala maka akan meningkat pula dari segi perolehan secara ekonomis yang akan berimplikasi pada peningkatan kemakmuran masyarakat dan bertambahnya pendapatan negara dari sektor budaya dan pariwisata.***

Peningkatan SDM Pusat Dan Daerah Dalam Menyikapi Pengelolaan Institusi

Purusa. M, Balai Arkeologi Denpasar

I. Pendahuluan

Hari berganti hari, bulan berganti bulan tahun berganti tahun, Balai Arkeologi bersama Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Jakarta mendambakan kemajuan yang bersifat multi dimensi.

Dalam menyikapi pengelolaan institusi yang ada sekarang sangat perlu ditinjau ulang secara menyeluruh baik SDM. pusat maupun daerah. Di dalam perjalanan panjang yang telah dilalui sejak berdiri Balai Arkeologi, khususnya Balai Arkeologi Denpasar telah mengalami pasang surut, yaitu setelah banyak SDM yang berumur tua (pensiun) tetapi beberapa tahun belakangan belum mendapat pengganti bahkan sampai sekarang. Bagaimana SDM Balai-Balai yang lain? Sudah saatnya sekarang untuk berpikir lebih serius lagi mengenai SDM peneliti maupun administrasi menghadapi kemajuan di masa depan. SDM sangat menentukan dalam menyikapi pengelolaan suatu institusi seperti Balar yang sudah mencapai puluhan tahun berdiri. Di dalam perjalanan panjang yang dilalui Balar telah beberapa kali mengalami perubahan kementerian, tentu perubahan tersebut membawa konsekwensi perubahan dari rencana jangka panjang yang telah dibuat, tentang kerangka kebudayaan secara keseluruhan. Kedepan masih perlu peningkatan jumlah dan kualitas para peneliti maupun tenaga administrasi. Peningkatan

karyawan non peneliti masih diperlukan untuk mencapai suatu institusi yang lebih baik.

Pendirian Balai Arkeologi Denpasar diawali oleh Proyek Purbakala Bali tahun 1978/1979, pada tahun 1980 melalui dana proyek berhasil mendirikan gedung seperti yang di tempati sekarang ini. Berdirinya Balai Arkeologi Denpasar pada waktu itu sangat tidak memadai, tetapi berkat kemauan dan dorongan yang kuat dari pusat maka apa yang dicita-citakan berjalan sesuai dengan rencana walaupun dalam perjalanan yang tertatih-tatih. SDM yang ada berangsur-angsur ditambah sehingga sementara dianggap memadai, tetapi dibebeberapa sisi pengetahuan dan pengalamannya masih perlu ditingkatkan.

Di dalam peningkatan SDM sudah dijalankan hubungan yang baik antara Balai dari pihak Universitas Udayana terutama Jurusan Arkeologinya, keadaan seperti ini sudah dijalankan dari sejak berdirinya proyek yang tenaganya beberapa diambil dari pihak Fakultas Sastra Universitas Udayana Jurusan arkeologi. Rintisan-rintisan kerjasama semacam ini masih sangat diperlukan di dalam era peningkatan SDM para penelitinya. Sasaran yang ingin dicapai terutama pada peningkatan ilmu dalam arti luas para peneliti, peningkatan SDM tenaga teknis dan peningkatan SDM administrasi. Ketiga unsur pokok yang sangat diperlukan dalam menggerakkan roda kelancaran tugas Balai Arkeologi Denpasar, telah dimiliki, tinggal bagaimana upaya dalam peningkatan kemampuan secara keseluruhan dalam menyikapi konstitusi yang tampaknya sering mengalami perubahan-perubahan nomen klatur, tentu semuanya ini telah disesuaikan dengan kebutuhan yang telah dipikirkan jauh kedepan. Sejak berdiri Balai Arkeologi Denpasar telah mengalami pergantian empat kepemimpinan. Setiap pergantian tersebut tentu diharapkan agar Balai Arkeologi Denpasar menjadi lebih baik.

Tugas berat yang diemban Balai Arkeologi Denpasar adalah memahami ilmu yang dibidangi untuk dapat membawa misinya

ketengah-tengah masyarakat. SDM yang ada sekarang di Balai Arkeologi Denpasar harus mampu mengembangkan ilmu pengetahuan yang diharapkan menjadi pusat data ilmu yang dibidangnya. Hasil-hasil kegiatan yang telah dilakukan harus dapat diaktualisasikan kepada masyarakat luas antara lain melalui terbitan-terbitan yang bersifat berkala. Hasil-hasil kajian ilmiah/seminar nasional dan kegiatan-kegiatan arkeologi lainnya diupayakan segera dapat dikonsumsi kepada masyarakat luas untuk mengenal lebih jauhinggalan masa lampau yang kemudian diharapkan dapat dipakai sebagai sarana perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Apa yang kami kemukakan ini merupakan salah satu pertanggungjawaban Balai Arkeologi kepada masyarakat yang harus dikembalikan.

Balai Arkeologi Denpasar sampai saat ini telah memiliki tenaga peneliti sebanyak 13 (tiga belas) orang terdiri dari berbagai spesialisasi kecuali bidang islam, kolonial dan arkeologi dibawah air.

Kualitas tenaga peneliti masih perlu ditingkatkan seperti peningkatan jenjang pendidikan ke S2 dan S3. Diharapkan dana dapat dimasukkan dalam dana rutin perkantoran, sehingga hambatan yang dialami peneliti dalam meningkatkan karirnya dapat diatasi.

Untuk merintis maksud ini disamping dana yang dianggarkan melalui kantor juga sangat diperlukan, rintisan kepada pihak-pihak fakultas secara formal, terutama kepada jurusan arkeologi yang sudah memiliki program S2 dan S3. Disamping pendidikan formal bagi para peneliti dibutuhkan pula aggaran untuk menghadiri seminar-seminar nasional/regional maupun internasional. Melalui upaya ini pengetahuan para peneliti akan meningkat dan mampu membuka wawasan yang lebih luas.

Kedepan tenaga-tenaga administrasi dan tenaga teknis lainnya masih perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan kemajuan kantor. Balai Arkeologi yang sejak awal dicanangkan sebagai laboratorium arkeologi, diperlukan tenaga analis laboratorium sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk kepentingan penelitian.

Usaha-usaha peningkatan SDM bagian penggambaran sudah mulai tampak dengan adanya pelatihan bersama di Trowulan Jawa Timur. Kemampuan tenaga administrasi masih perlu ditingkatkan pengetahuannya melalui kursus-kursus yang bersifat rutin terencana secara simultan untuk dapat dievaluasi lebih jauh. Masih banyak hal-hal lain yang perlu diperhatikan kalau ingin memajukan Balai Arkeologi seperti yang diharapkan.

II. Pembahasan

Dalam menyikapi SDM Balai Arkeologi Denpasar yang ada sekarang, tampaknya dapat dikatakan telah memadai tetapi tetap harus ada peningkatan terutama pada individu para peneliti dan disisi lain tenaga administrasi yang dituntut dapat memanfaatkan sarana teknologi yang lebih maju.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. P.M 17/H.K.001/MKP.2005 tertanggal 27 Mei 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, UPT. Balai Arkeologi berada pada Badan Pengembangan Sumberdaya Kebudayaan dan Pariwisata. Berdasarkan tata kerja ini sudah sepantasnyalah Departemen Kebudayaan dan Pariwisata untuk melakukan peningkatan sumberdaya baik di pusat maupun di daerah seperti UPT.-UPT. Balai Arkeologi yang telah ada dan Pengembangan Pusat Penelitian Arkeologi Nasional Jakarta. Melalui peningkatan dan pengembangan sumberdaya ini diharapkan dapat meningkatkan daya kemampuan pada bidangnya masing-masing.

Berdasarkan pada program kerja Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional dan struktur organisasi Balai yang ada sekarang tampaknya agak sulit untuk dikembangkan. Dampak seperti ini akan membawa pada konsekwensi kinerja yang tidak maksimal. Suatu contoh tidak adanya struktur bidang-bidang yang sifatnya membantu kepala atau sub sie-sub sie yang terstruktur. Secara

keseluruhan menyebabkan keadaan yang tidak seimbang dari SDM terutama mereka yang berada di administrasi. Tenaga-tenaga yang sangat diperlukan sudah berada dijenjang kepangkatan yang lebih tinggi suatu contoh, sopir sudah berada pada jenjang Gol. III dan masih banyak lagi ketimpangan yang tampak kalau kita lihat dari jenjang kepangkatan.

Disini perlu diingatkan sudah saatnya pusat melihat secara keseluruhan keadaan Balai-Balai sehingga dapat diwujudkan keseimbangan di seluruh Kantor Balai Arkeologi yang ada. Suatu contoh kecil para peneliti untuk bisa diarahkan minatnya ke daerah-daerah timur dan penambahan tenaga administrasi bagi Balai-Balai yang memerlukan.

Kalau melihat SDM yang ada di Balai Arkeologi Denpasar, sampai saat ini belum memiliki Bank Data/data base yang terinci untuk dasar melangkah kedepan. Sulit dirasakan untuk menemukan laporan hasil penelitian, mencari photo hasil penelitian terdahulu dan kadang-kadang tidak ada. Penyimpanan data kurang baik, jika data tidak disimpan pada hardisk. Kesalahan ini terjadi bukan semata kesalahan SDM yang belum memadai, tetapi juga karena struktur organisasi Balai yang kurang menguntungkan, sehingga belum ada rasa tanggungjawab yang terstruktur di masing-masing bidang, dibandingkan dengan tugas fungsi Balai kedepan yang makin banyak dan menyeluruh. Kejadian-kejadian semacam inilah perlu pimpinan dan atasan langsung Balai Arkeologi memikirkan/merubah struktur organisasi yang ada sesuai dengan kebutuhan kedepan yang makin kompleks. Dari sejak berdiri sampai sekarang struktur Balai belum pernah berubah, walaupun telah mengalami banyak perubahan dan beban pekerjaan yang menuntut banyak pertanggungjawaban yang lebih berat. Dalam kesempatan ini ketiga unsur pokok SDM. yang ada di Balai Arkeologi akan dicoba untuk ditata dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien.

Pertama akan dibicarakan kemampuan individu para peneliti yang ada sekarang yang masih perlu ditingkatkan melalui pendidikan formal S2 dan S3 yang terprogram melalui dana kantor. Kalau situasi ini tidak disikapi segera, maka peningkatan SDM para peneliti akan berjalan tersengal-sengal tidak sesuai dengan kemajuan tuntutan ilmu yang harus dikembangkan. Disisi lain para peneliti masih kurang diikuti sertakan pada even-even seminar yang bersifat daerah jangankan yang bersifat nasional apalagi internasional. Hal semacam ini sering terjadi di daerah, kemungkinan salah satu sebabnya adalah kurangnya sosialisasi oleh pimpinan adanya para peneliti di Kantor Balai Arkeologi yang membidangi masing-masing aspek ilmu yang ada. Kantor Balai kalau diundang hanya pimpinannya saja, disini mungkin ada anggapan seorang pimpinan menguasai semua ilmu arkeologi yang ada. Keadaan seperti ini perlu segera diluruskan dalam rangka pembinaan di kedua belah pihak kedepan, sehingga benar-benar Kantor Balai Arkeologi tersebut merupakan kumpulan orang-orang yang memikirkan ilmu Arkeologi secara keseluruhan. Rintisan formal melalui kerjasama Fakultas Sastra yang mempunyai Jurusan Arkeologi perlu dibangkitkan kembali kerjasama I.A.A.I melalui tim asistensi Kabdinya melalui tokoh-tokoh senior I.A.A.I yang dapat dipakai sebagai pendorong untuk mencapai jenjang yang lebih tinggi yang dimaksud. Sampai saat ini termelihat SDM pusat dan daerah masih minim yang memiliki jenjang lebih dari S1 yaitu S2 dan S3.

Pokok bahasan yang kedua yaitu mengenai penumpukan tenaga administrasi pada Balai-Balai Arkeologi yang sudah berlangsung lama seperti di Denpasar dan Yogyakarta. Di sini tampak ada hal yang kurang seimbang diantara Balai-Balai yang ada, terobosan dan langkah apa yang akan ditempuh pusat dalam menyikapi ketimpangan ini. Di Balai Arkeologi Denpasar belum memiliki tenaga analisis laboratorium, tenaga geologi dan sebagainya. Tenaga-tenaga administrasi umum yang menumpuk dapat pula dimanfaatkan

untuk itu melalui kursus-kursus khusus sehingga bidang ini dapat berjalan sesuai dengan harapan. Masih banyak hal yang perlu ditata di dalam pengembangan SDM administrasi untuk mencapai keharmonisan tata kerja Balai Arkeologi secara keseluruhan. Tenaga administrasi murni diharapkan dapat ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan penjenjangan seperti administrasi dan sebagainya. Pendayagunaan SDM secara keseluruhan diharapkan dapat dicapai melalui pendanaan yang rutin sehingga dapat diperkirakan kapan rencana pengisian tenaga tersebut dapat dicapai. Perencanaan peningkatan SDM secara rutin akan membawa Balai menuju kepada pemanfaatan SDM tepat guna dan berhasil guna. Dari sini pula dapat dilihat tolok ukur dalam mencapai maksud dan tujuan pendirian suatu Kantor Balai Arkeologi.

Pokok bahasan ketiga yaitu perbaikan struktur organisasi Balai yang sederhana menjadi struktur yang disesuaikan dengan kebutuhan menyeluruh Balai Arkeologi. Struktur yang ada sekarang ini sudah tidak sesuai lagi dengan kemajuan dan kebutuhan yang makin banyak. Struktur yang ada sekarang ini akan membawa konsekuensi kurangnya kerja maksimal dari satu bidang garapan dan situasi ini akan membawa dampak kurangnya tanggungjawab antar bagian-bagian yang sebenarnya sangat dibutuhkan. Suatu contoh kecil bagian dokumentasi diharapkan dapat menyimpan dan mencatat semua hasil penelitian, sehingga apabila diperlukan dengan cepat dapat dicari. Keadaan sekarang ini sangat perlu diperbaiki. Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah dipenuhinya sarana dan prasarana alat-alat penelitian, sebagai contoh alat potret dan alat lapangan yang sudah rusak dan sebagainya. Dari struktur yang ada sekarang ini dapat kami kemukakan masalah SDM umum banyak tetapi yang diperlukan adalah SDM yang terlatih khusus pada bidang yang diperlukan amat kurang. Di dalam buku panduan pusat tampaknya sudah dipikirkan standar ideal pendirian sebuah Balai. Keadaan sekarang kalau dilihat dari sisi fasilitas cukup membanggakan di

seluruh Indonesia telah berdiri 10 (sepuluh) buah. Di balik semua ini menurut pandangan kami secara awam sangat memprihatinkan. Masih ada Balai yang tidak memiliki tenaga peneliti yang tetap. Di beberapa tempat pimpinan Balai diserahkan kepada Pemda dan masih ada juga Balai yang dipimpin oleh bukan seorang arkeolog. Apakah akan dibiarkan keadaan berlarut-larut seperti ini. Pendirian suatu institusi menuntut kelangsungan hidup Balai yang layak ini tidak terlepas dari tanggungjawab pusat sebagai suatu badan perancang dan pembinaan.

Demikianlah sekelumit kecil yang dapat kami ketengahkan sebagai suatu pengalaman kerja yang sudah sepantasnya mendapat perhatian pusat untuk mencapai kerja yang maksimal dan berhasil guna.

III. Kesimpulan

Perjalanan jauh yang telah ditempuh Balai Arkeologi Denpasar, mendorong penulis berbagi pengalaman dan keinginan untuk maju kedepan mencapai kerja maksimal, sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan ilmu pengetahuan yang setiap saat mengalami perubahan seiring dengan temuan-temuan arkeologi yang baru.

Di dalam menyikapi keadaan seperti ini tentu sangat dibutuhkan kerja keras dan perbaikan-perbaikan disegala bidang secara menyeluruh. Dibatasi secara tegas persyaratan sebuah kantor balai yang dianggap layak untuk barjangan, balai-balai belum memiliki SDM yang memenuhi persyaratan minimal. Keadaan semacam ini akan sulit untuk terciptanya lembaga yang profesional mampu melaksanakan tugas fungsi pokok Balai. Secara keseluruhan jumlah SDM yang ada sekarang di masing-masing daerah dianggap dapat melaksanakan tugas walaupun belum mencapai apa yang menjadi harapan dari berdirinya UPT yang ada di daerah. Penanganan penelitian sudah berjalan walaupun masih ada banyak kekurangan

yang dituntut kepada balai agar mempunyai kemampuan membawakan *misinya* ditengah-tengah masyarakat terutama pada daerah *garapannya*. Disisi lain balai di tuntut mampu mengembangkan ilmu arkeologi untuk kepentingan ilmu pengetahuan yang lebih luas dan dapat sebagai pusat pencerdasan bangsa dan pengembangan budaya nasional. Masih ada tugas lain yang tidak kurang pentingnya yaitu Balai Arkeologi dituntut untuk mampu mengembangkan penelitian dan mengaktualisasikan kehidupan masa lampau melalui hasil-hasil penelitiannya. Hasil akhir yang dicapai disetiap situs yang berupa karya-karya ilmiah diharapkan dapat di masyarakatkan sebagai wujud pertanggungjawabannya kepada masyarakat. Beban tugas yang begitu berat yang dibebankan kepada Balai Arkeologi sangat memerlukan pemikiran-pemikiran kedepan yang lebih konkrit dan menyeluruh. Wujud semua ini tidak terlepas dari usaha untuk meningkatkan SDM yang ada, dan menambah SDM yang sifatnya khusus seperti yang kami sebutkan di atas.

Dari tiga pokok bahasan yang kami kemukakan di atas kami dari Balai Arkeologi Denpasar mencoba ikut *berurun rembug* berbagi pengalaman kedepan untuk sebagai bahan masukan yang mungkin berguna untuk suatu bahasan. Ketiga bahasan pokok yang kami kemukakan di atas antara lain; Peningkatan kemampuan SDM individu para peneliti melalui pendidikan formal S2 dan S3, menghidupkan usaha semacam (Kabdi) IAAI untuk menuju maksud-maksud tersebut. Lebih idial lagi pengikut serta para peneliti dalam seminar regional atau nasional dan luar negeri secara teratur, hal ini kami kemukakan untuk memberi pembelajaran dan menambah wawasan para peneliti lebih luas. Semua perencanaan ini kami usulkan dibuat dengan anggaran daerah maupun pusat sehingga dapat dibuat evaluasi keberhasilannya atautkah dihari mendatang kalau dianggap kurang efisien sehingga diperlukan cara-cara lain dalam menanggulangi peningkatan SDM ini. Pokok

bahasan kedua adalah peningkatan kemampuan SDM yang menangani administrasi baik itu tenaga administrasi keuangan, kepegawaian dan sebagai berikut diharapkan disiapkan dana yang terencana untuk maksud-maksud mengikuti kursus-kursus atau pembekalan-pembekalan khusus baik pusat maupun daerah. Dengan demikian setiap individu tahu dan dapat bekerja maksimal dengan harapan menghasilkan yang maksimal pula. Disini sangat diperlukan sistem pembelajaran untuk mendapatkan pendidikan penjenjangan seperti adum, spama, dan sebagainya. Pokok bahasan ketiga yaitu perbaikan struktur organisasi balai yang sangat sederhana dibandingkan dengan kebutuhan balai yang makin berat, penulis pandang perlu untuk diusulkan perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan yang ada. Struktur yang ada sekarang ini sangat tidak menguntungkan Balar, disatu sisi penunjukkan SDM yang mempunyai jenjang kepangkatan tinggi seperti Gol III, tidak mendapatkan posisi yang semestinya, keadaan semacam ini memberi dampak kurangnya tanggung jawab di berbagai bidang masing-masing bagian. Ketiga bahasan yang kami ketengahkan ini mungkin hanya menyangkut hal-hal prinsip dalam garis besarnya saja, masih banyak hal-hal lain yang ikut menentukan tata kerja balai yang belum secara rinci dibentangkan satu persatu.

Mudah-mudahan apa yang kami ketengahkan ini dapat dipakai sebagai suatu pertimbangan untuk melangkah kedepan dalam menuju kinerja Balar secara maksimal. Kemajuan ilmu, kebutuhan balai menuntut kinerja Balar yang lebih dari yang ada sekarang. Pemanfaatan teknologi juga ikut menentukan kesempurnaan kinerja Balai dan diakhiri kata semoga urun rembug ini bermanfaat dalam menuju kinerja yang lebih baik.

Daftar Pustaka

1. Rancangan Induk Pusat Penelitian Arkeologi, Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata, Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Budaya Pusat Penelitian Arkeologi Jakarta, 2003
2. Organisasi dan Tata Kerja Balai Arkeologi SK. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0290/0/1992
3. Rincian Tugas Ka. Subbag Tata Usaha dan Staf Balai Arkeologi Denpasar : Balai Arkeologi Denpasar, Jl. Raya Sesetan 80 Telp. 224703 Fax (0361) 228661 Tahun 2002
4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. P.M. 17/H.K.001/MKP. Tahun 2005 Tanggal 27 Mei 2005 : Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, UPT.

Aspek Pengembangan Dalam Arkeologi:

“Sebuah Tinjauan Tugas Pokok Dan Fungsi
Balai Arkeologi Banjarmasin”

Oleh: H. Gunadi Kasnowihardjo, MHum.
(BALAI ARKEOLOGI BANJARMASIN)

Pendahuluan

Sejak diberlakukannya nomenklatur Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional tahun 2005 yang lalu, maka para peneliti Arkeologi di Indonesia harus memutar haluan dan arah penelitian untuk menuju pada sasaran lain yang harus diraihinya bersama-sama dengan sasaran yang sudah menjadi tujuan utamanya. Seperti telah diingatkan oleh Prof. Edi Sedyawati dalam EHPA tahun 2000 di Bedugul, Bali maupun PIA tahun 2005 di Jogjakarta bahwa lembaga kita ini adalah satu-satunya lembaga penelitian Arkeologi di Indonesia yang bertanggung jawab atas hasil-hasil penelitiannya serta harus dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan para peneliti arkeologi di belahan dunia manapun.

Secara eksplisit nomenklatur Balai Arkeologi masih belum jelas dan tidak bermakna sama sekali, akan tetapi secara implisit tugas-tugas Balai Arkeologi harus sudah menyesuaikan dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional, yaitu memperhatikan program kegiatan yang bersifat pengembangan. Oleh karena nomenklatur maupun tupoksinya yang tidak jelas tersebut, maka dampaknya pun para peneliti Arkeologi di Balai Arkeologi

Banjarmasin sepertinya belum memahami kemana arah dan tujuan “pengembangan” tersebut.

Selain sosialisasi tugas pokok dan fungsi lembaga yang baru, perlu diperhatikan pula perubahan nomenklatur untuk Balai Arkeologi serta penyempurnaan tupoksi yang jelas. Sehingga organisasi atau lembaga ini akan dapat disusun dan disiapkan sesuai dengan keperluan baik sumberdaya manusia maupun perangkat lain yang diperlukan. Selain dari pada itu standardisasi kemampuan peneliti Arkeologi di Indonesia harus jelas dengan dibuktikan oleh pengalaman dan pendidikan tertentu. *Who is a real archaeologist?* Pertanyaan ini sengaja saya lemparkan agar tidak terjadi pikiran-pikiran negatif diantara para peneliti Arkeologi seperti pernah saya alami yaitu diantara kita masih meragukan kapasitas saya sebagai peneliti Arkeologi. Untuk itu apa yang pernah digagas dan dilakukan oleh para pendahulu seperti Indonesian Field School of Archaeology (IFSA) perlu dibentuk kembali, ataupun pelatihan-pelatihan lain yang berjenjang dalam meningkatkan kualitas peneliti Arkeologi Indonesia.

Mudah-mudahan apa yang saya uraikan ini hanyalah satu persepsi dari kepicikan saya dalam mengevaluasi kinerja Balai Arkeologi Banjarmasin selama 4 (empat) tahun terakhir ini. Pertanyaan saya selanjutnya adalah bagaimana dengan kinerja dan kualitas para peneliti Arkeologi di Balai Arkeologi lain serta di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi sendiri? Pertanyaan kedua bagaimana kualitas Balai Arkeologi yang selama ini dipimpin oleh seorang yang bukan arkeolog, terlebih lagi ada lembaga penelitian Arkeologi yang sampai saat ini belum memiliki tenaga arkeolog. Selain menentukan standarisasi tenaga fungsional, perlu dipikirkan pula standarisasi tenaga struktural maupun tenaga teknis, hal inilah yang harus kita perjuangkan demi kemajuan lembaga penelitian Arkeologi di Indonesia. Dalam forum EHPA

inilah kita harus dapat tukar informasi dan sharing dalam upaya memajukan lembaga kita ini, maukah anda?

Aspek Pengembangan Dalam Arkeologi

Kata “pengembangan” dalam kaitannya dengan nomenklatur di atas, haruslah dapat dipahami dan dijabarkan dalam persepsi yang sama di antara para peneliti Arkeologi di lingkungan lembaga penelitian Arkeologi Indonesia. Kedua, harus bisa bahwa pada sektor lain dalam sistem manajemen sumberdaya Arkeologi di Indonesia seperti sektor pelestarian dan pemanfaatan juga melakukan kegiatan yang bersifat pengembangan. Oleh karena itu kita harus dapat memilah dan memilih kegiatan “pengembangan” yang bagaimana yang seharusnya kita lakukan? Pertanyaan ini bagi saya pribadi tidak mudah untuk dicarikan jawabannya.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata *pengembangan* berarti suatu proses, perbuatan atau cara mengembangkan sesuatu obyek. Dengan demikian, dalam kaitannya dengan kegiatan penelitian Arkeologi, kegiatan pengembangan ini merupakan suatu kegiatan tahap kedua pasca penelitian agar suatu situs atau obyek Arkeologi tersebut dapat lebih bermanfaat baik bagi ilmu pengetahuan (akademis), maupun bagi masyarakat secara luas (praktis). Oleh karena itu para peneliti dituntut untuk dapat melakukan kegiatan pengembangan terutama pada situs-situs Arkeologi yang pernah dilakukan penelitian yang berulang kali. Seperti penelitian di Benteng Tabanio, Kabupaten Tanah Laut yang sudah 4-5 kali, situs Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kertanegara, situs-situs gua prasejarah di Kutai Timur, maupun situs-situs etnoarkeologi (penelitian pada etnis Dayak), sudah saatnya dilakukan kegiatan pengembangannya.

Atas dasar pemahaman kami yang masih kurang akan penelitian arkeologi (maklum saya dibesarkan di lingkungan lembaga pelestarian), sebelum ada nomenklatur baru, di Balai Arkeologi

Banjarmasin sudah melakukan langkah-langkah yang mengacu pada kegiatan pengembangan. Bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, pada tahun 2005 di seminar sehari tentang rencana revitalisasi situs Candi Agung dengan mengundang pembicara dari Direktorat Purbakala dan Departemen Pekerjaan Umum Pusat. Hasilnya mulai tahun 2006 situs tersebut mulai direvitalisasi dengan dana dari pemerintah pusat, propinsi, dan kabupaten setempat.

Pada suatu seminar yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Kalimantan Selatan tahun 2005 yang lalu penulis mempresentasikan makalah berjudul "Budaya Banjar Dalam Perspektif Arkeologi: Satu Studi Kasus Melacak Sisa-Sisa Kerajaan Banjar". Makalah ini secara jujur disampaikan kepada forum sekaligus suatu provokasi yang dapat membangun image masyarakat dan pemerintah Kalimantan Selatan tentang adanya istana atau kraton Kerajaan Banjar. Provokasi ini ternyata berhasil, awal bulan Agustus 2006 penulis dipanggil Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Propinsi Kalimantan Selatan untuk membicarakan tentang studi atau kajian tentang istana atau kraton Kerajaan Banjar seperti yang pernah dilontarkan dalam seminar tersebut. Hasilnya melalui Balar disertai sejumlah dana untuk mengerjakan kajian yang dimaksud. Bersama rekan dari Teknik Arsitektur Universitas Lambungmangkurat, penulis mulai bekerja untuk mewujudkan harapan masyarakat Banjar untuk membangun kraton kerajaan Banjar. Pada bulan April 2006 yang lalu penulis diminta oleh Pemerintah Kota Tarakan untuk melakukan kajian khusus tentang rencana pengembangan kawasan bersejarah dan pendirian museum kota. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari salah satu rekomendasi yang pernah disampaikan kepada Pemerintah Kota Tarakan dalam Laporan Hasil Penelitian Arkeologi-Sejarah Kota Tarakan tahun 2003 yang biaya penelitiannya pun disediakan oleh Pemerintah Kota Tarakan. Untuk memenuhi permintaan di atas,

maka penulis mengajak Dr. Endang Sri Hardiyati dan Drs. Yunus Arbi, MA untuk melakukan kajian-kajian dan studi sesuai permintaan tersebut.

Kegiatan seperti di atas merupakan salah satu contoh kegiatan pengembangan dari hasil suatu penelitian Arkeologi. Satu hal yang perlu dicatat dan diingat bahwa kegiatan pengembangan tidak dapat digeneralisir ataupun dibakukan lebih-lebih diseragamkan. Karena masing-masing situs pasti akan mempunyai karakter dan lingkungan yang berbeda satu dengan yang lain termasuk masyarakat pendukungnya. Oleh karena itu dalam mewujudkan “program kerja pengembangan” ini betul-betul dibutuhkan kejelian dan kepekaan manajerial dari seorang peneliti Arkeologi. Seperti telah disinggung di atas, jangan sampai terjebak dengan kegiatan pengembangan sektor lain. Pada sektor pelestarianpun adapula kegiatan pengembangan yang dikenal dengan istilah studi teknis dan studi kelayakan. Dalam makalah berjudul “Lembaga Penelitian Arkeologi Indonesia dan Obsesi Pengembangannya” yang penulis bacakan pada forum EHPA tahun 2003 yang lalu, antara lain mengingatkan bahwa sektor penelitian harus dapat berperan dan menempatkan diri sebagai *leading sector* dalam sistem pengelolaan sumberdaya Arkeologi di Indonesia.

Output, Outcome, Dan Benefit Dari Penelitian Arkeologi

Secara nasional pemerintah telah menetapkan suatu langkah operasional lembaga-lembaga pemerintahan ini dengan standar “Program Kerja Berbasis Kinerja”. Sehingga suatu program kerja dari suatu lembaga harus dapat mewujudkan hasil-hasil yang jelas akan output, outcome, dan benefitnya. Demikian pula dengan lembaga penelitian Arkeologi, selain laporan penelitian Arkeologi (LPA) ataupun yang “ditulis ulang” menjadi Berita Penelitian Arkeologi

(BPA) yang merupakan output dari suatu program kerja penelitian Arkeologi, sudahkah dapat outcome dan benefitnya? Kalau toh sudah dipertimbangkan akan terwujud outcome dan benefit tersebut, dapatkah diprediksi kapan akan terwujud dan dalam waktu berapa lama? Sebab akan sia-sia apabila outcome dan benefit tersebut terwujud dalam kurun waktu yang lama setelah penelitian dilakukan.

Output adalah keluaran dari suatu program kerja, untuk program kerja penelitian misalnya, output yang dimaksud adalah laporan hasil penelitian yang disusun oleh tim yang melakukan penelitian. Output tersebut selama ini hanya terbatas untuk memenuhi kewajiban akademis dan administratif. Di Balai Arkeologi Banjarmasin ada kesepakatan bahwa LPA ditulis dan diserahkan kepada koordinator peneliti selambat-lambatnya 3 bulan setelah kegiatan penelitian di lapangan. Jangka waktu tersebut sudah sangat longgar, seharusnya lebih cepat lebih baik karena ada pihak-pihak lain yang ingin segera mengetahui hasil penelitian tersebut. Apabila output ini dapat segera diwujudkan, maka akan memperlancar mekanisme dalam sistem manajemen sumberdaya Arkeologi. Oleh karena itu perlu dipikirkan jangka waktu penulisan LPA supaya dapat diperpendek lagi. Kenyataan di Balar Banjarmasin ada program penelitian tahun 2001-2002 an yang hingga kini belum ada LPA nya bagaimana dapat mewujudkan outcomenya?

Outcome yaitu sesuatu hasil, dalam kaitannya dengan kegiatan penelitian Arkeologi ini yang dimaksud outcomenya adalah sejauh mana pihak - pihak lain akan dapat memahami dan memanfaatkan setelah membaca atau mengetahui dari LPA atau outputnya. Oleh karena itu output yang berupa LPA tersebut harus dapat secepatnya disusun dan disebarluaskan kepada pihak-pihak lain. Seperti dicontohkan dari hasil penelitian tentang situs kerajaan Banjar, output yang sampai pada pihak-pihak yang terkait akhirnya dapat dipahami dan hasilnya (outcome) muncul suatu kebijakan dari Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan memberikan anggaran

untuk melakukan kegiatan kajian lebih jauh tentang kemungkinan membangun kembali kraton kerajaan Banjar.

Benefit, yaitu suatu manfaat atau keuntungan apa yang akan didapat. Dalam kaitannya dengan program kerja penelitian Arkeologi seperti contoh di atas, maka benefitnya adalah masyarakat Banjar khususnya dan Kalimantan Selatan pada umumnya akan bangga apabila istana atau kraton Kerajaan Banjar dapat dibangun kembali, sehingga akan membangun jati diri bangsa, karena keberadaan kraton tersebut akan dapat mengangkat kembali kejayaan Banjar. Selain itu keuntungan dan manfaat lainnya adalah akan menambah daya tarik wisatawan untuk datang ke Banua Banjar.

Penutup

Definisi “pengembangan” pada nomenklatur Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional harus dirumuskan secara eksplisit, sehingga dapat dipahami dan disepakati oleh para peneliti maupun non peneliti di lingkungan lembaga penelitian Arkeologi Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi lembaga, Balai Arkeologi Banjarmasin sekalipun nomenklaturnya “tidak jelas” sejak tahun 2004 sudah mengarahkan sebagian program kerja kepada kegiatan yang bersifat pengembangan. Bahkan Balar telah bekerja sama dengan lembaga lain terutama Pemerintah Propinsi dan Kabupaten dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan situs Arkeologi dengan dana yang disediakan oleh pihak kedua. Oleh karena dana kegiatan berasal dari pemerintah setempat, maka usahakan untuk bekerja secara professional dengan berkolaborasi dengan pihak-pihak lain yang terkait langsung pada bidangnya, seperti sejarawan, museolog, arsitek maupun profesi lainnya.

Bagaimana dengan “bidang kepakaran” yang kita banggakan sebagai peneliti Arkeologi, sudah memenuhi kebutuhan

tugas pokok dan fungsi lembaga dengan nomenklatur yang baru? Pemilihan bidang kepakaran tidak harus dijalani secara “kaku dan eksklusif” sehingga seolah-olah sia-sia (*muspro*) untuk mempelajari bidang lain yang bukan kepakarannya, karena hal ini akan menghambat kegiatan yang bersifat pengembangan yang juga merupakan tugas pokok dan fungsi lembaga penelitian Arkeologi.

Inilah sekelumit pemikiran yang dapat saya sumbangkan dalam forum Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi (EHPA) tahun 2006 ini. Saya berharap dalam kesempatan EHPA yang akan datang kita benar-benar dapat mengevaluasi hasil-hasil kerja dan kinerja kita, baik pada program kerja penelitian maupun kegiatan pengembangan dari masing-masing lembaga maupun para peneliti sendiri. ***

Daftar Pustaka

- Gunadi, 2003. "Lembaga Penelitian Arkeologi Indonesia dan Obsesi Pengembangannya", dipresentasikan pada EHPA Tahun 2003, belum diterbitkan.
- Gunadi, Dkk. 2003. "Laporan Hasil Penelitian Sejarah-Arkeologi Kota Tarakan", Kerjasama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tarakan dan Balai Arkeologi Banjarmasin, (belum diterbitkan).
- Gunadi, 2004. "Melacak Sisa-Sisa Kerajaan Banjar", *Laporan Penelitian Arkeologi*, Balai Arkeologi Banjarmasin, belum diterbitkan.
- Kasnowihardjo, Gunadi, 2001. *Manajemen Sumberdaya Arkeologi*, Makassar: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin.
- Kasnowihardjo, Gunadi, 2004. *Manajemen Sumberdaya Arkeologi 2*, diterbitkan oleh Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia Komisariat Daerah Kalimantan.
- Malcolm A. Cooper, Anthony Firth, John Carman, David Wheatley, 1995. *Managing Archaeology*, Routledge, 11 New Fetter Lane, London EC4AP 4EE.
- Vitelli, Karen D. 1996. *Archaeological Ethics*, Alta Mira Press, A Division of Sage Publication Inc. United State of America.

Balai Arkeologi Ambon (Profil Dan Tantangannya)

Drs. I Wayan Suantika

I. Pendahuluan

Balai arkeologi Ambon yang diresmikan pada tahun 1995, adalah salah satu dari 10 (sepuluh) Balai arkeologi yang ada diseluruh Indonesia. Kantor yang berkedudukan di kota Ambon ini, memiliki wilayah kerja yang meliputi dua wilayah yaitu Provinsi Maluku dan Maluku Utara. Secara Kelembagaan Balai Arkeologi Ambon adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional; dibawah Badan Pengembangan Sumberdaya Kebudayaan; Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.

Dipilihnya kota Ambon sebagai tempat kedudukan Balai Arkeologi dirasa sudah sangat tepat karena:

1. Kota Ambon adalah kota Provinsi dan memiliki kondisi yang cukup memadai dilihat dari sudut pemenuhan/pengadaan sarana prasarana penelitian arkeologi.
2. Dari kota ini jarak tempuh kepulau-pulau di wilayah Maluku dan Maluku utara mudah didapat karena dilihat dari aspek geografi Pulau Ambon ada pada bagian tengah dari wilayah Kepulauan Maluku.
3. Secara budaya juga sangat tepat, karena wilayah kepulauan Maluku sangat kaya dengan tinggalan budaya yang berasal dari masa prasejarah, (Heekeren, 1958; Soejono, 1972). Hunian manusia dalam gua (Kosasih, 1983). Kehidupan prasejarah Di

Kepulauan Kei (Heekeren, 1972; Soejono, 1984) Selain itu juga telah ditemukan beberapa buah Nekara perunggu yaitu di pulau Leti 3 buah; di Luang 1 buah; di pulau Tanimbar 1 buah dan di pulau Kei 3 buah (Niko & Toos, 1995). Peninggalan Klasik di Kepulauan Kei (Sahusilawane, 1996a;1996b), Peninggalan Hindu di Ternate (Suantika, 2006); Peninggalan Islam di Ternate, Tidore, Bacan (Ambariy, 1994, 1995) dan peninggalan masa Kolonial (Nendissa, 1996; Manuputy, 1996).

Visi dan misi Balai Arkeologi Ambon adalah: *Terwujudnya Lembaga Penelitian arkeologi yang mampu melaksanakan penelitian, pengembangan dan pemasyarakatan arkeologi diwilayah Maluku.* Dengan misi merencanakan dan melaksanakan penelitian arkeologi diseluruh wilayah Maluku dan Maluku Utara. Hal ini tentu saja tidak dapat dilepaskan dari visi dan misi organisasi induknya yaitu Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional, yaitu Terwujudnya Lembaga Penelitian yang mampu mengembangkan dan memasyarakatkan arkeologi untuk kemajuan ilmu pengetahuan, pencerdasan bangsa dan pengembangan budaya Nasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka telah ditetapkan tugas pokok dan fungsi Balai Arkeologi adalah:

1. Merencanakan dan mengadakan penelitian arkeologi diwilayah kerjanya (Maluku dan Maluku Utara).
2. Melakukan pengumpulan, perawatan, pengawetan dan penyajian benda bernilai budaya dan ilmiah yang berhubungan dengan penelitian arkeologi.
3. Melaksanakan urusan perpustakaan, pendokumentasian dan pengkajian ilmiah yang berhubungan dengan arkeologi.
4. Memperkenalkan dan menyebarluaskan hasil-hasil penelitian arkeologi.

5. Melakukan bimbingan edukatif cultural kepada masyarakat tentang benda arkeologi yang bernilai budaya dan ilmiah.
6. Melaksanakan urusan rumah tangga Balai Arkeologi.

Dari uraian tugas pokok dan fungsi tersebut, dapat dibayangkan betapa beratnya tugas yang harus diemban oleh lembaga ini, karena:

- ± Penelitian arkeologi yang dilaksanakan harus memiliki wawasan pelestarian, karena benda-benda hasil penelitian harus mendapatkan tindakan preservasi dan konservasi, serta harus pula mendapatkan pengkajian secara ilmiah sehingga dapat diungkapkan nilai-nilai budaya yang terkandung didalamnya. Sehingga dituntut adanya sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan penguasaan metode, teori dan teknik penelitian yang memadai.
- ± Sebuah penelitian arkeologi harus pula menghasilkan sebuah publikasi/penerbitan buku (dokumen ilmiah) sebagai sebuah pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan moral ilmiah.
- ± Mengadakan berbagai kegiatan yang bertalian dengan usaha-usaha memasyarakatkan arti dan manfaat hasil-hasil penelitian arkeologi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat (publik) serta sebagai bentuk pendidikan budaya kepada masyarakat

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kegiatan Penelitian Arkeologi menjadi jiwa dan dasar dari seluruh kegiatan sebuah Balai Arkeologi. Untuk mewujudkan visi dan misinya, maka ada beberapa hal perlu mendapatkan perhatian serius yaitu:

1. Lembaga ini dituntut memiliki sumberdaya manusia (Arkeolog) yang memiliki kemampuan dalam bidang teori, metode dan teknik-teknik penelitian arkeologi agar didapatkan kualitas dan kuantitas penelitian, analisis/kajian dan interpretasi yang memadai.
2. Tersedianya sumberdaya manusia disetarakan dengan luasnya

- wilayah kerja, sehingga dapat diwujudkan keseimbangan yang pada akhirnya bermuara pada kualitas dan kuantitas hasil penelitian.
3. Sarana/prasarana yang memadai harus dimiliki oleh sebuah lembaga penelitian, sehingga berbagai tahapan dan proses kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan harapan dan dapat mencapai tujuan.
 4. Kerjasama dengan berbagai instansi terkait dan organisasi non pemerintah yang bergerak dalam bidang kebudayaan haruslah segera dijalin, agar masyarakat arkeologi dapat segera diwujudkan.
 5. Pemasarakatan hasil-hasil penelitian arkeologi dalam bentuk publikasi, seminar, diskusi dan berbagai kegiatan arkeologi sudah saatnya melibatkan masyarakat secara menyeluruh.

II. Balai Arkeologi Ambon (Kondisi Dan Tantangannya)

2. 1 Kondisi Balai Arkeologi Ambon sekarang

Dalam usianya yang hampir mencapai 11 tahun ini Balai Arkeologi Ambon, kondisinya belum dapat dikatakan memadai sebagai sebuah lembaga penelitian, sehingga sangatlah wajar apabila kinerja penelitian arkeologi yang dilaksanakan belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, seperti:

1. Tidak tercukupinya kebutuhan sumberdaya manusia, untuk melaksanakan tugas-tugas penelitian arkeologi maupun administrasi. Sejak berdirinya Balai Arkeologi Ambon belum pernah dipimpin Oleh seorang arkeolog, sehingga terjadi berbagai kesenjangan yang berlangsung cukup lama. Pernah pula dipimpin oleh seorang arkeolog, tetapi tidak dapat melaksanakan tugas dengan serius, karena situasi dan kondisi keamanan. Sampai saat ini jumlah sumberdaya manusia yang bekerja di lembaga ini masih ada dibawah standar pelayanan minimal sebuah Balai Arkeologi. Dengan 9 orang Pegawai

Negeri sipil, 8 orang calon pegawai yang baru dinyatakan lulus testing penyaringan penerimaan Pegawai Negeri Sipil tahun 2006 (Belum ber SK) dan 6 orang tenaga honorer. Oleh karena tidak pernah dipimpin oleh seorang arkeolog, maka rekrutmen karyawan yang telah terjadi tidak memiliki seorang tenaga teknis yang terkait dengan penelitian arkeologi, seperti tenaga penggambaran, konservasi, dokumentasi dan lainnya. Meskipun kegiatan penelitian dapat terlaksana, tetapi hasilnya kurang maksimal dan penanganan berbagai hasil penelitian kurang memadai. Syukurlah pada rekrutmen tahun 2006 ini kita mendapatkan 4 orang tenaga arkeologi yang sangat dibutuhkan.

2. Sarana prasarana gedung kantor yang sangat memprihatinkan. Sudah 11 tahun usia Balai Arkeologi Ambon, tetapi sampai saat ini belum memiliki sarana prasarana gedung yang memadai untuk dipergunakan sebagai tempat bekerjanya sebuah lembaga penelitian Arkeologi. Kita sudah memiliki gedung yang terpaksa ditempati, karena gedung tersebut baru selesai sebagian kecil saja, kegiatan pembangunan berlangsung secara bertahap dengan kucuran dana yang sangat minim setiap tahunnya. Belum memiliki ruangan-ruangan yang representatif untuk berbagai kegiatan seperti: perpustakaan, laboratorium, dokumentasi dan lainnya. Termasuk pula belum dimilikinya sarana-sarana yang berkaitan dengan berbagai kegiatan seperti alat-alat penelitian yang tidak lengkap, sarana laboratorium, sarana perpustakaan dan lainnya.
3. Luasnya wilayah penelitian yang meliputi Provinsi Maluku dan Maluku Utara yang terdiri dari ribuan pulau besar dan kecil, yang terhampar luas ditengah-tengah samudra yang sangat luas.

4. Belum lancarnya transportasi yang dapat menghubungkan sebaran ribuan pulau tersebut. Kalaupun daerah itu dapat dijangkau, memerlukan waktu yang berhari-hari bahkan mingguan, serta dengan resiko perjalanan yang cukup tinggi. Baik itu ditempuh melalui perjalanan udara maupun perjalanan laut.
5. Kondisi keamanan pada masa konflik dimasa lalu, sampai saat ini belum dapat dikatakan pulih seratus persen, karena pengalaman menunjukkan masih saja sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (desa-desa tertentu) yang menyebabkan terhambatnya atau kegagalan sebuah kegiatan penelitian, setelah tim peneliti sampai di lokasi.

Semua kendala dan hambatan tersebut diatas tidaklah menyebabkan berbagai tugas pokok dan fungsi Balai Arkeologi Ambon mandeg, karena untuk mengatasi semua hambatan tersebut, kita mencoba untuk mengatasinya dengan jalan mengadakan kerjasama/kemitraan dengan memanfaatkan tenaga-tenaga yang relevan dari beberapa instansi terkait seperti Museum Negeri Siwalima Ambon, Subdin Musjarla Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku serta Jurusan Sejarah Universitas Patimura Ambon, dalam berbagai kegiatan. Walaupun demikian harus diakui bahwa hasil kinerja yang dicapai belum sesuai dengan harapan, yang berarti bahwa masih ada permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya yaitu: Rendahnya kualitas hasil kinerja penelitian arkeologi Balai Arkeologi Ambon.

2.2 Tantangan Masa Kini Dan Masa Depan

Harus diakui bahwa hasil kinerja Balai Arkeologi Ambon memiliki kualitas yang belum maksimal. Hal ini dapat dimengerti

mengingat adanya berbagai kelemahan lembaga ini baik yang diakibatkan oleh faktor internal maupun eksternal.

Kinerja pengertiannya sangat identik dengan prestasi kerja yang telah dicapai dalam suatu organisasi. Dalam arti luas adalah hasil yang dapat dicapai dari suatu pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawab organisasi melalui hasil kerja seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi dan dalam kurun waktu tertentu dengan cara yang benar. (Sianipar dan Entang, 2000. 51). Balai arkeologi Ambon selama ini telah melaksanakan berbagai kegiatan penelitian arkeologi, diberbagai lokasi situs arkeologi yang terdapat diwilayah Maluku dan Maluku Utara, serta telah pula berhasil membuat laporan-laporan penelitian sesuai dengan yang ditentukan. Akan tetapi apa yang termuat dalam laporan-laporan penelitian tersebut kebanyakan sifatnya deskriptif semata, sedangkan analisis/kajiannya masih sangat lemah. Hal ini disebabkan rendahnya kemampuan sumberdaya manusia yang dimiliki, tidak tersedianya peralatan-peralatan laboratorium yang dapat menunjang kegiatan analisis, belum dimilikinya gedung kantor yang mampu menyediakan sarana/prasarana yang dibutuhkan.

Dengan demikian dapat dikatakan tantangan dimasa depan adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja penelitian arkeologi diwilayah Maluku dan Maluku Utara.
2. Meningkatkan Sumberdaya manusia, sarana dan prasarana penelitian arkeologi.
3. Meningkatkan frekwensi pemasyarakatan arkeologi (sosialisasi arkeologi).
4. Meningkatkan kerja sama (kemitraan) dengan berbagai lembaga

pemerintah dan non pemerintah yang bergerak dalam bidang kebudayaan.

Semua tantangan ini harus dihadapi dengan berbagai kiat dan usaha yang harus dilaksanakan secara terus menerus. Tujuan yang hendak dicapai pada masa yang akan datang adalah “ *Meningkatnya kualitas kinerja penelitian arkeologi di Balai Arkeologi Ambon* “. Agar tujuan tersebut dapat dicapai, maka sebelumnya ada beberapa sasaran yang harus ditingkatkan kualitasnya, karena semua itu merupakan faktor-faktor yang sangat menentukan keberhasilan Balai Arkeologi Ambon dalam mencapai tujuannya. Sasaran-sasaran yang harus ditingkatkan adalah:

1. Meningkatnya sumberdaya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas (Arkeolog, Antropolog, Sejarawan, Tenaga teknis penggambaran, laboratorium, konservasi dan lainnya).
2. Meningkatnya sarana/prasarana gedung kantor (mempercepat proses penyelesaian gedung kantor, dengan melengkapi berbagai kebutuhan yang diperlukan seperti, Perpustakaan, Laboratorium dan lainnya).

Usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas kinerja penelitian arkeologi ini, adalah agar Balai Arkeologi Ambon dapat memberikan kualitas pelayanan yang memadai kepada masyarakat umum atau instansi lain yang membutuhkan, sebagai salah satu usaha menciptakan pelayanan prima (Entang dkk, 2001). Hal ini tentu saja didasarkan atas adanya fenomena baru dinegara kita ini, dimana dewasa ini aparatur birokrasi harus dapat dan mampu memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat (Lukman dan Sugiyanto,2001). Dengan demikian dimasa yang akan datang kinerja Balai Arkeologi makin dituntut lebih berkualitas dan harus dikerjakan secara profesional, agar masyarakat secara umum mendapatkan pelayanan yang bermutu

dan merasa puas atas hasil kinerja Balai Arkeologi Ambon. Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah patut pula diperhatikan dan dijadikan acuan. Pada Pasal 11 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib melaksanakan tugas-tugas dibidang pendidikan dan kebudayaan, sehingga hal ini dapat diartikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan penelitian, pelestarian dan pengelolaan situs arkeologi. Hal ini harus dapat dimanfaatkan sebagai mitra kerja, dan agar hal tersebut dapat terjalin dengan baik, maka Balai Arkeologi harus menjaga dan meningkatkan citranya agar bisa tetap eksis dan meningkatkan kualitas kinerjanya agar dapat diakui kontribusinya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diwilayah kerjanya.

2.3 Analisis Masalah Dan Rencana Kerja

Dalam kegiatan ini akan dicoba untuk menerapkan strategi SWOT, untuk menganalisa masalah dan penyusunan rencana kerja Balai Arkeologi Ambon dimasa yang akan datang.

Sebagaimana telah diungkapkan pada pendahuluan tulisan ini, maka dalam mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Balai Arkeologi Ambon, dapat diidentifikasi menjadi 2 (dua) faktor yaitu Faktor Internal dan Faktor Eksternal.

Faktor internal merupakan faktor yang sudah ada atau sudah tersedia didalam lembaga Balai Arkeologi Ambon sendiri, dimana faktor-faktor tersebut ada yang berupa kekuatan (pendorong) serta ada pula berupa kelemahan (penghambat) pencapaian sasaran dan tujuan yang hendak dicapai. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Kekuatan (*Strenght*).

- ± Banyaknya situs-situs arkeologi yang dimiliki yang tersebar hampir diseluruh pulau di wilayah Maluku dan Maluku Utara.
- ± Banyaknya benda-benda arkeologi yang sudah terkumpul dan perlu mendapatkan penanganan berupa analisis, konservasi dan lainnya.
- ± Kewenangan yang diberikan Pemerintah kepada Balai Arkeologi Ambon untuk merencanakan dan melaksanakan penelitian arkeologi di wilayah Maluku dan Maluku Utara.

2. Kelemahan (*Weakness*).

- ± Kurangnya tenaga peneliti arkeologi (Arkeolog). Sampai saat ini arkeolog yang sudah menjadi PNS baru 2 orang, dan pada tahun 2006 ini baru lulus testing PNS 4 orang tapi belum menerima SK.
- ± Belum dimilikinya gedung/kantor yang representatif bagi kebutuhan sebuah lembaga penelitian ilmiah, sebagai tempat untuk melaksanakan berbagai tugas penelitian yang diemban.
- ± Kurang alat-alat perlengkapan, kebutuhan penelitian arkeologi; analisis arkeologis, konservasi arkeologis dan lainnya.

Itulah beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai faktor internal yang merupakan kekuatan (*Strenght*) dan kelemahan (*Weakness*) yang ada pada lembaga ini.

Selain faktor Internal tersebut, juga dapat diidentifikasi adanya faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja lembaga ini.

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang pada dasarnya ada atau sudah tersedia diluar lembaga Balai Arkeologi Ambon, dimana faktor-faktor tersebut ada yang bersifat memberikan Peluang (*Opportunities*), tetapi ada pula yang bersifat ancaman (*Threats*) didalam usaha untuk mencapai sasaran dan tujuan.

1. Peluang (*Opportunities*).

- ± Kesempatan untuk melaksanakan kegiatan penelitian arkeologi masih terbuka lebar, karena banyak situs arkeologi yang belum mendapatkan penanganan.
- ± Kemungkinan ditemukannya data-data baru yang berkaitan dengan arkeologi Indonesia, yang memungkinkan munculnya teori-teori baru yang merupakan keajuan ilmu arkeologi.
- ± Meningkatkan kualitas dan kuantitas objek daerah tujuan wisata budaya, dengan pemanfaatan sumberdaya arkeologi yang ada.

2. Ancaman (*Threats*).

- ± Hilang atau musnahnya situs-situs arkeologi, karena banyaknya proyek pembangunan yang tidak berwawasan pelestarian sumberdaya budaya/ Sumberdaya arkeologi.
- ± Belum terciptanya masyarakat arkeologi (publik arkeologi), sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya peran dan fungsi sumberdaya arkeologi,
- ± Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, belum dapat dilaksanakan secara efektif, dapat berakibat menurunnya kualitas dan kuantitas sumberdaya arkeologi.

Paparan yang bertalian dengan keberadaan faktor internal dan eksternal tersebut, tentunya masih dapat ditambahkan lagi dengan menggali secara lebih cermat lagi. Namun demikian dengan acuan yang sudah disebutkan itu dapat kiranya kita katakan semua itu merupakan permasalahan intinya.

Analisis permasalahan adalah suatu tindakan yang sangat penting dan harus dikerjakan dengan cermat, karena langkah-langkah yang akan kita tentukan dalam mencapai sasaran dan tujuan sangat dipengaruhi oleh hasil analisis permasalahan tersebut. Analisis

masalah merupakan suatu kegiatan ilmiah untuk mencari dan mengetahui kebenaran atau keadaan sebenarnya dari suatu kajian yang sedang terjadi atau yang telah berlalu dikaitkan dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya, guna menentukan tindakan atau keputusan yang dianggap paling tepat untuk mencapai sukses pada waktu yang akan datang. Langkah-langkah analisis masalah meliputi: Identifikasi berbagai faktor yang terkait; Melakukan penilaian dan menerapkan strategi yang tepat; Serta menyusun suatu rencana kegiatan yang dianggap tepat.

Tabel 1
Peta Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman.
Balai Arkeologi Ambon

No	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)	Peluang (O)	Ancaman(T)
1	Tersedianya banyak situs arkeologi	Kurangnya tenaga peneliti arkeologi	Kesempatan penelitian terbuka luas	Hilang /musnahnya situs arkeologi
2	Banyaknya benda-benda arkeologi yang sudah terkumpul	Belum dimilikinya gedung/kantor yang representatif	Kemungkinan ditemukannya data-data baru	Belum terciptanya masyarakat arkeologi (publik arkeologi)
3	Kewenangan melaksanakan penelitian arkeologi	Kurangnya sarana/prasarana penelitian	Meningkatkan objek daerah tujuan wisata budaya,	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 belum efektif

Tabel 2
Formulasi Strategi SWOT

Faktor internal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Faktor eksternal	1 Tersedianya banyak situs arkeologi 2. Banyaknya benda-benda arkeologi yang sudah diteliti.	1.Kurangnya tenaga peneliti arkeologi 2. Belum dimilikinya gedung/kantor yang representatif
Peluang (O)	Strategi SO	Strategi WO
1.Kesempatan penelitian terbuka luas 2.Kemungkinan ditemukannya data-data baru	Tingkatkan penelitian arkeologi untuk menemukan data-data arkeologi yang baru	Tingkatkan tenaga agar dapat melaksanakan penelitian arkeologi lebih luas
Ancaman (T)	Strategi ST	Strategi WT
1.Hilang /musnahnya situs arkeologi 2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 belum efektif	Tingkatkan penerapan UU Benda Cagar Budaya untuk keselamatan situs arkeologi	Tingkatkan sarana/prasarana agar situs arkeologi tidak musnah/hilang.

Berdasarkan formulasi strategi SWOT, maka ada 4 strategi yang perlu dikembangkan untuk meningkatkan kinerja Balai Arkeologi Ambon dimasa yang akan datang yakni:

1. Strategi SO (Strenght–Opportunities yaitu meningkatkan kegiatan penelitian arkeologi agar dapat menemukan data-data baru.
2. Strategi WO (Weakness–Opportunities yaitu Meningkatkan tenaga peneliti arkeologi agar dapat melaksanakan penelitian lebih luas.

3. Strategi ST (Strength-Threats) yaitu Penerapan Undang-Undang Benda Cagar Budaya dengan efektif dan tegas agar tinggalan arkeologi tidak musnah atau hilang.
4. Strategi WT (Weakness-Threats) yaitu meningkatkan sarana prasarana agar situs-situs arkeologi dapat dilindungi.

Setelah diketahui berbagai permasalahan yang dihasilkan melalui analisis strategi SWOT ini, maka berdasarkan kondisi yang senyatanya terjadi pada Balai Arkeologi Ambon, maka untuk mendorong lebih cepatnya pencapaian sasaran yaitu meningkatkan kinerja penelitian arkeologi, pada dasarnya semua strategi itu harus diterapkan, tetapi faktor kunci pendorong yang paling penting adalah penerapan strategi WO (Weakness-Opportunities). Secara umum dapat kiranya dinyatakan bahwa rencana kegiatan Balai Arkeologi Ambon dalam usaha meningkatkan kinerja tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Rencana Kegiatan

Sasaran dan indikator	Strategi program	Langkah-langkah Kegiatan
	Strategi WO	
Meningkatnya kinerja penelitian arkeologi	Tingkatkan tenaga peneliti agar penelitian lebih luas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menambah tenaga peneliti. 2. Mengadakan pelatihan tenaga teknis.
	Strategi SO	
	Tingkatkan penelitian arkeologi untuk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menambah jumlah situs yang diteliti.

	mendapatkan data baru	2. Meningkatkan teknik dan teori penelitian.
	Strategi ST	
	Tingkatkan sosialisasi UUBCB untuk keselamatan BCB	1. Sosialisasi UU BCB 2. Pameran, seminar, publikasi dll.
	Strategi WT	
	Tingkatkan Sarana/ prasarana agar penelitian berjalan lancar	1. Mempercepat penyelesaian gedung kantor. 2. Meningkatkan sarana prasarana

III. Kesimpulan

Demikianlah yang dapat disampaikan berbagai hal yang berkaitan dengan keberadaan Balai arkeologi Ambon, kondisinya masa kini serta kondisi yang diharapkan dimasa yang akan datang untuk menjawab berbagai tantangan. Simpulan yang dapat dikedepankan adalah:

1. Balai Arkeologi Ambon dengan berbagai kekurangan dan hambatan yang dihadapi, masih tetap dapat berdiri dan menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati.
2. Kualitas kinerja Balai Arkeologi Ambon memang masih jauh dari harapan, tetapi usaha-usaha kearah peningkatan mutu tersebut selalu dikerjakan dengan berbagai cara.

3. Kendala dan Tantangan didepan mata yang akan dihadapi adalah rangsangan untuk terus maju dalam suasana kebersamaan yang padu dari semua personil.
4. Berbagai kegiatan yang sesuai dengan tugas fungsi telah dikerjakan dengan maksimal dan penuh tanggungjawab.

Harapan semoga berbagai kendala yang telah diuraikan dalam tulisan ini dapat dipenuhi dalam jangka waktu cepat. ***

Daftar Pustaka

- Ambary, Hasan Muarif. 1994. Laporan Penelitian Arkeologi Islam, Ternate, Kecamatan Ternate, Maluku Utara. Balar Ambon (tt).
- , ———. 1995. Penelitian Arkeologi Islam Ternate, Bacan, Jailolo, Maluku Utara. Balar Ambon (tt).
- Entang, H.M. dkk, 2001. Isu Aktual Sesuai Tema, Bahan Ajar Diklat Pim Tingkat III, Lembaga Administrasi Negara- RI .
- Heekern, H.R.van,1958. The Bronze Iron Age of Indonesia. VKI. XXII, S.Gravenhage.
- , ———. 1972. The Stone Age of Indonesia. The Hague Martinus
- Jonge de Nico & Toos van Dijk.1995. Forgotten Islands of Indonesia, Peri-Plus.
- Kosasih, S.A. 1983. Lukisan Gua di Indonesia sebagai sumber data penelitian arkeEstetka dalam Arkeologi Indonesia. Diskusi Ilmiah Arkeologi I
- Manuputty, M . A. dkk. 1996. Laporan Penelitian ArkeologiPrasejarah Maluku.Situs Waiputih Seram Barat;Kecamatan Leihitu;Kabupaten Maluku Tengah. Balai Arkeologi Ambon (tt).
- Nendisa, Drs, M. 1997. Laporan Hasil Penelitian Arkeologi Kolonial Maluku Situs Lonthor, Kecamatan Banda Naira, Maluku Tengah. Balai Ark ologi Ambon (tt).
- Sahusilawane, Dra F . 1996a Laporan Hasil Penelitian Arkeologi Klasik, KecaKei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara. Balai Arkeolog (tt).
- , ———. 1996b. Laporan penelitian Arkeologi Klasik, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara. Balai

Arkeologi Ambon (tt)

Sianipar, J.P.G dan Entang, H.M. 2000. Teknik-teknik Analisis Manajemen. Bahan Ajar Diklat Pim Tingkat III. LAN-RI.

Soejono, R.P. 1972. Prasejarah Maluku, Seminar Sejarah Maluku I Ambon.

_____, _____. 1984. Sejarah Nasional Indonesia I. P N Balai Pustaka. Jakarta.

Suantika, I Wayan. 2006. Dua Buah Arca Perwujudan Koleksi Museum Negeri Siwalima Ambon. (tt).

Sumber Daya Arkeologi Dalam Pengembangan Di Masa Depan

I Gst. A. A. Mas Ratnawati, Balai Arkeologi Denpasar

I. Pendahuluan

Tinggalan sumberdaya arkeologi yang tersebar diseluruh Nusantara menjadi kebanggaan warisan budaya masa lampau. Benda-benda budaya dari masa lalu yang berasal dari masa prasejarah, masa klasik (masa Hindu-Buddha) dari berkembangnya Islam awal adalah sumberdaya atau warisan budaya yang tidak dapat dibiarkan begitu saja.

Pada dasarnya pemanfaatan sumberdaya arkeologi itu mencakup dua aspek, yaitu aspek perlindungan benda-benda warisan budaya dari kerusakan dan kehancuran. Adapun aspek kedua, adalah segala cara dan sistem untuk mendapatkan sumberdaya arkeologi agar dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam peningkatan pendapatan daerah. Tampaknya perlu dikatakan, bahwa sumberdaya arkeologi dapat dimanfaatkan sebagai pendorong bagi masyarakat setempat, untuk mengekspresikan segala daya cipta, dan karyanya dewasa ini. Tinggalan arkeologi masa lalu yang sangat langka, serta sebagai peradaban dan budaya yang tinggi, itu diharapkan dapat menarik para wisatawan (Kusumawati, 1991 : 6).

UU. RI. Nomor 22 Tahun 1999, langkah yang mutlak ini harus dilakukan agar usaha yang bersifat negatif terhadap tinggalan arkeologi bisa diminimalisasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Edi Sedyawati tentang Pengelolaan Benda-Benda Cagar Budaya dan dua

langkah yang harus ditempuh yaitu kelembagaan dan sumberdaya manusia (Sedyawati, 1998 : 1-4). Kelembagaan yang dimaksud adalah instansi yang mengelola sumberdaya arkeologi dan sebagainya. Kelembagaan inilah yang memproduksi peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Perda. dan seterusnya, sedangkan sumberdaya manusia adalah orang-orang yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan tinggalan arkeologi. Mereka inilah yang mestinya ditingkatkan pemahamannya tentang sumberdaya arkeologi yang ada. Anggota adat yang ada di Bali, adalah orang-orang yang berhubungan langsung dengan tinggalan arkeologi. Khususnya untuk daerah Bali anggota lembaga adat ini hendaknya lebih banyak dilibatkan dalam sumberdaya agar pemahamannya tentang tinggalan budaya miliknya meningkat.

Selain hal tersebut di atas, kiranya perlu adanya terobosan-terobosan baru. Mengingat sekian banyaknya tinggalan sumberdaya arkeologi yang tersebar di Bali tidak secara keseluruhan dapat dijadikan obyek wisata, bagaimana upaya kita untuk mengkaji hal tersebut. Dapat dikatakan bahwa tinggalan sumberdaya arkeologi, selain sebagai obyek wisata juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana peningkatan ilmu pengetahuan melalui hasil penelitian.

Salah satu hasil penelitian yang dilakukan bertahun-tahun lamanya, salah satu contoh situs Gilimanuk. Pengembangan kemasa depan kita telah mewujudkan Museum Manusia Purba. Dari hasil ini diharapkan akan dapat sebagai sumbangan kepada Pemkab. Jembrana dalam pengembangan pariwisata dan meningkatkan PAD. Jembrana.

II. Sumber Daya Arkeologi

Sumberdaya arkeologi adalah keseluruhan hasil aktivitas manusia masa lampau yang sampai kepada kita biasanya berupa fragmen dan ada juga yang masih utuh dan insitu. Di antara sisa-

sisia aktivitas manusia di masa lampau itu ada yang tidak dilindungi oleh UU. dan ada pula yang dilindungi. Tinggalan arkeologi yang dilindungi oleh UU. lazim disebut Benda Cagar Budaya.

Sesuai dengan Undang-Undang RI. No. 5 Tahun 1992 yang dimaksud dengan Benda Cagar Budaya adalah:

- a. Benda buatan manusia bergerak atau tidak bergerak, yang berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagian atau sisanya yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gayanya sekurang-kurangnya 50 tahun serta dianggap mempunyai nilai-nilai penting bagi sejarah ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
- b. Benda alam yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan sedangkan yang dimaksud dengan situs adalah lokasi yang mengandung atau diduga mengandung benda-benda cagar budaya, termasuk lingkungan yang diperlukan bagi pengamatannya.

III. Pembinaan Dan Pengembangan Masyarakat

Pengembangan pariwisata budaya di Bali telah memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap tinggalan arkeologi. Dampak positif terhadap tinggalan arkeologi dapat dilihat dari meningkatnya kepedulian pemerintah dan masyarakat terhadap tinggalan arkeologi. Kepedulian pemerintah terlihat dalam perbaikan tinggalan arkeologi yang tersebar di seluruh Bali yang dilaksanakan oleh Kantor Balai Pelestarian Peninggalan dan Purbakala Bali, NTB, dan NTT. Seperti misalnya pemugaran Candi Gunung Kawi (Tampaksiring), Taman Ujung (Karangasem), Taman Ayun (Mengwi), Pura Uluwatu (Badung), Tanah Lot (Tabanan), Kerta Gosa (Klungkung), Museum Manusia Purba (Jembrana), dan lain lain. Kepedulian masyarakat adanya peningkatan pengawasan terhadap

kesucian dan kelestarian terhadap tinggalan arkeologi, baik yang dijadikan obyek-obyek wisata maupun yang belum.

Dalam pengelolaan sumberdaya arkeologi peran serta masyarakat sebagai salah satu *stakeholder* harus lebih ditingkatkan. Masyarakat sebagai pewaris dan sekaligus pemilik tinggalan arkeologi harus dilibatkan dalam pengolahan, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hal ini tampak kurang dilakukan oleh pemerintah selama ini, dan pengelolaan lingkungan arkeologi. Masyarakat sering tidak mendapat informasi atau manfaat langsung dari tinggalan arkeologi yang mereka miliki. Akibatnya masyarakat tidak jarang apatis dan merasa tidak memiliki tinggalan arkeologi tersebut, sehingga kelestarian tidak dapat terjamin. Untuk menghindari hal tersebut, maka langkah-langkah antisipasi sebagai berikut: selalu mengikut sertakan masyarakat lokal dalam berbagai kegiatan. Kebijakan pemerintah yang mendapatkan berbagai pembangunan pada kepentingan masyarakat atau memperdayakan masyarakat, senantiasa akan menuntut pula kemampuan agar memiliki pengetahuan yang dapat meningkatkan pola pikir dan pola tindakan dalam menghadapi gejala melonjaknya wisatawan. Untuk ini, maka masyarakat turut tidak sebagai pewaris yang tidak dapat berbuat banyak terhadap apa yang diwariskan nenek moyang mereka, tetapi mereka harus difasilitasi, agar dapat memanfaatkan berbagai warisan sumberdaya arkeologi untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Secara bertahap perlu usaha dan langkah-langkah serta meningkatkan pengetahuan tentang warisan budaya, agar masyarakatnya mengetahui apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang harus dilakukan. Dengan berbekal pengetahuan yang memadai tentang berbagai obyek wisata budaya, diharapkan akan muncul kader-kader daerah yang dapat bertindak sebagai juru pemeran atau pemandu wisata yang handal tentang berbagai obyek wisata alam

tersebut. Dengan demikian daerah akan memperoleh keleluasaan lapangan kerja bagi penduduk atau masyarakat.

Untuk mencapai tujuan kegiatan-kegiatan budaya yang dilakukan oleh Pemda. dan instansi terkait lainnya supaya melibatkan tokoh-tokoh adat atau mungkin anggota lembaga adat, agar pemahaman dan kepeduliannya terhadap tinggalan arkeologi menjadi lebih baik. Kegiatan seminar, sarasehan, ceramah, pameran mengenai sumberdaya arkeologi sangat tepat dilakukan pada saat adanya kegiatan tersebut. Misalnya pada hari Kemerdekaan Negara Kesatuan RI. dan pada saat pesta Kesenian Rakyat Bali serta even-even lainnya. Usaha untuk melibatkan masyarakat dalam mengelola sumberdaya termasuk pemanfaatannya digelar terus, sehingga pemahamannya terhadap sumberdaya terus meningkat dan rasa memiliki akan semakin mendalam. Kondisi tentang akan memperkecil ruang gerak dari upaya negatif terhadap tinggalan arkeologi, akhirnya kelestarian dapat dijaga. Rasa optimisme tentang budaya dan arkeologi didasarkan atas kenyataan, bahwa potensi lembaga adat di Bali juga digerakkan untuk menjaga kelestarian sumberdaya. Lebih-lebih Pemerintah Daerah Tingkat I dan II mau menyisihkan sebagian kecil pendapatannya dari distribusi obyek-obyek wisata purbakala, dan disumbangkan kepada desa adat pemilik obyek wisata purbakala tersebut. Niscaya harapan ini bukanlah suatu yang mengada-ada, contoh konkrit mengenai hal ini ialah, menyerahkan 60 % pendapatan dari obyek wisata Alas Kedaton, Desa Kukuh, Kabupaten Tabanan, kepada Desa Adat, sedangkan 40 % diserahkan ke Pemkab. Tabanan. Dana tersebut dimanfaatkan untuk menata obyek wisata, juga dimanfaatkan untuk membiayai pelaksanaan upacara keagamaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rangsangan ini tentunya memberi rangsangan yang cukup kepada masyarakat untuk ikut bertanggungjawab terhadap tinggalan arkeologi yang ada di sekitarnya. Mudah-mudahan langkah Pemerintah Daerah Tabanan ditiru oleh pemerintah daerah lainnya

dengan menyisihkan sebagian kecil pendapatannya dari obyek wisata purbakala yang kemudian disumbangkan kepada desa adat yang memiliki tinggalan arkeologi yang dijadikan obyek wisata. Upaya pemerintah bersinergi dengan lembaga adat dan masyarakat umum lainnya diharapkan dapat mencapai sasaran seperti yang digariskan oleh Asisten Deputi di bidang kepurbakalaan yang pada intinya terdiri dari:

- a. Melestarikan warisan budaya melalui upaya perlindungan pengembangan dan pemanfaatan
- b. Menumbuh sadarkan masyarakat untuk membangkitkan kebanggaan terhadap budaya sendiri, cinta tanah air, serta memperkokoh jatidiri bangsa
- c. Meningkatkan penelitian, pengembangan arkeologi, dan sejarah
- d. Meningkatkan peran serta masyarakat, dan organisasi profesi dalam pelestarian warisan budaya
- e. Meningkatkan pengamanan, penataan, dan penyajian (museum) sebagai upaya pelestarian warisan budaya bangsa
- f. Melestarikan dan memanfaatkan warisan budaya bangsa untuk kepentingan agama, pendidikan, ilmu pengetahuan, ekonomi, persatuan, dan persabatan antar bangsa
- g. Mewujudkan kerjasama nasional, regional, dan internasional.

Sejalan dengan hal tersebut di atas dikatakan, bahwa manusia yang berbudaya adalah manusia yang mampu menggunakan akal dan pikirannya untuk menciptakan gagasan atau ide yang nantinya dapat digunakan untuk menggali dan mengembangkan potensi budaya atau mengelola sumberdaya alam, sehingga dapat menjadi daya tarik wisata.

Obyek wisata ini perlu mendapatkan perhatian yang baik, mengingat memiliki beraneka ragam budaya yang berbeda-beda. Dengan ragam budaya yang berbeda tersebut, maka setiap daerah memiliki ciri khas dan kemilikan tersendiri, sehingga manusia

memanfaatkan daerah tersebut sebagai daerah tujuan wisata. Salah satu penyebab ditetapkannya daerah tersebut memiliki atraksi budaya yang menarik. Dengan keadaan ini didasari bahwa juru wisatawan yang mengadakan perjalanan wisatawan ingin melihat sesuatu yang langka, kepribadian asli, indah dan mempesona, sehingga dapat memenuhi hasrat, ingin tahu, dan menikmati budaya daerah lain tidak dapat disangkal, bahwa pendukung utama adalah kebudayaan. Secara konseptual pariwisata budaya bertumpu pada potensi budaya yang dimiliki konsep tersebut, karena budaya adalah sumber yang sangat potensial bagi kehidupan masyarakat dan telah mengakar serta meluas di tengah-tengah masyarakat. Dalam konsep itu budaya sebagai modal dasar mempunyai pengertian dan fungsi yang normatif dan operasional (Mantra, 199 : 4).

Sebagai konsep normatif aturan budaya diharapkan dapat mempunyai potensi dalam memberi identitas, arahan yang prinsipil dan memiliki pola kontrol. Dengan demikian potensi budaya dapat memberikan sumber motivasi bagi umat manusia dan masyarakat. Secara operasional budaya juga diharapkan dapat menjadi daya tarik utama untuk memperbesar kedatangan wisatawan. Melalui konsep pariwisata budaya tersebut kita mengharapkan bahwa antara budaya dan ekonomi, pariwisata dapat saling mengisi dan menikmati keuntungan sosial budaya. Dalam membuat program pengembangan pariwisata maupun meningkatkan kesinambungan karakter dan budaya. Dengan demikian berangsur-angsur pariwisata budaya menjadi fenomena sosial dalam kehidupan masyarakat di daerah ini dapat memberikan arti semakin penting dalam meningkatkan harkatnya.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan: Pengembangan pariwisata di Bali telah menimbulkan

dampak yang positif dan negatif terhadap tinggalan arkeologi. Dampak positif, yaitu ada peningkatan kepedulian pemerintah dan masyarakat terhadap tinggalan arkeologi yang diwujudkan dalam pemugaran. Dampak negatif, yaitu pencemaran lingkungan dan penjualan benda-benda purbakala. Dengan demikian perlu usaha langkah peningkatan dan pengetahuan tentang warisan budaya, agar masyarakat nantinya akan mengetahui apa yang tidak boleh dilakukan dan apa yang harus dilakukan dengan berbekal pengetahuan yang memadai. Lembaga adat harus dilibatkan, terutama menyangkut tentang keamanan dan pemanfaatan untuk kepentingan masyarakat tanpa melupakan aspek-aspek lainnya.

Sistem pengelolaan obyek wisata harus melibatkan masyarakat atau lembaga adat, apalagi lembaga adat mendapat inkam dari obyek tersebut. Rangsangan ini tentunya memberi rangsangan yang cukup kepada masyarakat untuk ikut bertanggung jawab terhadap tinggalan arkeologi. Mudah-mudahan daerah-daerah lain mengikuti jejak desa adat Kukuh untuk mensejahterakan masyarakat dan lingkungannya.***

Daftar Pustaka

- Bagus, A.A. Gde, 2002. Dampak Pariwisata terhadap Tinggalan Arkeologi Bali, *Forum Arkeologi*, Balai Arkeologi Denpasar.
- Geria, Wayan, 1993. *Interalisi Desa Adat dan Kepariwisataaan Studi Kasus di Desa Adat Sangeh, Kabupaten Badung*, Fakultas Sastra Universitas Udayana.
- Haris Sukendar, Ayu Kusumawati, 2005. *Pembangunan Sumberdaya Arkeologi Budaya dan Pariwisata Dompū*, diterbitkan Pemerintah Kabupaten Dompū, NTB.
- Kusumawati, Ayu, 1995. *Tinggalan Arkeologi Sebagai Sumberdaya Bangsa*. Wana Media Alumni Udayana No. 19 Th. XI Juli ISSN.
- Mantra, Ida Bagus, 199 . *Masalah Sosial Budaya dan Modernisasi Denpasar*, PT. Upadasasastra.
- Pitana, I Gede, 1994. *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*, Denpasar Bali Post.
- Sunarya, Nyoman, 2005. *Pemanfaatan Sumber Daya Arkeologi. Pernerdayaan Lembaga Adat dalam Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi IAAI Komda Bali*, Balai Arkeologi Denpasar

Kegiatan Pengembangan Arkeologi Di Balai Arkeologi Manado

(Joko Siswanto: Balai Arkeologi Manado)

I. Pendahuluan

Balai Arkeologi Manado yang berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor: 0290/0/1992 Tanggal 1 Juli 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Arkeologi. Sesuai dengan perubahan struktur departemen yang terjadi pada tahun 2003, maka ada perubahan mendasar tentang operasional Balai Arkeologi yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: KM.53/OT.001/MKP/2003, tanggal 5 Desember 2003 khususnya Bab I, Pasal 1 dan 2 serta Bab III Pasal 8 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Balai Arkeologi Manado.

Balai Arkeologi sebagai salah satu instansi yang bergerak di bidang penelitian arkeologi, akhir-akhir ini mengalami perubahan seiring dengan perkembangan pemikiran masyarakat tentang ilmu arkeologi. Hal yang nyata dari perubahan tersebut adalah adanya kegiatan yang bersifat pengembangan yang mulai diprogramkan oleh instansi-instansi yang bersangkutan. Kalau pada masa lalu instansi Balai Arkeologi hanya menitik beratkan kegiatan di bidang penelitian, akhir-akhir ini dituntut untuk memprogramkan kegiatan pengembangan seperti analisis, sosialisasi melalui pameran, penyuluhan, penyebaran hasil-hasil penelitian dan kegiatan-kegiatan

lainnya yang terkait. Kegiatan-kegiatan yang bersifat pengembangan bermuara pada satu hal yaitu masyarakat. Dalam hal ini masyarakat menjadi sangat penting, karena segala kegiatan penelitian dan pengembangannya bertujuan untuk masyarakat. Kita dituntut untuk melibatkan masyarakat dalam proses penelitian dan dalam kegiatan pengembangan arkeologi, masyarakat merupakan tujuan utama. Masyarakat merupakan obyek yang harus memperoleh informasi hasil-hasil penelitian.

Sehubungan dengan perkembangannya, Balai Arkeologi Manado sebagai salah satu instansi pemerintah yang bergerak di bidang penelitian pada tahun-tahun terakhir mulai memprogramkan pengembangan arkeologi melalui kegiatan pameran, penyuluhan, pencetakan dan penyebarluasan hasil-hasil penelitian. Kegiatan evaluasi yang selama ini sudah ada juga perlu lebih ditingkatkan dengan melibatkan masyarakat yang punya kepedulian terhadap ilmu ini. Meskipun demikian, untuk kegiatan yang bersifat pengembangan dirasa masih sangat kurang dalam hal kuantitas dan pendanaan. Kuantitas dan pendanaan untuk kegiatan penelitian masih sangat tinggi jika dibandingkan dengan kegiatan yang bersifat pengembangan arkeologi. Oleh karena itulah perlu ada pemikiran baru untuk menyeimbangkan antara jumlah kegiatan dan pendanaan antara kegiatan penelitian dan pengembangannya.

II. Kebijakan Pengembangan Pada Balai Arkeologi Manado

Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) merupakan landasan dalam pembangunan termasuk di dalamnya pembangunan di bidang Kebudayaan. Pengembangan kebudayaan ditujukan untuk memberikan wawasan budaya dan makna pada pembangunan nasional, harkat dan martabat pada manusia Indonesia dan memperkuat jatidiri, kepribadian bangsa serta memperkuat persatuan

dan kesatuan. Pengembangan kebudayaan nasional harus memperhatikan pemahaman nilai daerah yang luhur dan penyerapan budaya asing yang memperkuat budaya nasional. Sasaran pembangunan meliputi nilai tradisi dan peninggalan sejarah yang memberi corak khas pada kebudayaan bangsa dan peningkatan sumber daya manusia.

Berdasarkan kebijakan sektoral di Indonesia ataupun paradigma umum arkeologi yang dianut selama ini, orientasi penelitian arkeologi Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pengembangan kebudayaan nasional. Secara umum, dalam kebijakan pengembangan jangka menengah dan jangka panjang disebutkan bahwa tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai penting bagi jati diri bangsa, kebanggaan nasional, dan kelestarian kebudayaan nasional harus dikembangkan dan dilestarikan.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, Balai Arkeologi Manado sebagai UPT di daerah yang merupakan kepanjangan tangan dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional perlu merealisasikan kebijakan pemerintah tersebut ke dalam program-program kegiatan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Arkeologi Manado, yaitu: Wilayah Propinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo.

Dalam buku Rancangan Induk Penelitian Arkeologi Nasional disebutkan bahwa, Balai Arkeologi mempunyai Tugas Pokok:

1. Merencanakan dan melaksanakan penelitian dan pengembangan arkeologi di wilayah kerjanya.
2. Menyebarkan hasil penelitian arkeologi.

Sedangkan Fungsi Balai Arkeologi adalah:

1. Melaksanakan rencana dan program kerja tahunan
2. Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data yang bernilai budaya dan ilmiah yang berhubungan dengan penelitian arkeologi.

3. Melakukan urusan perpustakaan, dokumentasi, dan pengkajian ilmiah yang berhubungan dengan hasil penelitian arkeologi.
4. Memperkenalkan dan menyebarluaskan hasil penelitian arkeologi.
5. Melakukan bimbingan edukatif kultural kepada masyarakat tentang benda yang bernilai budaya dan ilmiah yang berhubungan dengan arkeologi.
6. Melakukan urusan tata usaha, urusan prasarana dan sarana pada Balai Arkeologi.

Seiring dengan perubahan pemikiran dan adanya perubahan dalam pola pikir masyarakat tentang pentingnya kegiatan pengembangan yang harus dilakukan, maka Balai Arkeologi Manado juga melakukan pengembangan dalam berbagai hal seperti pengembangan SDM, pengembangan prasarana dan sarana, pengembangan penelitian, dan pengembangan dalam hal pemasyarakatan hasil-hasil penelitian. Berikut uraian pengembangan dari masing-masing kegiatan.

A. Pengembangan SDM

Balai Arkeologi Manado sebagai UPT daerah yang mulai beroperasi pada tahun 1993, secara kuantitas memiliki jumlah pegawai yang relatif sedikit. Meskipun secara umum jumlah pegawai yang ada belum memenuhi standar ideal sebuah UPT (Standar Ideal 15 orang sedangkan jumlah pegawai Balair Arkeologi Manado berjumlah 11), tetapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, usaha pengembangan baik dalam hal kuantitas dan kualitas selalu dilakukan. Dalam hal kuantitas, ada tambahan 5 orang tenaga honorer yang dapat membantu pelaksanaan semua tugas yang ada, baik kegiatan penelitian, tugas teknis, maupun pekerjaan yang bersifat administrasi. Lima orang tenaga honorer yang sudah mengabdikan sejak beberapa tahun lalu tersebut sesuai pengumuman sudah lolos sebagai CPNS tinggal menunggu SK lebih lanjut. Meskipun secara definitif

tenaga honorer tersebut belum diangkat sebagai pegawai, namun dalam hal pekerjaan semuanya memiliki keahlian dan keterampilan yang bervariasi dan hal ini dapat memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Balai Arkeologi Manado. Peningkatan kualitas SDM ditempuh melalui keikutsertaan dalam pelatihan dan pengalaman pekerjaan yang selama ini sudah dilakukan.

B. Pengembangan Prasarana dan Sarana

Sebagai UPT yang relatif baru, Balai Arkeologi Manado sampai saat ini masih dalam taraf kepemilikan sendiri terutama dalam pengadaan gedung dan bangunan. Mulai tahun 2004, Balai Arkeologi Manado sudah pindah ke kantor sendiri meskipun saat itu masih dalam proses penyempurnaan. Pada program kegiatan tahun ini masih ada kegiatan pembangunan gedung dalam usaha untuk memenuhi standar ideal gedung bangunan kantor pemerintah. Sementara itu, usaha melengkapi sarana yang berupa peralatan penelitian dan perlengkapan kantor selalu diprogramkan dalam setiap tahunnya. Sampai saat ini Balai Arkeologi Manado belum memiliki peralatan yang lengkap, namun peralatan yang ada sudah cukup untuk melaksanakan program kegiatan baik yang berhubungan dengan kegiatan penelitian di lapangan maupun kegiatan administrasi perkantoran.

C. Pengembangan Penelitian

Balai Arkeologi Manado sebagai UPT yang mempunyai fungsi utama melakukan penelitian di bidang arkeologi di wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo, sesuai lokasi wilayahnya mempunyai kajian unggulan tentang migrasi. Dalam kaitannya dengan kajian unggulan ini, terdapat beberapa faktor pendukung yang dimiliki wilayah kerja Balai Arkeologi Manado, yaitu:

- * Letak geografisnya yang sangat strategis, sebagai daratan antara yang menghubungkan kawasan Asia dan kawasan Pasific.

- * Adanya situs-situs permukiman, seperti: Gua-gua permukiman di kepulauan Sangihe-Talaud, seperti: Leang Tuwo Mane'e, Leang Sarru, Leang Buida dll, Situs Bukit kerang Passo (Minahasa), Situs permukiman Guaan (Bolaang Mongondow), Situs-situs di Lembah Besoa, seperti: Situs Pokekea, Situs Tadulako, Situs Entovera, dll, Situs-situs di Lembah Napu, seperti: Situs Watunongko, Situs Watulumu, dll.
- * Adanya temuan alat-alat batu neolitik persegi di Situs Oluhuta (Gorontalo), Situs Guaan (Bolaang Mongondow), situs-situs di Kepulauan Talaud, dll.
- * Adanya kubur tempayan di Situs Passo (Minahasa, Sulawesi Utara), Situs Busak (Buol, ToliToli), Situs Watunongko (Lembah Napu, Poso), Situs Pokekea (Lembah Besoa, Poso) dll.
- * Adanya situs-situs megalitik yang berupa waruga (Minahasa); kalamba, arca menhir, dolmen, batu dakon (Lembah Besoa, Poso); kalamba, arca menhir, batu dakon (Lembah Napu, Poso) dll.

Sehubungan dengan beberapa faktor pendukung seperti tersebut di atas, maka dalam rangka pengembangan penelitian ke depan akan dilakukan beberapa strategi, yaitu:

- * Melakukan penelitian untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan tinggalan fisik manusia dan fauna, tinggalan budaya dan keadaan lingkungan alam di wilayah tersebut, khususnya pada periode prasejarah saat terjadinya migrasi ratusan tahun yang lalu. Dalam hal ini penelitian arkeologi dilakukan dengan pendekatan holistik, tematis dan kewilayahan. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, diperlukan tenaga baik dari disiplin arkeologi maupun tenaga yang mempunyai disiplin ilmu untuk mendukung pencapaian tujuan, seperti: ahli paleontologi, zoologi, botani, geologi, kimia, linguistik dan ilmu lainnya.

- * Melakukan penelitian kerjasama dengan pihak luar yang dapat mendukung pencapaian tujuan tema penelitian ini. Berkaitan dengan hal ini, Balai Arkeologi Manado sejak tahun 2004 sudah melakukan kerjasama penelitian dengan peneliti dari Jepang yang juga punya ketertarikan terhadap kajian ini. Hal ini sangat menguntungkan karena disamping dapat mempercepat pencapaian tujuan penelitian juga bermanfaat dalam meningkatkan pengalaman terutama bagi tenaga yang ikut serta dalam kegiatan tersebut.
- * Meningkatkan kuantitas penelitian terutama penelitian arkeologi tentang migrasi. Dengan demikian tujuan untuk memberikan gambaran yang utuh tentang kehidupan manusia, kebudayaan, dan lingkungannya di dalam proses migrasi dan hunian pada masa prasejarah akan segera terwujud.

D. Pengembangan Pemasarakatan Hasil-hasil Penelitian

Pemasarakatan hasil penelitian arkeologi yang selama ini dilakukan oleh Balai Arkeologi Manado dilakukan dengan beberapa cara, seperti: penerbitan jurnal dan penerbitan buku hasil-hasil laporan, penyuluhan dan sosialisasi, dan pameran hasil-hasil penelitian. Sampai dengan tahun 2006 ini, penerbitan jurnal dan buku hasil laporan dilaksanakan setahun sekali. Jurnal terbit 1 (satu) judul setiap tahun. Jurnal penelitian arkeologi yang terbit menampilkan sejumlah artikel/tulisan yang berupa kajian dari satu aspek tentang hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan di wilayah Sulu, Sulteng, dan Gorontalo. Selain itu juga memuat artikel/tulisan tentang kajian penelitian yang dilakukan di luar wilayah kerja Balar Manado. Penerbitan buku hasil laporan penelitian arkeologi terdiri dari 2 (dua) judul dalam setahun.

Pada beberapa tahun lalu kegiatan penyuluhan/sosialisasi arkeologi hanya dilakukan sekali dalam setahun, namun sejak tahun 2005 kegiatan penyuluhan dan sosialisasi dilakukan dua kali dalam

setahun. Kegiatan penyuluhan/sosialisasi dilakukan pada beberapa tempat di wilayah kerja Balar Manado, namun selalu diprioritaskan dilakukan pada wilayah-wilayah yang pada tempat tersebut mengandung atau ditemukan peninggalan arkeologi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada masyarakat setempat tentang arti pentingnya benda peninggalan manusia masa lalu untuk masyarakat sekarang. Dari hasil kegiatan penyuluhan/sosialisasi diharapkan bahwa peserta semakin mempunyai kepedulian yang tinggi terutama dalam ikut menjaga dan melestarikan benda-benda peninggalan arkeologi yang ada di sekitarnya. Tidak menutup kemungkinan bahwa pada tahun-tahun yang akan datang semua wilayah yang ada di wilayah kerja Balar Manado akan dilakukan penyuluhan/sosialisasi pada masyarakatnya.

Pameran arkeologi yang merupakan kegiatan yang dinilai paling strategis dalam penyebarluasan hasil penelitian, pada sebelum tahun 2005 dilakukan sekali dalam setahun. Sejak tahun 2005, kegiatan pameran dilakukan lebih dari dua kali. Tahun 2006 ini sudah dilakukan 3 kegiatan pameran hasil-hasil penelitian arkeologi di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Kegiatan pameran yang dilakukan oleh Balar Manado dilakukan dengan menampilkan foto, poster, dan artefak hasil penelitian. Pada kegiatan ini sering juga diisi dengan penayangan berupa visualisasi kegiatan dan hasil penelitian arkeologi yang sudah pada daerah tertentu. Dalam masa yang akan datang perlu ditingkatkan kuantitas kegiatan pameran yang sudah dilakukan sehingga penyebarluasan hasil-hasil penelitian arkeologi semakin lebih memasyarakat.

Selain beberapa kegiatan yang sudah diuraikan di atas, masih ada cara lain untuk menyebarluaskan / memasyarakatkan hasil-hasil penelitian. Cara tersebut adalah membuat website yang dapat diakses oleh masyarakat melalui internet. Meski cara ini merupakan cara paling strategis, namun Balai Arkeologi Manado belum melakukannya. Beberapa kendala yang dihadapi adalah kurangnya

tenaga yang menguasai teknologi untuk mampu membuat dan menangani kegiatan SIA (Sistem Informasi Arkeologi). Meskipun demikian saat ini sudah ada pemikiran ke arah tersebut dan direncanakan pada tahun depan akan dilakukan pembuatan situs yang memuat informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan Balar Manado, sehingga masyarakat luas dapat mengaksesnya melalui internet.

III. Penutup

Seiring dengan perubahan pemikiran masyarakat yang terjadi pada saat ini, perlu dilakukan pengembangan oleh UPT termasuk Balai Arkeologi Manado. Pengembangan yang selama ini sudah dilakukan dapat dibagi dalam beberapa aspek, yaitu: pengembangan SDM, pengembangan prasarana dan sarana, pengembangan penelitian, dan pengembangan dalam hal pemasyarakatan hasil-hasil penelitian. Beberapa kegiatan atau usaha sudah dilakukan untuk meningkatkan citra dari Balar Manado, namun demikian pada kenyataannya masih ada kekurangan dalam banyak hal. Oleh karena itulah, untuk masa yang akan datang segera perlu ada pembenahan dan perubahan positif sehingga Balar Manado dapat mengejar ketertinggalan dari Balar lain. Berkaitan dengan hal tersebut diajukan beberapa saran dan rekomendasi baik ditujukan kepada SDM di Balar Manado maupun pihak lain yang tentu saja berpengaruh peran serta Balar Manado terhadap departemen yang membawahinya dan kepada masyarakat pada umumnya. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

- * Meningkatkan kuantitas dan kualitas yang berupa: disiplin, idealisme, dan kemampuan bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing di dalam pekerjaan di kantor dan hubungannya dalam masyarakat.

- * Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan penelitian untuk perkembangan ilmu arkeologi
- * Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- * Meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan masyarakat hasil-hasil penelitian, sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat luas
- * Mengalokasikan dana yang cukup untuk kegiatan pengembangan prasarana dan sarana, pengembangan penelitian, dan pengembangan masyarakatan hasil-hasil penelitian.

Daftar Pustaka

- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Arkeologi Manado, Manado: Balai Arkeologi Manado, 2005&2006.
- Laporan Tahunan Balai Arkeologi Manado, Manado: Balai Arkeologi Manado, 1993-2004.
- Rancangan Induk Penelitian Arkeologi Nasional, Jakarta: Asisten Deputi Urusan Arkeologi Nasional, 2004.
- Rencana Kinerja Tahunan Balai Arkeologi Manado, Manado: Balai Arkeologi Manado, 2005 & 2006.
- Program Kerja Balai Arkeologi Manado, Manado: Balai Arkeologi Manado, 1993-2004.

Profil, Strategi Pengembangan, Dan Peran Koordinasi Dalam Aktivitas Arkeologis Di Balai Arkeologi Medan

Lucas Partanda Koestoro
(Balai Arkeologi Medan)

Abstrak

Bila dirinci, maka tugas pokok Balai Arkeologi yang berupa penelitian arkeologi meliputi: a. penghimpunan dan sistematisasi data arkeologi; b. pencarian data baru, pokok maupun penunjang; c. penemuan masalah-masalah ilmiah baru dalam arkeologi; d. pengembangan metodologi penelitian arkeologi; dan e. pengembangan teori arkeologi. Adapun sebagai lembaga yang berhubungan dengan pengelolaan, pemanfaatan, dan pengembangan benda-benda kepurbakalaan, Balai Arkeologi jelas menjalin hubungan dengan pihak-pihak lain.

Berkenaan dengan itu maka dalam aktivitasnya diperlukan koordinasi antara berbagai pihak. Koordinasi bertujuan untuk mencegah duplikasi, ketumpangtindihan, sebagai sarana pencapaian tingkat efisiensi yang tinggi. Koordinasi memerlukan juga kesatuan visi dalam penanganan dan pemberian nilai kepada objeknya. Disadari bahwa tantangan ke arah itu cukup besar dan diperlukan kiat-kiat memadai untuk menghadapinya.

Pengantar

Adalah hal yang tetap menarik untuk membicarakan benda-benda peninggalan purbakala mengingat belakangan ini semakin gencar terjadinya pemusnahan –dalam berbagai bentuk– objek dimaksud. Beberapa kasus menyangkut hal itu terjadi justru pada saat seharusnya kita melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkannya bagi berbagai kepentingan. Untuk itu, mengingat kompleksitas permasalahan dan beragamnya lembaga yang terkait, koordinasi yang baik menyangkut penanganannya sangat diperlukan untuk mencapai berbagai tujuan bersama.

Dalam kesempatan ini akan dikemukakan hal-hal menyangkut keberadaan Balai Arkeologi Medan. Profil Balai Arkeologi Medan berkenaan dengan potensi yang dimiliki dan aktivitas keseharian, luasan wilayah kerja dan potensi arkeologis yang dikandung, maupun langkah strategis yang direncanakan dan yang telah dilakukan bagi upaya pengembangan. Koordinasi adalah langkah yang perlu diperhatikan dalam pencapaian dan pemenuhan tugas Balai Arkeologi sebagai lembaga litbang.

Sekilas Balai Arkeologi Medan

Mengacu pada SK Mendikbud RI No. 0290/O/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Arkeologi tertanggal 1 Juli 1992, tugas pokoknya melaksanakan penelitian arkeologi di wilayah kerjanya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut maka Balai Arkeologi mempunyai fungsi:

- a. melakukan pengumpulan, perawatan, pengawetan, dan penyajian benda yang bernilai budaya dan ilmiah;
- b. dokumentasi dan pengkajian ilmiah;
- c. memperkenalkan dan menyebarluaskan hasil penelitian; dan d. melakukan bimbingan edukatif kultural kepada masyarakat tentang benda yang bernilai budaya dan ilmiah yang berhubungan dengan arkeologi.

Berkenaan dengan itu maka dapat disebutkan bahwa bidang garapan Balai Arkeologi adalah tinggalan budaya dan situsnya dengan tujuan sejarah dan nilai sejarah budaya bangsa. Untuk mencapai itu maka metode/prosedur kerjanya dalam penelitian adalah pengumpulan dan analisis data serta interpretasi sejarah. Adapun keluarannya berupa proposisi sejarah budaya bangsa dan layanan informasi arkeologis yang diharapkan mampu dipergunakan bagi berbagai kepentingan.

Berdasarkan SK Mendikbud RI No. 0274/O/1993 tentang pembentukan tiga Balai Arkeologi (di Medan, Banjarmasin, dan Ujungpandang) tertanggal 9 Juli 1993 maka wilayah kerja Balai Arkeologi Medan adalah Sumatera bagian utara yang meliputi wilayah Provinsi NAD, Riau (dan Provinsi Kepulauan Riau setelah ada pemekaran), Sumatera Barat, dan Provinsi Sumatera Utara.

Sejak dioperasionalkan pada tahun 1994, jumlah pegawai organik (PNS) di lingkungan lembaga itu hanya terdiri dari 10 orang. Dua pejabat struktural (Kepala dan Kasubbag TU) sekaligus adalah tenaga peneliti. Mengingat volume kerja yang diembannya, maka dipekerjakanlah 6 tenaga honorer. Dalam perkembangannya, pada tahun 2006 lembaga ini memiliki 7 tenaga peneliti arkeologi dan 3 tenaga administratif. Adapun dari 6 tenaga honorer, 5 di antaranya (seorang di antaranya adalah sarjana Sejarah) telah lulus dalam ujian/tes CPNS. Dalam kesempatan yang sama juga telah diterima dua arkeolog sebagai sebagai CPNS (lihat makalah Ketut Wiradnyana dalam EHPA 2006).

Saat ini Balai Arkeologi Medan telah memiliki sebuah gedung kantor berlantai dua seluas 1 1500 m² di atas lahan seluas 3000 m² di Kota Medan. Dua kendaraan roda empat dan tiga kendaraan roda dua melengkapi inventaris kantor, di samping beberapa set komputer.

Potensi Arkeologis di wilayah kerja Balai Arkeologi Medan

Dari segi arkeologis, lahan di Sumatera bagian utara yang menjadi wilayah kerja Balai Arkeologi Medan masih belum banyak terjamah tangan-tangan peneliti. Padahal diketahui, selain berkenaan dengan objek-objek bioantropologi dan paleoekologi/paleoantropologi, yang berguna bagi pemahaman evolusi manusia, memiliki potensi sangat besar dan tidak terbatas hanya pada suatu tingkat budaya melainkan berbagai tingkatan, dari awal hingga sekarang. Pada garis besarnya corak budaya itu dapat dikelompokkan menjadi lima bagian, yaitu budaya bercorak prasejarah, klasik, Islam, Modern/Barat, dan masa sekarang (etnografi).

Kehadiran corak-corak budaya itu sejauh ini diasumsikan melalui jalur migrasi, sehingga tonggak-tonggak perkembangan budayanya merupakan hasil kontak dengan dunia luar. Agaknya cukup beralasan bila tema sentral penelitian untuk Balai Arkeologi Medan adalah kontak dunia luar dan migrasi mewarnai tonggak-tonggak evolusi budaya lokal yang khas. Tema ini kelak dikembangkan menurut corak-corak budaya yang dimilikinya.

Arkeologi Maritim: *highlight* penelitian Balai Arkeologi Medan

Berkat sejumlah besar peninggalan kuna yang merupakan sisa kehidupan masa lampau sampai pada tradisi yang ada sekarang, Nusantara –sebuah negeri dengan ribuan pulau– menjadi salah satu kawasan penting di dunia dalam memahami peradaban manusia. Sementara itu Pulau Sumatera di masa lalu merupakan salah satu wilayah berkedudukan penting. Sumber sejarah menyebutkan bahwa pulau ini merupakan mata rantai jalur perdagangan yang mulai marak memasuki abad ke-6 Masehi. Pulau Sumatera dan Asia Tenggara Daratan oleh pedagang Cina diketahui sebagai sumber komoditas yang dibutuhkan saat itu, dan sejarawan menamakan mata rantai perniagaan di wilayah ini sebagai Jalur Sutera Kedua.

Jalur perniagaan ini merupakan alternatif dari rute sebelumnya untuk menghubungkan wilayah Timur Tengah dan Asia Timur sejak awal abad Masehi, yang disebut Jalur Sutra Pertama.

Berada pada posisi silang dua benua dan dua samudera memiliki keuntungan tersendiri dalam kancah lalu lintas perdagangan internasional. Selat Malaka adalah jalur lalu lintas penting di Kepulauan Nusantara yang sejak berabad-abad telah menjadi gerbang perlintasan pelayaran dan perdagangan dari Asia Daratan ke wilayah Nusantara. Sementara itu kondisi geografis Sumatera yang bersebelahan dengan daratan Asia Tenggara merupakan faktor utama yang sangat memungkinkan terjadinya hubungan dengan negeri luar. Itu masih ditunjang sumber daya alam yang dimilikinya, yang menyebabkan pulau ini sejak dahulu mengadakan kontak dengan orang asing. Aktivitas arkeologis telah memperlihatkan bahwa Pulau Sumatera memiliki banyak situs yang mengandung temuan baik berasal dari masa prasejarah, klasik, Islam, kolonial, dan masa sekarang (etnografi).

Hingga saat ini kesatuan wilayah kerja Balai Arkeologi Medan yang paling menonjol dalam warisan prasejarah adalah daerah Sumatera Utara. Hal tersebut didapatkan dari informasi dan penelitian yang telah berlangsung di daerah ini sejak masa kolonial. Salah satu contoh sejarah penghuniannya ditandai dengan kehadiran budaya paleolitik di Pulau Nias. Perubahan elevasi laut di daerah pantai dapat menyebabkan terciptanya situs arkeologi bawah air. Pengaruh perubahan iklim global pada sekitar 10.000 tahun yang lalu yang menyebabkan terpisahnya Pulau Sumatera dengan Asia Daratan oleh laut, sehingga kemungkinan besar situs-situs paling tua di Indonesia masih berada di dasar laut Jawa dan Cina Selatan.

Pada masa klasik (pengaruh Hindui-Buddha) misalnya, di Sumatera terdapat kerajaan-kerajaan bercorak maritim seperti Sriwijaya dan Malayu. Selama periode ini hubungan kedua kerajaan dimaksud dengan beberapa negeri luar sangat erat, baik menyangkut

keagamaan maupun perdagangan. Kontak yang terjadi tidak saja memanfaatkan perairan laut tapi juga telah memaksimalkan fungsi sungai-sungai di pulau ini sebagai jalur transportasi, sehingga tidak saja daerah pantai yang berkembang sebagai pusat-pusat peradaban, namun daerah pedalaman yang dilewati aliran beberapa sungai besar juga turut berkembang sebagai pusat-pusat peradaban pada masanya seperti Panai dan Minangkabau.

Perkembangan selanjutnya, ketika Islam mulai berpengaruh di Sumatera bagian utara muncul kerajaan bercorak Islam, yakni Samudera Pasai, Pidie dan Aceh. Ketiganya berperan dalam perdagangan internasional, bahkan disebut pula sebagai produsen beberapa hasil bumi langka. Perdagangan internasional berlangsung pesat, karena banyak pedagang asing yang singgah berniaga dan menetap. Komoditas dagang yang dibawa dari negeri lain tidak hanya diperjualbelikan di pelabuhan-pelabuhan utama tetapi juga di pelabuhan-pelabuhan penunjang. Perniagaan ramai berlangsung sehingga dapat dikatakan jaringan perdagangan antar benua, antar negeri, antar pulau dan antar wilayah seakan nampak tanpa batas.

Berabad-abad lamanya kerajaan-kerajaan kecil yang terpecah di pulau-pulau Indonesia secara ekonomis dan kulturil, juga sewaktu-waktu secara politis, telah bergabung atau digabungkan dalam satuan-satuan yang lebih besar. Adanya komunikasi dan lalu lintas antara kepulauan Indonesia ini dimungkinkan oleh penduduknya yang telah memperkembangkan suatu jaringan hubungan yang lebih baik, didukung oleh kemajuan teknologi perahu dan keahlian navigasi serta suatu "*enterprising spirit*" yang besar.

Hal-hal yang ingin dicapai melalui dipilihnya kajian arkeologi maritim oleh Balai Arkeologi Medan adalah memberikan gambaran yang lebih baik mengenai keanekaragaman budaya masa kini yang ada di wilayah kerja lembaga ini. Tercakup pula di dalamnya adalah gambaran berbagai unsur kebudayaan dari masa Prasejarah, Klasik, Islam dan Kolonial di wilayah kerja Balai Medan yang berkaitan

baik langsung maupun tidak langsung dengan arkeologi maritim, yang menjadi latar belakang dari keberadaan budaya masa kini masyarakat di daerah Sumatera bagian utara.

Cakupan bidang unggulan ini meliputi segala unsur kebudayaan sejak masa prasejarah hingga masa kolonial yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan dunia arkeologi maritim. Untuk mencapainya diperlukan upaya peningkatan sumber daya manusia, kuantitas maupun kualitasnya, di samping juga perlu dilakukan kerjasama dengan instansi lain, dan para akademisi yang kompeten. Selain itu diperlukan pula sarana analisis yang lebih baik sehingga dibutuhkan adanya laboratorium arkeologi yang representatif dan peralatan untuk kegiatan penelitian *underwater archaeology*. Agar pemaparan hasil penelitian kajian arkeologi maritim lebih valid diperlukan pula buku-buku atau bentuk acuan lain yang berkaitan dengannya, sehingga keberadaan suatu perpustakaan yang baik sangat dibutuhkan.

Diharapkan melalui pengembangan bidang unggulan arkeologi maritim oleh Balai Arkeologi Medan, dapat dijadikan sebagai acuan bagi penelitian dan pengembangan arkeologi maritim di lingkungan instansi kepurbakalaan khususnya. Kondisi ini akan berdampak terhadap makin berkembangnya penelitian serta pemahaman yang lebih baik terhadap pertumbuhan dan perkembangan dunia kemaritiman serta akibat yang dimunculkan olehnya baik dalam lingkup nasional maupun regional. Implikasi dari hal tersebut adalah tumbuhnya kesadaran manusia Indonesia khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya bahwa keragaman budaya yang ada merupakan buah nyata dari terjalinnya komunikasi yang baik pada masa lalu.

Di wilayah Provinsi Sumatera Utara saja terdapat 419 pulau kecil dan terluar yang belum digarap dan dikembangkan untuk mendukung pembangunan daerah. Pulau-pulau dimaksud, sebagian berpenghuni dan sebagai lagi tidak berpenduduk, 182 di antaranya belum bernama, menyimpan potensi kelautan dan perikanan.

Konsentrasi pulau-pulau tersebut di sebelah barat Kabupaten Nias dan sebelah selatan Kabupaten Nias Selatan. Begitupun dengan wilayah Kepulauan Riau, yang gugusan pulau-pulainya di bagian utara dan barat berbatasan dengan Vietnam dan Malaysia. Kemudian Provinsi Riau yang berbatasan langsung dan begitu dekat jaraknya dengan Singapura dan Malaysia. Adapun Provinsi Sumatera Barat bagian baratnya dipagari Kepulauan Mentawai, dan Provinsi NAD juga memiliki gugusan pulau di bagian barat, utara, dan timur. Selain perikanan dan kelautan, di pulau-pulau itu dapat dikembangkan pertanian dan pariwisata. Namun untuk itu diperlukan aktivitas eksplorasi/penelitian, termasuk membuat profil arkeologisnya bagi penentuan pengembangan yang sesuai.

Berkaitan dengan kemaritiman di Sumatera, khususnya Sumatera Utara, penelitian selama ini telah menghasilkan tiga situs penting yaitu Kota Cina, Padang Lawas, dan Barus. Kota Cina di pesisir timur pulau Sumatera merupakan salah satu jalur pelayaran yang penting dalam kawasan Selat Malaka. Di daerah itu ditemukan banyak fragmen keramik Cina, struktur candi bata, arca Buddha dan Wisnu yang tampak cukup kuat *Cola style*-nya. Analisis terhadap tinggalan arkeologi hasil ekskavasi di sana mengungkapkan bahwa situs ini telah dihuni mulai abad XII dan ditinggalkan pada abad XIV.

Adapun Barus di pesisir barat pulau Sumatera, di sebelah barat laut Padang Lawas telah banyak diberitakan sebagai pelabuhan penting sekurang-kurangnya sejak abad ke-6 M. Komoditas dagang andalan daerah tersebut diantaranya adalah kamper, kemenyan, emas, dan batu mulia. Barus selain melakukan kontak perdagangan dengan pedagang dari Cina maupun India juga dengan pedagang dari Timur Tengah.

Bersama-sama dengan kompleks kekunaan di Padang Lawas, keberadaan ketiga situs besar itu menunjukkan bahwa Sumatera Utara memiliki komoditi yang sangat penting di mata pedagang

internasional. Ini menjadikannya sebagai daerah tujuan pelayaran yang kelak memunculkan aktivitas perdagangan yang ramai. Kondisi tersebut memunculkan berbagai kontak budaya yang menghasilkan keragaman tata kehidupan masyarakatnya.

Di tempat lain di Sumatera seperti di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, daerah pesisir baratnya banyak dikunjungi pedagang asing terutama dari Eropa yang sengaja singgah bahkan menetap untuk keperluan dagang. Orang-orang Portugis, Belanda, dan Inggris adalah bangsa Eropa yang pernah bercokol di sana. Mereka mendirikan bangunan-bangunan pemerintahan, benteng, dan sebagainya yang sampai saat ini sisanya masih dapat dijumpai. Salah satunya loji/benteng Belanda di Pulau Cingkuk, Teluk Painan yang didirikan pada tahun 1664. Pendiriannya ditandai adanya unsur-unsur bangunan pertahanan, pergudangan, perkantoran serta permukiman. Fungsi yang beragam dari loji ini telah memberikan suatu petunjuk bahwa pesisir barat Sumatera memiliki peran yang strategis bagi jalur perdagangan dan pelayaran dari dalam dan luar negeri.

Sejauh ini hasil penelitian terhadap sejumlah situs penting tersebut belum memuaskan karena sejumlah permasalahan yang belum terpecahkan, diantaranya adalah: kurangnya tenaga peneliti, kurangnya kemampuan analisis terhadap beberapa jenis temuan arkeologis (seperti: keramik, gerabah, dan tulang), yang mengakibatkan kurang sahnya interpretasi terhadap benda-benda dimaksud dan lebih luas lagi terhadap penentuan pertanggalan relatifnya. Kurangnya tenaga ahli arkeologi bawah air serta ketiadaan peralatan untuk keperluan penelitian bawah air mengakibatkan semua situs arkeologi bawah air di wilayah kerja kantor ini belum dapat diteliti. Padahal dari situs-situs berkarakter demikian kita boleh berharap banyak untuk lebih jelas menggambarkan aspek-aspek dunia kemaritiman di daerah perairan bagian utara Pulau Sumatera

yang tidak dapat disangsikan merupakan gerbang terpenting di belahan barat Kepulauan Nusantara.

Berdasarkan paparan tersebut dapat dikatakan bahwa arkeologi maritim adalah suatu studi arkeologi yang mengkhususkan kajiannya pada segala aktivitas masa lalu yang berkaitan dengan dunia maritim termasuk pula di dalamnya adalah segala sesuatu akibat dari aktivitas kemaritiman di masa lalu, yang tercermin lewat wujud budaya material kuna yang ditemukan tidak hanya di wilayah perairan tapi juga yang terdapat di daratan.

Strategi

1. Perencanaan –sebagai rangkaian proses kegiatan menyiapkan dan menentukan seperangkat keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi dan apa yang akan dilakukan– harus dikerjakan dengan baik. Harus diingat bahwa fungsi perencanaan adalah: a. sebagai pedoman pelaksanaan dan pengendalian, b. menghindari pemborosan sumber daya, c. pengembangan quality assurance, dan d. upaya untuk memenuhi accountability kelembagaan. Untuk itu, hal penting dalam penyusunan rencana kegiatan Balai Arkeologi adalah: a. berhubungan dengan masa depan, b. seperangkat kegiatan, c. proses yang sistematis, dan d. hasil serta tujuan tertentu.

Dalam kaitannya dengan pembangunan, perencanaan merupakan alat pengubah dan pengendali perubahan, sedangkan pembangunan artinya mengubah untuk maju dan berkembang menuju arah tertentu. Ini berarti bahwa setiap upaya pembangunan memerlukan perencanaan dan setiap perencanaan adalah untuk mewujudkan upaya pembangunan.

2. Berhubungan dengan kondisi otonomi, penelitian arkeologi juga perlu dilakukan lebih intensif atas situs/objek arkeologis yang

merupakan kekhasan atau bahkan *landmark* suatu daerah. Barus di Tapanuli Utara misalnya, dibanggakan sebagai tempat kedatangan Islam pertama di Indonesia. Bahkan sumber sejarah mengindikasikan telah adanya sekelompok penganut agama Kristen (Nestorian) yang berasal dari Syria pada abad ke-6 di sana.

3. Masih berkaitan dengan kondisi otonomi daerah, pengembangan aktivitas arkeologi perlu dilakukan terhadap situs-situs unggulan daerah. Peninggalan masa Hindu-Buddha di Padanglawas, Tapanuli Selatan merupakan benang merah yang menghubungkan sejarah masyarakat di seputar Danau Toba masa kini dengan masa ketika tradisi prasejarah mendominasi kehidupannya.
4. Kerjasama dengan berbagai pihak perlu digalakkan. Pihak asing juga tidak tabu dijadikan partner kerjasama. Beberapa hal dapat diperoleh di dalamnya, termasuk alih teknologi.

Upaya termudah untuk menyadap ilmu menerobos dan memintas ke depan adalah alih teknologi. Namun berbicara tentang teknologi selalu dalam konteks akulturasi. Bukan hal yang bijaksana kalau mengambil alih teknologi hanya dengan cara mentransplantasi kulitnya saja. Alih teknologi dan sains harus merupakan proses sadar dari dalam masyarakat agar teknologi justru tidak membuat gamang. Utama prinsip: ambil yang baik untuk diindonesiakan (Hidayat, 2004).

5. Peningkatan mutu SDM melalui jalur pendidikan formal maupun diklat-diklat teknis.

Harus diketahui bahwa pendidikan adalah menyediakan atau menunjukkan jalan ke depan. Bila S1 merupakan program

peletakkan dasar pengetahuan dan minat, maka pendalaman lebih lanjut harus dirunut di tataran yang lebih tinggi dan lebih menjurus yakni pada program Pascasarjana. Ini adalah wadah untuk memberdayakan kemampuan untuk menalar, memajukan ilmu pengetahuan dengan cara membentuk pengetahuan dan melatih cara berpikir. Pendidikan pascasarjana tidak semata-mata menyelenggarakan penelitian demi suatu penemuan (*discovery*) namun juga memiliki beban moral sebagai pembuka mata hati. Moralitasnya bertaut dengan penghayatan kepada pengetahuan, pengejawantahan suatu fenomena, kecintaan terhadap penemuan dan nilai baru; yang diharapkan dapat menyibak rahasia alam tidak hanya kualitatif melainkan juga kuantitatif. Penelitian adalah kompas moral akademia dalam pascasarjana (Hidayat,2004).

6. Agar terus mengalami perkembangan, dunia ilmu pengetahuan memerlukan kreativitas dan daya eksplorasi. Dalam bidang kajian arkeologi dengan aneka macam cabang-cabangnya, ruang gerak pertama untuk mengembangkan daya cipta dan daya jelajah dalam setiap penelitian adalah penemuan dan perumusan masalah-masalah baru. Adapun ruang gerak kedua adalah pengembangan teknik-teknik penelitian. Ini berkenaan dengan pembuatan teknik baru yang diharapkan meningkatkan taraf kecanggihan analisis. Berikutnya adalah ruang gerak lain dalam metodologi dan pengembangan teori.
7. Pengembangan kajian dalam arkeologi hendaknya berlaku pula di lingkungan Balai Arkeologi Medan. Ini antara lain meliputi kajian-kajian seni yang terkait dengan data arkeologi (arkeologi seni); arkeologi maritim; atau arkeologi linguistik (yang memanfaatkan hasil maupun metodologi linguistik bagi pemecahan masalah-masalah arkeologi). Bidang kajian arkeo-linguistik diharapkan membantu pemecahan permasalahan

arkeologi menyangkut proses serta aliran migrasi nenek moyang bangsa Indonesia dan keturunannya sampai dengan tumbuhnya puak-puak (lihat makalah Ery Soedewo dalam EHPA 2006).

8. Agar kegiatan penelitian yang dilakukan oleh instansi ini yang berupa pengetahuan tentang dinamika serta keanekaragaman budaya masa lalu di daerah Sumatera bagian utara yang dampaknya masih terlihat hingga saat ini dapat tercapai diperlukan penerbitan hasil-hasil penelitian melalui media cetak maupun penyebarluasan melalui media lain, seperti media elektronik, baik di tingkat lokal, nasional, regional, maupun global.

Peran Koordinasi

Disadari bahwa untuk mencapai target yang diinginkan seperti yang telah diungkapkan tadi, Balai Arkeologi Medan masih menghadapi sejumlah kendala yang berkaitan dengan kurangnya sarana dan prasarana yang ada, terbatasnya kuantitas tenaga yang pandai dalam bidang arkeologi bawahan (saat ini hanya ada seorang), ketiadaan laboratorium dan tenaga teknisnya, kurangnya tenaga tekno arkeo, termasuk pula minimnya tenaga administrasi yang turut menunjang kelancaran kerja di kantor ini. Agar masalah-masalah itu dapat teratasi maka dibutuhkan penambahan SDM, penyertaan staf Balai Arkeologi Medan dalam berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan, serta pengadaan alat-alat penunjang kegiatan penelitian. Selain permasalahan SDM serta sarana prasarana penunjang kegiatan penelitian, dalam bidang pengembangan, Balai Arkeologi Medan melakukan beberapa kegiatan dalam rangka penyebarluasan informasi arkeologi melalui sarasehan, pameran foto, serta penulisan artikel pada media massa lokal. Terkait pula dengan kepentingan politis NKRI, Balai Arkeologi Medan juga mengadakan aktivitas penelitian arkeologis terhadap pulau-pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga.

Semua yang disebutkan di atas jelas memerlukan sebuah ikatan/mekanisme kerja yang melibatkan banyak, baik pemerintah, swasta, serta komponen masyarakat lainnya. Koordinasi jelas amat diperlukan dan wajib diberlakukan.

Dalam lingkup pengelolaan kepurbakalaan, ada tiga institusi yang berkaitan. Pertama adalah Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional dengan semua Balai Arkeologi yang ada di daerah (Balai Arkeologi Medan untuk wilayah kerja Provinsi NAD, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara) dengan tugas pokok mengadakan penelitian arkeologi dengan rincian tugas meliputi: penghimpunan dan sistematisasi data arkeologi; a. pencarian data baru; b. penemuan masalah-masalah ilmiah baru di bidang arkeologi; c. pengembangan metodologi penelitian arkeologi, khususnya yang terkait dengan masalah-masalah ilmiah murni; dan e. pengembangan teori arkeologi. Berkaitan dengan tugas pada butir c sampai dengan butir e, hal itu juga menjadi tugas pokok dari program-program pendidikan arkeologi di perguruan tinggi (UI, UGM, Unud, dan Unhas) selain tugas utamanya untuk mengembangkan sistem pendidikan bidang arkeologi. Adapun institusi lainnya adalah Direktorat Peninggalan Sejarah Dan Purbakala serta Direktorat Peninggalan Bawah Air beserta Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala di daerah (BP3 Bandaaceh untuk wilayah Provinsi NAD dan Provinsi Sumatera Utara; serta BP3 Batusangkar untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau, Riau, dan Provinsi Sumatera Barat) yang bertugas pokok melakukan perlindungan dan pembinaan peninggalan purbakala melalui pendaftaran/registrasi, serta aktivitas arkeologis lain yang ditujukan untuk pelestarian, pemanfaatan dan pengembangan dalam arti luas.

Itu masih ditambah dengan unsur lain yang juga menangani masalah kepurbakalaan, baik yang bersifat instansional seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (dengan nama/nomenklatur yang beragam, tergantung pada apresiasi pihak Pemda/DPRD), Museum,

Dinas Kimpraswil di Provinsi, Kabupaten/Kota, serta komponen masyarakat lainnya. Begitupun dengan pihak-pihak lain berkenaan dengan pengamanan, seperti TNI AL, Kepolisian, Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan dan sebagainya.

Karena kita ketahui tujuan dari koordinasi itu, maka langkah yang dilakukan pihak Balai Arkeologi juga harus semakin intensif. Koordinasi sebagai sebuah bentuk kegiatan bersama pada tahun-tahun mendatang akan menghasilkan kinerja yang lebih baik mengingat hampir semua aspek utama dalam kebudayaan dapat diungkap.

Penutup

Perubahan adalah proses yang sangat lazim, demikian pula yang terjadi di dunia ilmu pengetahuan, seperti yang terlihat dalam 300 tahun terakhir ini ialah pola pemikiran ilmu pengetahuan dan teknologi. Tata cara yang dirunut untuk mempertinggi potensi budaya adalah mempersiapkan tatanan berpikir yang sesuai dengan ilmu pengetahuan untuk menyongsong keterlibatan Balar/peneliti dalam masyarakat teknologi di masa mendatang.

Dalam proses perubahan dan pembaruan itu individu dan masyarakat harus didudukkan pada posisi yang dapat meningkatkan martabatnya secara mandiri. Penekanannya agar manusia mampu merebut atribut budaya pengetahuan dan teknologi, karena bagaimanapun manusia yang siap pada bidang itulah yang kelak mampu menolong masyarakatnya melepaskan diri dari kaitan-kaitan primordial dan berguna bagi lingkungannya (Hidayat,2004). Perubahan dan kemajuan adalah sejarah kita di masa depan, dan oleh karena itu terwujudnya masyarakat idaman tergantung kepada manusia sebagai potensi kultural (Hidayat,2004).

Dalam konteks memajukan ilmu pengetahuan, tatanan kebudayaan dirasakan penting. Oleh karena itu tidak mengherankan bila beberapa negara perlu dituntut agar menyatukan kebudayaan

dalam satu rumpun dengan sains dan teknologi. Jepang juga tidak sendirian mewadahi budaya bersama atribut kemanusiaan lainnya, pengetahuan dan teknologi. Tampaknya hanya Indonesia yang –entah karena apa– perlu mengerdilkan kebudayaan hanya menjadi bagian dari pariwisata, dan bukan menjadi satu dengan upaya pengetahuan dan teknologi (Hidayat, 2004). Hasil kegiatan Balai Arkeologi seyogyanya menjadi bagian dari upaya mempersiapkan dengan tepat dan benar generasi muda sebagai penerus, yang membawa atribut ke-Indonesiaan (Hidayat,2004).

Balai Arkeologi Medan hingga saat ini masih berupaya agar profilnya sebagai institusi litbang dapat diketahui secara lebih luas oleh berbagai pihak di wilayah kerjanya. Hal tersebut terbukti melalui strategi pengembangan dan koordinasi yang telah, sedang, dan akan dilakukan dengan berbagai pihak di wilayah kerjanya. Hal ini tampak pada beberapa point yang dapat menunjang strategi pengembangan Balai Arkeologi Medan:

- * Sebelum tahun 1980 penelitian arkeologi menitikberatkan aktivitasnya pada kajian artefak saja. Belakangan terjadi pergeseran dan memunculkan penelitian tematik pada lingkup kawasan sehingga kajiannyapun lebih bersifat multidisipliner. Hasil kegiatan arkeologipun menjadi harus dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas.
- * Aktivitas arkeologi selain berguna bagi pengembangan arkeologi, juga bukan sekedar gambaran mengenai sejarah kehidupan bangsa yang hidup di kawasan Indonesia pada zaman dahulu, melainkan memainkan peran dalam membentuk citra identitas Indonesia di dunia internasional. Penelitian arkeologis diharapkan menjadi teladan kemanusiaan, kepemimpinan, dan juga menghargai perbedaan. Semua dapat menjadi acuan bagi pembuatan proyeksi ke masa depan dengan berpedomankan sejarah masa lampau.
- * Berkenaan dengan hal itu maka kerjasama dengan pihak lain, baik melalui penelitian, publikasi, serta pameran diharapkan

memberi nilai tambah bagi Balai Arkeologi. Penyebarluasan informasi diharapkan merata ke segenap komponen masyarakat. Pengetahuan arkeologi akan semakin dikenal dan menumbuhkan apresiasi mereka terhadap keberadaan berbagai warisan budaya. Mereka juga diharapkan akan lebih merasakan kegunaan arkeologi dengan menikmati pengetahuan yang dihasilkan.

- * Apresiasi itu diharapkan menumbuhkan reaksi masyarakat berupa perhatian dan keprihatinan terhadap kerusakan objek-objek arkeologis. Kita tahu bahwa banyak kegiatan yang saat ini begitu dekat dengan hidup keseharian, yang berdampak penting terhadap sumber daya arkeologi. Namun dibalik itu harus diserap aspirasi masyarakat yang juga menginginkan kesejajaran perhatian terhadap objek arkeologis melalui pemanfaatannya bagi kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonominya.
- * Tidak boleh lagi muncul kesan bahwa pemanfaatan hasil kerja arkeologis justru mengisolasi objek arkeologis/benda cagar budaya dari kehidupan masyarakatnya. Artinya, dalam kerja arkeologi harus dimunculkan kesadaran tentang perlunya saling keterbukaan, kesetaraan, menghargai keragaman, dan kesanggupan untuk mendengar suara pihak lain. Boleh disepakati bahwa itu semua akan menjadi pendorong peningkatan kinerja Balai Arkeologi.***

Daftar Pustaka

- Hidayat, Bambang, 2004. *Mozaik Pemikiran. Sejarah dan Sains untuk Masa Depan*. Bandung: Kiblat
- Koestoro, Lucas Partanda, Ery Soedewo & Ketut Wiradnyana, 2004. *Sekilas Balai Arkeologi Medan Dalam Pengembangan Dan Pemasarakatan Ilmu Serta Pengembangan Kebudayaan*. Medan: Balai Arkeologi Medan
- Renfrew, Colin & Paul Bahn, 1991. *Archaeology Theories, Methods, and Practise*. London: Thames and Hudson
- Sharer, Robert J & Wendy Ashmore, 1979. *Fundamentals of Archaeology*. California: Benjamin Cummings Publishing Company
- Sedyawati, Edi, 2001. *Kumpulan Makalah Dan Sambutan Prof. DR. Edi Sedyawati, Direktur Jenderal Kebudayaan Tahun 1999*. Jakarta: Depdiknas
- Soekadijo, RG, 2000. *Anatomi Pariwisata*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya

SEKILAS BALAI ARKEOLOGI MEDAN



WILAYAH KERJA



MELIPUTI:

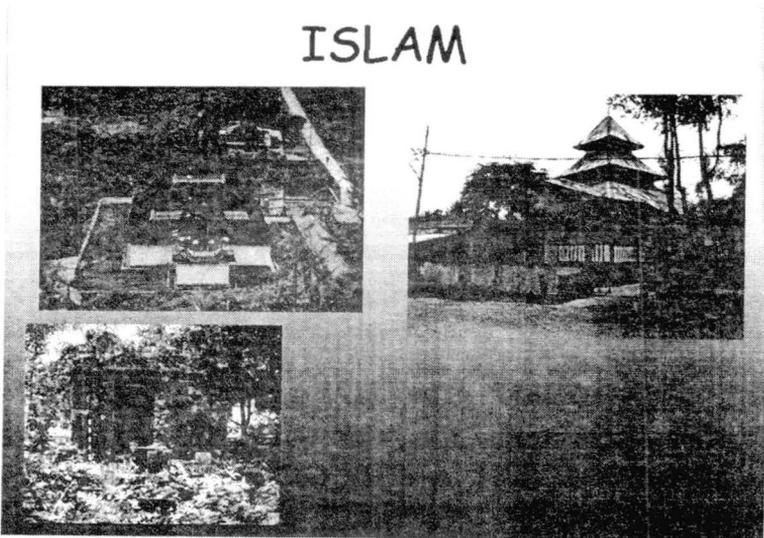
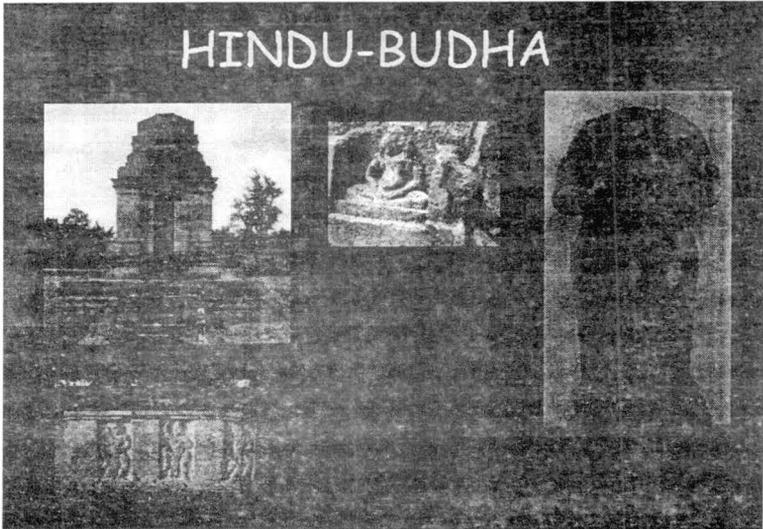
1. PROV. NANGROE ACEH DARUSALLAM
2. PROV. SUMATERA UTARA
3. PROV. SUMATERA BARAT
4. PROV. RIAU
5. PROV. KEP. RIAU

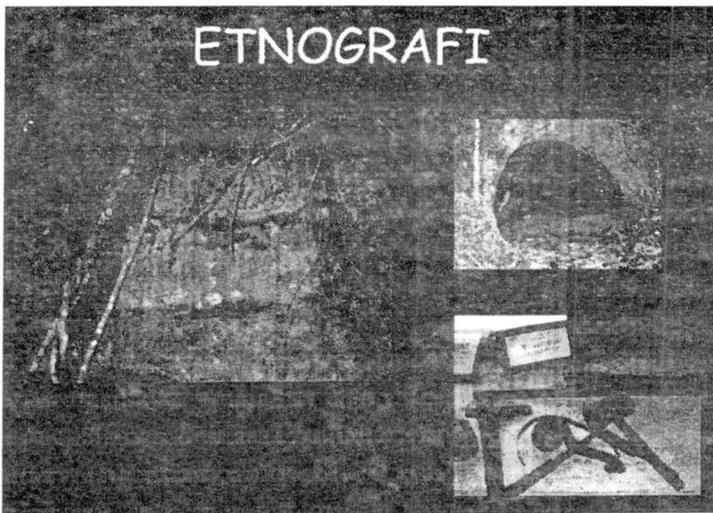
POTENSI ARKEOLOGIS WILAYAH KERJA ARKEOLOGIS ME

- ↓ PRASEJARAH
- ↓ HINDU-BUDHA
- ↓ ISLAM
- ↓ KOLONIAL (EROPA)
- ↓ MODERN

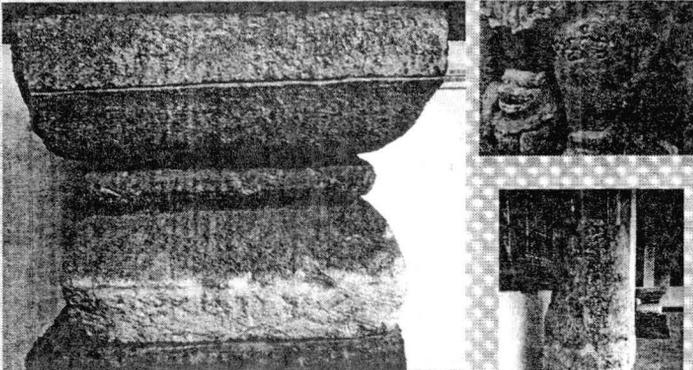
PRASEJARAH





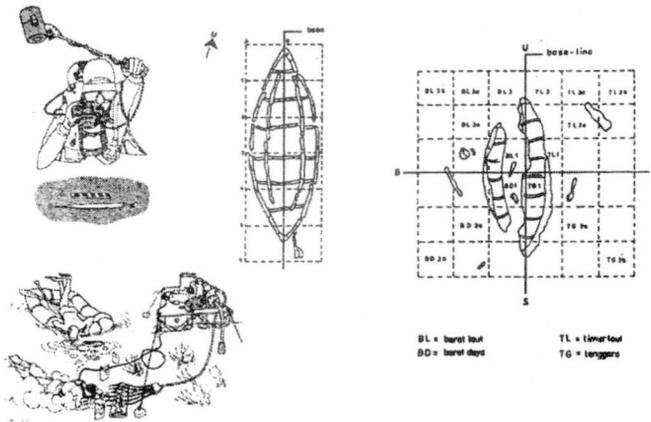


LINGUISTIK DAN EPIGRAFI



...tatkala hang tahi si ranggit...
 ...kabayin p wanyawari babwat bagas brahala satap.

UNDERWATER ARCHAEOLOGY



HIGHLIGHT BALAI ARKEOLOGI
MEDAN

ARKEOLOGI MARITIM

Arkeologi maritim adalah suatu studi arkeologi yang mengkhususkan kajiannya pada segala aktivitas masa lalu yang berkaitan dengan dunia maritim termasuk pula di dalamnya adalah segala sesuatu akibat dari aktivitas kemaritiman di masa lalu, yang tercermin lewat wujud budaya material kuna yang ditemukan tidak hanya di wilayah perairan tapi juga yang terdapat di daratan.

PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

PENELITIAN

Penelitian-penelitian yang diadakan di wilayah kerja Balai Arkeologi Medan. Selain itu dilakukan juga penelitian pulau-pulau terluar yang terletak di perbatasan

Informasi dan pendidikan kultural bagi masyarakat dapat menunjang lancarnya tugas pokok Balai Arkeologi Medan, hal ini dilakukan dengan mengadakan sarasehan, pameran-pameran yang mendukung penyebaran informasi arkeologi kepada publik.

Pendukung

STRATEGI BALAI ARKEOLOGI MEDAN

I. KOORDINASI

PERANAN KOORDINASI

Beberapa unsur lain yang juga menangani masalah kepurbakalaan, baik yang bersifat instansional seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (dengan nama/nomenklatur yang beragam, tergantung pada apresiasi pihak Pemda/DPRD), Museum, Dinas Kimpraswil di Provinsi, Kabupaten/Kota, serta komponen masyarakat lainnya. Begitupun dengan pihak-pihak lain berkenaan dengan pengamanan, seperti TNI AL, Kepolisian, Imigrasi, Bea Cukai, Kejaksaan dan sebagainya.

II. PENINGKATAN KUALITAS DAN KUANTITAS SDM BALAI ARKEOLOGI MEDAN

- PENGADAAN PEGAWAI BARU YANG KAPABEL
- PENYERTAAN PEGAWAI YANG ADA PADA PELATIHAN DAN DIKLAT-DIKLAT

III. MELENGKAPI SARANA DAN PRASARANA PENUNJANG PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- PENGADAAN FASILITAS KANTOR UNTUK ADMINISTRASI DAN ANALISIS HASIL TEMUAN PENELITIAN
- PENGADAAN PERLENGKAPAN PENUNJANG PENELITIAN UNDERWATER ARCHAEOLOGY

PROCEEDINGS EHPA

**KEBIJAKAN
DAN STRATEGI
PENGELOLAAN INSTITUSIONAL**

Bandung, 14-18 Juni 2006



**Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional
Badan Pengembangan Sumberdaya Kebudayaan dan Pariwisata
Departemen Kebudayaan dan Pariwisata**

Jakarta 2007

Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional
Jalan Raya Condet Pejaten No. 4, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12510 - Indonesia
Telp. +62 21 7988171 / 7988131
Fax. +62 21 7988187

Homepage: www.indoarchaeology.com
E-mail: arken3@arken.com
atik_arken@yahoo.com

Perpustakaan
Jenderal